



2020

ANNUAL REPORT

Laporan Tahunan 2020



GRAND DEVELOPMENT
PT. GRAND HOUSE MULIA, Tbk





4	IKHTISAR KINERJA 2020 2020 PERFORMANCE HIGHLIGHTS	
5	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	
8	Ikhtisar Saham Share Highlights	
10	LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT	
11	Sambutan Komisaris The Board Of Commissioners' Report	
14	Laporan Direksi The Board of Directors' Report	
21	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	
22.	Identitas Perusahaan Corporate Identity	
23.	Sekilas Perusahaan Company in Brief	
32.	Visi & Misi Vision & Mission	
33.	Kegiatan dan Bidang Usaha Corporate Activities And Line Of Business	
35.	Profil Dewan Komisaris Profile of Board of Commissioners	
37.	Profil Direksi Profile of Board of Directors	
40.	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification	
41.	Sumber Daya Manusia Human Resources	
44.	Struktur Organisasi Organizational Structure	
45.	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Stock Exchange Listings	
46.	Daftar Komposisi Pemilik Efek List of Stock Ownership Composition	
48.	Lembaga Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions	
51	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS	
52.	Tinjauan Ekonomi dan Industri Economy and Industry Review	
53.	Tinjauan Keuangan Financial Review	
67	TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
68.	Pendahuluan Introduction	
69.	Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Objectives of Corporate Governance Implementation	
70.	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Commitment to Implementation of Corporate Governance	
73	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	
74	Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	
75	Implementasi Rekomendasi OJK Implementation of OJK Recommendation	
76	Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policy and Structure	
76	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	
82	Dewan Komisaris The Board of Commissioners	
85	Direksi The Board of Director	
89	Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors	
89	Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi Meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Joint Meeting of the Board of Commissioners & Directors	
91	Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Ultimate and Controlling Shareholders	
92	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Affiliation of the Board of Commissioners, Directors and Ultimate/Controlling Shareholders	
93	Komite Audit Audit Committee	
97	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	
101	Audit Internal Internal Audit	
103	Divisi Audit Internal Internal Audit Division	
104	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	
105	Kebijakan Dividen Dividend Policy	
107	Akuntan Publik Public Accountant	
108	Manajemen Risiko Perusahaan Company Risk Management	
110	Profil Risiko Yang Dihadapi Perusahaan Company Risk Profile	
111	Sistem Pengendalian Intern Intern Control System	
114	Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan Legal Cases Involving The Company, Board of Commissioners, and Board of Directors	
115	Akses Informasi Perusahaan Company Information Access	
115	Kode Etik Code of Ethics	
117	Whistleblowing System Whistleblowing System	
118	TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	
121	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018 PT Trimitra Propertindo, Tbk. Statement of The Board of Commissioners and Directors on Accountability for The Content of 2018 Annual Report of PT Trimitra Propertindo, Tbk.	
122	LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENT	



Ikthisar Kinerja 2020

Finance Highlights

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Profit or Loss and Other Comprehensive Income Statement

	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	11.108.774.250	4.863.379.520
Piutang usaha - pihak ketiga	2.359.633.190	2.287.433.725
Aset real estate	117.620.944.785	87.710.266.680
Uang muka	1.446.638.375	1.666.626.118
Biaya dibayar di muka	6.694.371	888.583.502
JUMLAH ASET LANCAR	132.542.684.971	97.416.289.545
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi	-	1.275.000.000
Tanah untuk pengembangan	82.783.320.591	20.710.225.647
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	19.031.647.449	2.920.281.076
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 406.472.866 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 287.207.301 pada tanggal 31 Desember 2019	397.727.504	452.646.699
Properti investasi	-	23.162.000.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	102.212.695.544	48.520.153.422
JUMLAH ASET	234.755.380.515	145.936.442.967

	2020	2019
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha - pihak ketiga	5.960.056.662	13.489.222.133
Beban akrual	79.229.821	50.000.000
Uang muka pelanggan	59.942.333.665	21.123.109.650
Utang pajak	9.880.401.096	5.890.175.852
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam		
satu tahun:		
Utang bank	25.020.000.000	12.954.067.753
Utang pembiayaan konsumen	97.806.535	89.907.038
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	100.979.827.779	53.596.482.426
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian		
yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	19.237.115.325	35.155.232.247
Utang pembiayaan konsumen	17.116.966	114.923.501
Utang pihak berelasi	-	200.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	124.370.000	86.738.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	19.378.602.291	35.556.893.748
JUMLAH LIABILITAS	120.358.430.070	89.153.376.174

EKUITAS	2020	2019
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada		
pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 2.500.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		
- 31 Desember 2020: 787.500.000 saham		
- 31 Desember 2019: 630.000.000 saham	78.750.000.000	63.000.000.000
Tambahan modal disetor	40.588.033.379	-
Defisit	(4.951.083.418)	(6.226.934.205)
Sub jumlah - neto	114.386.949.961	56.773.065.795
Kepentingan nonpengendali	10.000.484	10.000.998
JUMLAH EKUITAS	114.396.950.445	56.783.066.793
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	234.755.380.515	145.936.442.967

	2020	2019
PENJUALAN	28.839.344.166	31.699.102.918
BEBAN POKOK PENJUALAN	(18.206.843.501)	(21.426.567.711)
LABA BRUTO	10.632.500.665	10.272.535.207
BEBAN USAHA		
Beban penjualan	(3.862.804.858)	(2.405.073.925)
Beban umum dan administrasi	(4.535.767.195)	(1.776.027.647)
LABA USAHA	2.233.928.612	6.091.433.635
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Biaya keuangan	(1.096.137.223)	(1.768.575.094)
Penghasilan lain-lain - neto	833.210.489	228.717.799
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN		
PAJAK PENGHASILAN	1.971.001.878	4.551.576.340
BEBAN PAJAK FINAL	(720.983.605)	(573.786.987)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.250.018.273	3.977.789.353
PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA TAHUN BERJALAN	1.250.018.273	3.977.789.353
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali program imbalan pasti	25.832.000	8.992.000
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.275.850.273	3.986.781.353
TAHUN BERJALAN		
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG		
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.250.018.787	3.977.788.355
Kepentingan nonpengendali	(514)	998
Jumlah	1.250.018.273	3.977.789.353
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN		
BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.275.850.787	3.986.780.355
Kepentingan nonpengendali	(514)	998
Jumlah	1.275.850.273	3.986.781.353
LABA PER SAHAM DASAR	1,84	138,67

Rasio / Ratio	31 Desember 2020
Laba per Lembar Saham	1,84
Return on Asset	0,53%
Return on Equity	1,09%
Current Ratio	131,26%
Nett Profit Margin	4,33%
Debt Equity Ratio	1,05
Debt Asset Ratio	51,3%

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing

Dalam lembar saham (jumlah penuh)/In shares (full amount)

Tanggal Date	Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	Penambahan/Pengurangan Saham	Accumulation
	Listing in Indonesia Stock Exchange	Additional/Reduction of Shares	
10 September 2020 September 10, 2020	Penawaran Saham Umum Perdana Initial Public Offering		-
	Saham Tambahan Additional Shares	Belum ada penambahan saham No additional shares	-
	Dividen Saham Dividend Shares	Belum ada pembagian dividen No distribution of dividends	-
	Saham Bonus Bonus Shares	Belum ada pembagian bonus No distribution of bonuses	-
	Penawaran Umum Terbatas Right Issue	Belum ada penawaran umum terbatas No right issue	-
	Pemecahan Saham Share split	Belum ada pemecahan saham No Share split	-
	Penurunan Modal Capital Reduction	Belum ada penurunan modal No capital reduction	-

Pada tahun 2020, jumlah saham Perseroan yang beredar adalah berjumlah 157.500.000 lembar saham.

In 2020, the Company's shares amounted to 157,500,000 shares.

DIAGRAM ASET, LIABILITAS

ASET/ASSETS

Dalam Juta Rupiah/In Million Rupiah



LIABILITAS/LIABILITY

Dalam Juta Rupiah/In Million Rupiah



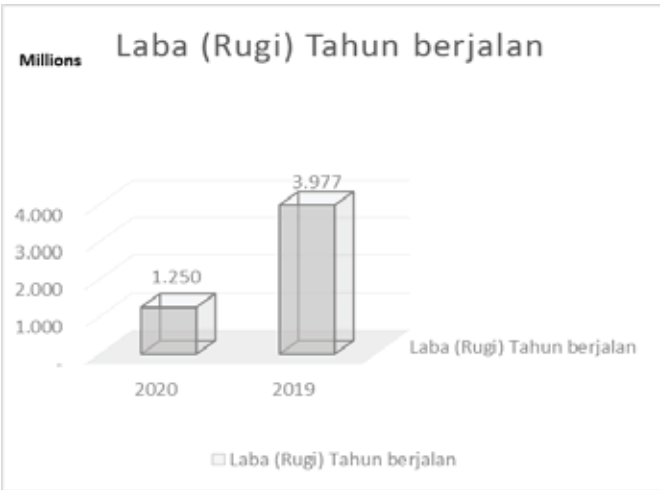
EKUITAS/EQUITY

Dalam Juta Rupiah/In Million Rupiah



LABA TAHUN BERJALAN/CURRENT YEAR PROFIT

Dalam Juta Rupiah/In Million Rupiah



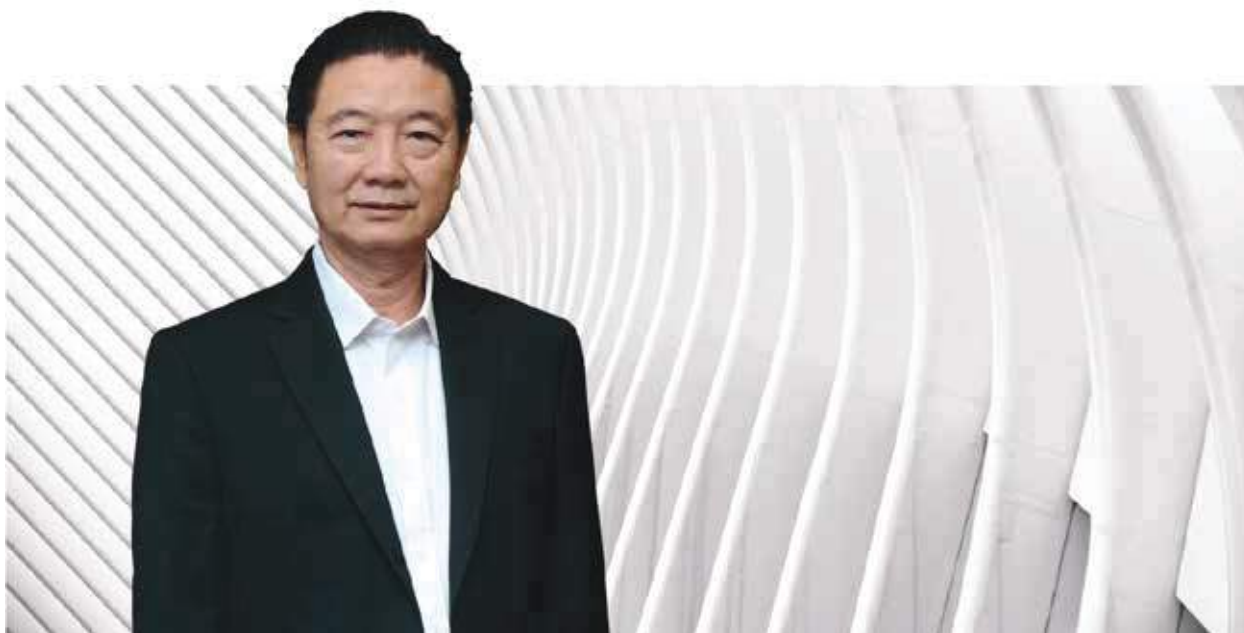


Laporan Manajemen

Management Report

SAMBUTAN KOMISARIS

The Board Of Commissioners' Report



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat.

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan PT Grand House Mulia, Tbk dengan baik. Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak dan pemangku kepentingan atas dedikasi dan dukungan kepada Perseroan sehingga bisa merealisasi tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari pencapaian target dari beberapa aspek yaitu aspek operasional, aspek finansial, dan tata kelola.

Penilaian Kinerja Direksi Atas Pengelolaan Perseroan Tahun 2020

Situasi perekonomian sepanjang tahun 2020 penuh dengan tantangan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tidak stabil. Harus diakui kondisi makro ekonomi tersebut berpengaruh pada bisnis real estate. Dengan penuh komitmen dan dedikasi, Perseroan telah bekerja keras untuk menjaga pasar, bahkan memperluas pasar sehingga bisa mencapai hasil yang cukup memuaskan.

Dear Shareholders and Stakeholders.

Praise and Gratitude we pray to God Almighty, because thanks to His grace and guidance the Board of Commissioners has carried out a supervisory duty on the management of PT Grand House Mulia, Tbk. We express our gratitude to all parties and stakeholders for their dedication and support to the Company so that they can realize the stated goals. This can be seen from the achievement of targets from several aspects, namely operational aspects, financial aspects, and governance.

Assessment on Directors' Performance upon the Company's Management in 2020

The economic situation throughout 2020 is full of challenges. This is caused by external factors, especially the volatile rupiah exchange rate against the dollar. Admittedly, the macroeconomic conditions affect the real estate business. With full commitment and dedication, the Company has worked hard to maintain the market, even expanding the market so that it can achieve satisfactory results.

Pengawasan Terhadap Penerapan Strategi Perusahaan

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap Direksi dalam mengelola Perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris dibantu organ pendukung, yakni Komite Audit.

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien melalui mekanisme rapat. Rapat tersebut dilakukan baik di dalam lingkungan Dewan Komisaris, Direksi, maupun secara bersama melalui rapat gabungan.

Sepanjang 2020, Dewan Komisaris melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 4 kali. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan perbaikan kinerja dengan memberikan review dan evaluasi terkait dengan pertumbuhan perusahaan, proyeksi proyek, serta rencana kerj tahun 2021.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Direksi telah memberikan paparan terkait dengan rencana kerja dan prospek bisnis tahun 2021. Rencana kerja tersebut telah disusun secara komprehensif dengan memperhatikan capaian tahun 2020. Dalam paparan kepada Dewan Komisaris, Direksi telah mengungkapkan strategi pengembangan bisnis, termasuk rencana Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris dibantu dengan organ pendukung melakukan pembahasan. Melihat kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki serta melihat orientasi pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris berkesimpulan rencana kerja yang disusun telah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pandangan Dewan Komisaris, industri real estate masih sangat terbuka dan menjanjikan. Hal ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah, pemasaran dan pengembangan pasar.

Supervision on the Company's Strategic Implementation

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") and the Company's Articles of Association, the scope of duties and responsibilities of the Board of Commissioners is one of the functions of supervision of the Board of Directors in managing the Company. In carrying out these duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely the Audit Committee.

The Board of Commissioners and Directors always communicate and coordinate effectively and efficiently through a meeting mechanism. The meeting was conducted both within the Board of Commissioners, the Board of Directors, and jointly through joint meetings.

Throughout 2020, the Board of Commissioners held joint meetings with 4 times. In the meeting the Board of Commissioners provided input and recommendations to the Board of Directors related to performance improvement by providing reviews and evaluations related to company growth, project projections, and work plans for 2021.

View on Business Prospects Planned by the Directors

The Board of Directors has provided exposure related to work plans and business prospects for 2021. The work plan has been compiled comprehensively with regard to the achievements of 2020. In the presentation to the Board of Commissioners, the Board of Directors has revealed business development strategies, including marketing plans and market development. For the work plan, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs to discuss. Seeing the capacity and capability possessed and seeing a sustainable growth orientation, the Board of Commissioners concluded that the work plan prepared was in line with what was expected. In the view of the Board of Commissioners, the real estate industry is still very open and promising. This is inseparable from the infrastructure development that the government promotes

Penerapan Good Corporate Governance

Dewan Komisaris berpandangan, Direksi telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan baik. Hal itu tercermin dari kebijakan Direksi yang selalu berkoordinasi dengan Sekretaris perusahaan dan Komite Audit. Direksi juga selalu menginternalisasi pentingnya GCG kepada seluruh organ-organ terkait. Dewan Komisaris selalu mengingatkan sebagai perusahaan publik, dalam mengimplementasikan GCG, Perseroan harus selalu berpedoman kepada peraturan yang ada dan memenuhi arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik, salah satunya adalah selalu memberi saran dan masukan kepada Dewan Komisaris. Beberapa masukan yang diberikan di antaranya dalam hal penyusunan rencana audit, efektivitas sistem pengendalian, dan penilaian kinerja Direksi. Komite Audit juga telah memberikan masukan terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.

Apresiasi dan Penutup

Dewan Komisaris memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah bekerja keras mengarungi masa-masa penuh tantangan pada tahun 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan mitra bisnis atas kerja sama selama ini. Semoga kerja sama dan dukungan bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Good Corporate Governance Implementation

The Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors has implemented Good Corporate Governance (GCG) properly. This is reflected in the policies of the Board of Directors who always coordinate with the Corporate Secretary and Audit Committee. The Directors also always internalize the importance of GCG to all relevant organs. The Board of Commissioners always reminds as a public company, in implementing GCG, the Company must always be guided by existing regulations and fulfil the direction of the Financial Services Authority (FSA).

Assessment on Audit Committee's Performance

The Board of Commissioners considers the Audit Committee has carried out its duties well, one of which is to always give advice and input to the Board of Commissioners. Some of the inputs provided include the preparation of the audit plan, the effectiveness of the control system, and the assessment of the performance of the Directors. The Audit Committee has also provided input related to the results of the audit conducted by the External Auditor.

Appreciation and Closing

The Board of Commissioners gives the highest appreciation to the Directors who have worked hard to navigate challenging times in 2020. We also thank the shareholders, stakeholders and business partners for their cooperation. Hopefully cooperation and support can be better in the coming years.

Jakarta, 30 Juni 2021



Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI

The Board of Directors Report



Para pegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat.

Perkenankan kami mengajak kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat yang diberikan-Nya PT Grand House Mulia, Tbk mampu mencatatkan kinerja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, serta mampu memenuhi target-target yang telah ditetapkan.

Tinjauan Ekonomi Global

Berdasarkan Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal Edisi III 2020, yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, bahwa perekonomian global masih dipengaruhi oleh wabah atau pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Di saat yang sama, pelonggaran pembatasan sosial di berbagai negara lain memberikan harapan dan optimisme pemulihan. Beberapa negara melanjutkan relaksasi pembatasan sosial pada triwulan III yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di negaranya.

COVID-19 telah membawa dampak yang begitu signifikan terhadap perekonomian dunia.

Dear shareholders and stakeholders.

Let us convey our gratitude to God the Almighty, for all His blessings, PT Grand House Mulia, Tbk was able to record better performance than the previous year, and was able to meet the targets set.

Global Economic Overview

Based on the Economic, Financial and Fiscal Review Edition III 2020, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Fiscal Policy Agency, that the global economy is still affected by the COVID-19 outbreak or pandemic which has not shown any signs of abating. At the same time, the easing of social restrictions in various other countries provides hope and optimism for recovery. Several countries continued to relax social restrictions in the third quarter, which boosted economic activity in their countries.

COVID-19 has had a significant impact on the world economy.

Sebagian besar negara di dunia melakukan kebijakan restriksi cukup ketat untuk mencegah penularan COVID-19, dan langkah tersebut memberi kontribusi pada kontraksi ekonomi. Dalam perkembangan Indikator Ekonomi Global, pemulihan ekonomi berlanjut pada Juli dan Agustus 2020, hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti PMI Manufaktur (Purchasing Manager Index), pertumbuhan penjualan ritel, dan harga komoditas yang peningkatannya lebih melandai dibanding bulan Juni. Pada bulan Agustus, PMI Global telah memasuki teritori ekspansi pada angka 51,8, didorong salah satunya oleh sisi demand yang digambarkan peningkatan komponen PMI output dan pesanan baru (new order). Sentimen bisnis mulai membaik dan mencapai level tertinggi dalam enam bulan, meski penurunan pasar tenaga kerja masih berlanjut.

Berdasarkan tinjauan dari pasar saham, perbaikan kinerja bursa saham global yang terjadi pada akhir triwulan kedua masih terus berlanjut pada triwulan ketiga 2020. Dari dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang bulan Agustus 2020 telah menguat sebesar 3,70 persen dan mencapai level 5.340. Dalam perkembangan sektoral IHSG, indeks sektor properti masih melanjutkan pelemahan yang terjadi sejak triwulan pertama 2020. Sampai dengan 28 Agustus 2020, kinerja sektor properti tercatat mengalami penurunan sebesar 39,9 persen (ytd). Pelemahan masih terus berlanjut di sektor ini disebabkan oleh masih tertekannya kinerja penjualan properti di tengah adanya pandemi COVID-19. Sebagai sektor tersier, pelemahan aktivitas ekonomi akibat pandemi sangat memukul penjualan properti di tanah air. Dampaknya, harga properti mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari sisi perbankan, suku bunga kredit mengalami penurunan sepanjang tahun 2020, untuk suku bunga Kredit Konsumsi (KK) turun sebesar 23 bps dengan rata-rata 11,20 persen. Penurunan suku bunga kredit perbankan tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah meskipun perbankan menghadapi peningkatan restrukturisasi kredit di tengah perlambatan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) berpendapat keberhasilan uji coba salah satu vaksin corona penghujung tahun 2020 mencapai 90 persen telah memunculkan optimisme akan bangkitnya sektor properti yang sempat terpuruk.

Most countries in the world carry out strict restrictive policies to prevent the transmission of COVID-19, and these steps contribute to economic contraction. In the development of Global Economic Indicators, the economic recovery continued in July and August 2020, as indicated by several indicators such as the Manufacturing PMI (Purchasing Manager Index), retail sales growth, and commodity prices which increased more gently than in June. In August, PMI Global has entered expansion territory at 51.8, driven by the demand side which is illustrated by an increase in the PMI component of output and new orders. Business sentiment began to improve and reached its highest level in six months, although the labor market downturn continued.

Based on stock market review, improvements in global stock market performance that occurred at the end of the second quarter continued in the third quarter of 2020. Domestically, the Jakarta Composite Index (JCI) throughout August 2020 has strengthened by 3.70 percent and reached the level of 5,340. In terms of sectoral developments in the JCI, the property sector index continued the weakening that had occurred since the first quarter of 2020. As of August 28, 2020, the property sector's performance recorded a decline of 39.9 percent (ytd). The weakening continues in this sector due to the still depressed property sales performance in the midst of the COVID-19 pandemic. As a tertiary sector, the weakening of economic activity due to the pandemic has severely hit property sales in the country. As a result, property prices have decreased significantly. From the banking side, loan interest rates decreased throughout 2020, for Consumer Credit (KK) interest rates fell by 23 bps with an average of 11.20 percent. The government continued to reduce the bank loan interest rate even though banks were facing increased credit restructuring amid the economic slowdown due to the COVID-19 pandemic.

The Association of Indonesian Real Estate Companies (REI) believes that the success of the trial of one of the corona vaccines at the end of 2020 reaching 90 percent has raised optimism for the rise of the property sector which had slumped.

Optimisme makin bertambah dengan adanya UU Cipta Kerja yang diyakini mampu memperlancar perekonomian pasca Covid-19 yang diharapkan mampu memangkas birokrasi perizinan dan kepastian pengadaan lahan.

Kinerja Perseroan Tahun 2020 Kebijakan Strategis

Perseroan tetap fokus untuk mengembangkan kawasan Perumahan Parkville Serpong, yaitu daerah Gunung Sindur – Bogor. Perseroan terus memperluas lahan proyek dalam pembangunan cluster-cluster baru. Segmentasi pasar yang dibidik adalah kalangan menengah, terutama menargetkan pada konsumen “end-user” yang sedang mencari rumah pertama mereka.

Di Tahun 2020, adanya Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap Sektor Properti. Dalam keadaan tersebut, Perseroan menerapkan terobosan baru dalam peningkatan pemasaran atau penjualan serta untuk mempertahankan kinerja perseroan. Perseroan menerapkan beberapa strategi pemasaran diantaranya, meningkatkan layanan berbasis teknologi, seperti Whatsapp Blast, peluncuran produk via online melalui aplikasi video, pemilihan unit via online, juga memberikan informasi proses konstruksi terkini. Kebijakan Perseroan dengan berfokus pada pemasaran melalui media digital.

Pandemi juga sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat, untuk dapat tetap mencetak angka penjualan, Perseroan terus menjalankan berbagai upaya untuk menarik perhatian pasar. Beberapa upaya yang dijalankan yaitu meningkatkan kreatifitas dalam berpromosi dan menstimulasi pasar dengan gimmick-gimmick tambahan.

Kantor marketing tetap beroperasi dengan jam operasional mengikuti anjuran Pemerintah dan mengantisipasi kedatangan konsumen dengan tetap memperhatikan Prosedur Kesehatan. Perseroan juga fokus terhadap kesehatan karyawan dengan rutin melaksanakan protocol kesehatan agar mengantisipasi penyebaran virus semakin meluas yang tentunya akan memberikan efek kepada kinerja Perseroan.

Optimism is increasing with the existence of the Job Creation Law, which is believed to be able to accelerate the post-Covid-19 economy, which is expected to reduce the licensing bureaucracy and ensure land acquisition.

Company Performance in 2020 Strategic Policy

The company remains focused on developing the Parkville Serpong Housing area, namely the Gunung Sindur area - Bogor. The Company continues to expand the project area in the construction of new clusters. The targeted market segmentation is the middle class, especially targeting “end-user” consumers who are looking for their first home.

In 2020, the COVID-19 Pandemic had a negative impact on the Property Sector. In these circumstances, the Company implemented new breakthroughs in increasing marketing or sales as well as to maintain the company's performance. The Company implemented several marketing strategies including, improving technology-based services, such as Whatsapp Blast, product launches via online via video applications, unit selection via online, as well as providing up-to-date construction process information. The Company's policy is to focus on marketing through digital media.

The pandemic has also greatly impacted people's purchasing power, to be able to continue to print sales figures, the Company continues to carry out various efforts to attract market attention. Some of the efforts carried out are increasing creativity in promotion and stimulating the market with additional gimmicks.

The marketing office continues to operate with operating hours following the Government's recommendations and anticipating the arrival of consumers while still paying attention to Health Procedures. The Company also focuses on employee health by routinely implementing health protocols in order to anticipate the wider spread of the virus which will certainly have an effect on the Company's performance.

Pencapaian 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan berkomitmen tetap solid meskipun di tengah kondisi pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari keberhasilan Perseroan yang memasarkan unit cluster baru dari kawasan Parkville Serpong yang dinamakan "Cluster Astoria" hingga terjual sebanyak 63 persen. Dengan angka ini, Perseroan dapat melangkah maju dalam hal pembangunan unit tersebut.

Perseroan juga tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan cluster pertama dari kawasan Parkville Serpong, yakni Cluster Canola yang sudah terjual sebanyak 88 persen yang kemudian dilanjutkan dengan mulai melakukan Serah Terima terhadap unit-unit tersedia secara bertahap.

Meski di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, Perseroan berhasil meminimalisir dampak sosial dari Pandemi ini dengan terus mempekerjakan

Secara garis besar, di tahun 2020 Perseroan bersyukur dapat menjalankan roda usaha dengan stabil, meski banyak rintangan yang dilalui selama pandemi COVID-19 ini.

Kendala yang Dihadapi

Ketidakpastian kapan berakhirnya Pandemi menjadi kendala dan tantangan terbesar yang dihadapi Perseroan. Pelemahan sektor properti merupakan salah satu yang terdalam di antara sektor-sektor lainnya. Sebagai sektor tersier, sektor properti sangat terdampak dengan adanya pelemahan ekonomi yang terjadi karena adanya wabah tersebut. Hal ini juga menjadi faktor menurunnya daya beli masyarakat dalam sektor properti, karena lebih mengutamakan kebutuhan Primer. Di sisi tenaga kerja, tingkat pengangguran di hampir seluruh negara maju diprediksi melonjak.

Sebagai bentuk upaya untuk mengatasi kendala tersebut Perseroan, memutuskan untuk melakukan korporasi yaitu melakukan penawaran umum di pasar modal.

2020 Achievement

Throughout 2020, the Company is committed to remaining solid even during the weakening economy due to the COVID-19 pandemic. This can be seen from the success of the Company in marketing a new cluster unit from the Parkville Serpong area called "Cluster Astoria" which sold 63 percent. With this figure, the Company can move forward in terms of building the unit.

The company also remains committed to continuing the construction of the first cluster from the Parkville Serpong area, namely the Canola Cluster which has been sold for 88 percent, which is then continued by starting to carry out the handover of available units in stages.

Even in the midst of rampant layoffs (PHK) in Indonesia, the Company managed to minimize the social impact of this Pandemic by continuing to employ existing employees.

Generally, in 2020 the Company is grateful to be able to run its business stably, despite the many obstacles that have been passed during this COVID-19 pandemic.

Obstacles of Encountered

Uncertainty when the Pandemic will end is the biggest obstacle and challenge faced by the Company. The weakening of the property sector was one of the deepest among other sectors. As a tertiary sector, the property sector is greatly affected by the economic downturn that occurred due to the outbreak. This is also a factor in the decline in people's purchasing power in the property sector, because they prioritize primary needs. On the labor side, the unemployment rate in almost all developed countries is predicted to soar.

As a form of effort to overcome these obstacles, the Company decided to conduct a corporation, namely conducting a public offering in the capital market.

Prospek Usaha

COVID-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pasokan maupun permintaan perumahan. Tingkat pengaruh COVID-19 terhadap sektor properti berbeda antara satu kota ke kota lain, tergantung pada besarnya skala pasar properti yang ada dan tingkat penyebaran COVID-19 di masing-masing kota. Dampak negatifnya sangat terasa di pasar properti Jabodetabek. Permulaan yang baik sebenarnya terlihat pada dua bulan pertama 2020, namun setelah pandemi merebak sejak Maret, disusul pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama beberapa bulan di Jakarta, permintaan di hampir semua sub sektor properti terjun bebas.

Meski demikian, nafas lega bagi pelaku properti di bidang Landed-housing adalah kebutuhan papan di Indonesia masih sangat luas. Pada dasarnya, kebutuhan rumah pertama di Indonesia masih sangat banyak dan faktor ketersediaan lahan tapak untuk perumahan di Ibukota Jakarta sudah semakin menipis hal ini tentunya memberi peluang besar bagi Perseroan yang sedang mengembangkan perumahan di daerah perbatasan lingkaran luar BSD Serpong, yaitu daerah Gunung Sindur – Bogor. Dengan faktor kedekatannya dengan ibu kota dan kemudahan akses menambah poin bagi Perseroan dalam menggarap prospek usahanya.

Perseroan berharap bahwa pada tahun 2021, perekonomian nasional akan berangsur membaik, yang terlihat dari upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi.

Adanya stimulus perbankan juga membantu perkembangan pasar properti, beberapa program sistem KPR juga dinilai sangat membantu untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah tapak. Dengan kompetensi serta portofolio bisnis yang dimiliki, Direksi yakin Perseroan bisa melakukan penetrasi pasar.

Business Prospect

COVID-19 has had a significant impact on both housing supply and demand. The level of impact of COVID-19 on the property sector varies from city to city, depending on the size of the existing property market and the level of spread of COVID-19 in each city. The negative impact is felt in the Jabodetabek property market. A good start was actually seen in the first two months of 2020, but after the pandemic broke out in March, followed by large-scale social restrictions (PSBB) for several months in Jakarta, demand in almost all property sub-sectors plunged.

However, a sigh of relief for property players in the landed-housing sector is that the need for boards in Indonesia is still very broad. Basically, the need for the first house in Indonesia is still very large and the availability of land for housing in the capital city of Jakarta is getting thinner, this certainly provides a great opportunity for the Company which is developing housing in the border area of the outer ring of BSD Serpong, namely the Gunung Sindur area - Bogor. Due to its proximity to the capital city and ease of access, the Company adds points in working on its business prospects.

In 2021, The Company, the national economy will gradually improve, as can be seen from the government's efforts to overcome the pandemic.

The existence of a banking stimulus also helps the development of the property market, several mortgage system programs are also considered very helpful in increasing people's purchasing power for landed houses. With the competence and business portfolio owned, the Board of Directors believes that the Company can penetrate the market.

Untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di ranah nasional, regional maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah bagian dari komitmen Grand Development untuk mendorong terwujudnya entitas yang kokoh dan independen. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran

Apresiasi dan Penutup

Menutup Laporan Direksi pada Annual Report ini, Direksi mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas berbagai masukan yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan Perseroan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Grand Development atas kerja keras dan kerja sama dan dedikasi selama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan lainnya, serta para mitra bisnis yang telah memberikan dukungan.

Dengan komitmen yang teguh dari semua yang terlibat di Perseroan, Direksi yakin masa depan Perseroan akan gemilang.

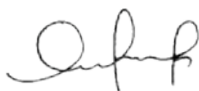
To be able to create a company that is trusted by stakeholders, has excellent performance, and grows sustainably, the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity is very much needed. By adhering to this commitment, the Company always follows the development of best governance practices applicable in the national, regional and international spheres that are relevant and in accordance with their needs. This is part of Grand Development's commitment to encourage the establishment of a strong and independent entity. The implementation of good corporate governance is carried out with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Appreciation and Closing

Closing the Board of Directors' Report in this Annual Report, the Board of Directors would like to thank the Shareholders for the various inputs that are very useful for the management of the Company. The Board of Directors would also like to thank all Grand Development employees for their hard work and cooperation and dedication so far. We also thank other stakeholders, as well as business partners who have provided support.

With the unwavering commitment of all involved in the Company, the Board of Directors believes that the future of the Company will be bright.

Tangerang, 30 Juni 2021



Velliana Tanaya
Direktur Utama
President Director

Halaman ini sengaja dikosongkan



Profil Perusahaan

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan Company Name	PT. GRAND HOUSE MULIA, Tbk	
Alamat Kantor Office Address	Management Office Jalan Raya Pengasinan No. 99 RT 005/RW 003, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor – Jawa Barat Website : www.granddevelopment.id Telp : 021-538-9788 / 021-7587-1688 Email : corsec@granddevelopment.id	
Tanggal Pendirian Date of Establishment	09 Januari 2006 January 09, 2006	
Bidang Usaha Lines of Business	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Hotel Bintang Tiga Real estate owned or leased and three star hotel	
Akta Pendirian Date of Establishment	Akta No. 01 Tahun 2006, dibuat dihadapan Ny. Suryati Moerwibowo, S.H – Notaris di Jakarta Selatan (Notaris Deed No 01 of 2006, made before Mrs. Suryati Moerwibowo S.H – Notary in South of Jakarta)	
Modal Dasar Authorized Capital	Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) Rp. 250.000.000.000,- (two hundred fifty billion rupiah)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital	Rp 78.750.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rp 78.750.000.000,- (seventy eight billion seven hundred and fifty million rupiah)	
Tanggal Pencatatan Saham Listing Date	10 September 2020 Sept 10, 2020	
Diperdagangkan Trade on	Bursa Efek Indonesia Indonesian Stock Exchange	
Kode Saham Stock Code	HOMI	
Jumlah Saham yang Diterbitkan Total Shares Issued	-	
Jumlah Saham yang Beredar Total Shares Outstanding	-	
Kepemilikan Saham Shares Ownership	PT. Graha Mulia Indotama 52.00% Tan Ping 12.00% Suryadi 8.00% Velliana Tanaya 4.00% Willy 4.00% Masyarakat 20.00%	

Sekilas Perusahaan Company in Brief

Perseroan didirikan dengan nama PT GRAND HOUSE MULIA, Tbk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 09 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Suryati Moerwibowo, S.H, Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-05124.AH.01.01. TAHUN 2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007718.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 (**"Akta Pendirian"**).

PT GRAND HOUSE MULIA, Tbk adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang Pembangunan dan jasa. Pada bulan September 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham HOMI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 157.500.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp380,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 September 2020.

Saat ini, PT GRAND HOUSE MULIA, Tbk menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau disewa dan Hotel Bintang Tiga.

Proyek utama yang ditangani Perseroan saat ini adalah Parkville Serpong, berada di wilayah Kabupaten Bogor. Per tanggal 31 Desember 2020, proyek Parkville Serpong berhasil melakukan penjualan hingga 278 unit di cluster Canola, Astoria dan Valencia.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company was established under the name of PT GRAND HOUSE MULIA, Tbk based on the Deed of Establishment of the Company No. 46 dated December 13, 2012 made before Mr. Udin Narsudin, S.H, Notary in South Tangerang. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with the Decree No. AHU-38043.AH.01.01 of 2013, dated July 12, 2013 and has been registered in the List of Companies under No. AHU-0066669.AH.01.09 of 2013, dated July 12, 2013 (**"Deed of Establishment"**).

PT GRAND HOUSE MULIA, Tbk, is a public company engaging in the business of property development and services. In September 2020, the Company obtained an effective statement from the Financial Services Authority (FSA) to conduct an Initial Public Offering of LANDs (IPOs) of 157.500.000 shares with a nominal value of Rp100 per share at an offering price of Rp380 per share. These shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on Sept 10, 2020.

Currently, PT GRAND HOUSE MULIA, Tbk engages in Real Estate Owned or Leased and Three Star Hotel.

The Company's main projects currently are the Canary Apartments and Parkland Avenue apartments, both of which are situated in South Tangerang. As of December 31, 2020, The Parkville Serpong managed to sell until 278 units in the Canola, Astoria and Valencia clusters.

Based on the Company's Deed of Establishment, the capital structure and composition of the Company's shareholders are as follows:

Keterangan Note	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per saham Per Value Rp 1.000.000 per share		%
	Jumlah Lembar Saham Number of Share	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Per Value	
Modal Dasar Authorized Capital	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-in Capital			
Tan Ping	70	70.000.000	70
Imam Sugianto	30	30.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Total Issued and Paid-in Capital	100	100.000.000	100
Jumlah Saham Portepel	0	0,-	-

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar, PT. Grand House Mulia, akta No. 01 tanggal 04 Januari 2008 dibuat di hadapan Ny. Suryati Moerwibowo, S.H, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05124. AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, serta telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. 0007718. AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 31 Januari 2008, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 0007718. AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 31 Januari 2008. Akta tersebut tentang Pendirian Perseroan.
2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, PT. Grand House Mulia, akta No. 47 tanggal 16 Nopember 2016 dibuat di hadapan Dr. Udin Narsudin S.H, M.Hum Notaris di Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022107.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 November 2016, serta telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum

The Articles of Association of the Company have subsequently undergone several changes as contained in the deeds as stated below:

1. Based on the Deed of Amendment to the Articles of Association, PT. Grand House Mulia, deed No. 01 dated January 04, 2008 made in the presence of Mrs. Suryati Moerwibowo, S.H, Notary in South Jakarta Municipality. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-05124. AH.01.01. Year 2008 dated January 31, 2008, and has been notified and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Acceptance of Notification No. 0007718. AH.01.09.YEAR 2008 dated January 31, 2008, and has been registered in the Company Register No. 0007718. AH.01.09.YEAR 2008 dated January 31, 2008. The deed is regarding the establishment of the Company.
2. Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, PT. Grand House Mulia, deed No. 47 dated November 16, 2016 made in the presence of Dr. Udin Narsudin S.H, M.Hum Notary in South Tangerang. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0022107.AH.01.02.Tahun 2016 dated November 23, 2016, and has been notified and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Acceptance of

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0101475 tanggal 23 November 2016, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139679.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 November 2016. Akta tersebut merubah terkait pengalihan/hibah saham, perubahan susunan direksi dan komisaris dalam perseroan, serta perubahan tempat kedudukan perusahaan.

3. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, PT. Grand House Mulia, akta No. 51 tanggal 19 Maret 2018 dibuat di hadapan Dr. Udin Narsudin S.H, M.Hum Notaris di Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006906.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, serta telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0125917 tanggal 27 Maret 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0043302. AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018. Akta tersebut merubah Pasal 4 terkait peningkatan modal dasar.
4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, PT. Grand House Mulia, akta No. 10 tanggal 11 November 2019 dibuat di hadapan Raden Adrianto S.H, Notaris di Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093138.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 12 November 2019, serta telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0358348 tanggal 12 November 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216686. AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 November 2019. Akta tersebut

Notification No. AHU-AH.01.03-0101475 dated November 23, 2016, and has been registered in the Company Register No. AHU-0139679.AH.01.11.Tahun 2016 dated November 23, 2016. The deed is amended regarding the transfer/grant of shares, changes in the composition of directors and commissioners in the company, as well as changes in the domicile of the company.

3. Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, PT. Grand House Mulia, deed No. 51 dated 19 March 2018 made in the presence of Dr. Udin Narsudin S.H, M.Hum Notary in South Tangerang. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0006906.AH.01.02 Tahun 2018 dated 27 March 2018, and has been notified and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification No. AHU-AH.01.03-0125917 dated 27 March 2018, and has been registered in the Company Register AHU-0043302. AH.01.11.TAHUN 2018 dated 27 March 2018. The deed amends Article 4 regarding the increase in authorized capital.
4. Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, PT. Grand House Mulia, deed No. 10 dated 11 November 2019 made before Raden Adrianto S.H, Notary in South Tangerang. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0093138.AH.01.02 Year 2019 dated November 12, 2019, and has been notified and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Acceptance of Notification No. AHU-AH.01.03-0358348 dated November 12, 2019, and has been registered in the Company Register No. AHU-0216686. AH.01.11.TAHUN 2019 dated November 12, 2019. The deed amends Article 3

merubah Pasal 3 terkait anggaran dasar perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 116 tanggal 21 Februari 2020 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016135.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Februari 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU.0037427.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020. Akta tersebut memutuskan:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Persetujuan Perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Grand House Mulia, Tbk;
- c. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- d. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal,

regarding the company's articles of association regarding the Purpose and Objectives and business activities to be adjusted to the standard classification of business fields.

5. Based on the Deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 116 dated February 21, 2020 made before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in the City of West Jakarta Administration. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0016135.AH.01.02.TAHUN 2020 dated February 24, 2020 and has been registered in the Company Register No. AHU.0037427.AH.01.11. Year 2020 dated February 24, 2020. The deed stipulates:

- a. Approved the Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public ("Public Offering") and list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange;
- b. Approval to change the status of the Company from a Closed Company to a Public Company and approve the change of the Company's name to PT Grand House Mulia, Tbk;
- c. Approved to issue shares in the Company's savings/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the said portfolio through a Public Offering to the public in the amount of a maximum of 157,500,000 (one hundred fifty seven million five hundred thousand) new shares with a nominal value of each -each share amounting to Rp100.00 (one hundred Rupiah), taking into account the prevailing laws and regulations including the prevailing Capital Market and Stock Exchange Regulations in Indonesia; In connection with this decision, the shareholders of the Company hereby agree and declare to waive their rights to pre-purchase the offer or sale of new shares in the context of a Public Offering to the public through the Capital Market mentioned above;
- d. Approved to list all of the Company's shares, after the Public Offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of

serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

- e. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Tuan Velliana Tanaya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (03-7-1983), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jl. Kelapa Sawit XIV BG. 13/11, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603284307830003;

Wakil Direktur Utama:

Tuan Suryadi, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima (23-01-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kp. Jelupang Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674022301850003;

the Company on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing), and agree to register the Company's shares in Collective Custody which is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in the Indonesian Capital Market sector;

- e. Approved changes in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely respectfully dismissing all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, by granting release and discharge (*acquit et decharge*) during their tenure, and appointing new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as since the closing of this Meeting, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Directors:

President Director: Mrs. Velliana Tanaya, born in Jakarta, on 03 July 1983, private, Indonesian citizen, residing in Tangerang City, Jl. Kelapa Sawit XIV BG. 13/11, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Identity Card Number 3603284307830003;

Vice President Director:

Mr. SURYADI, born in Jakarta, on 23 January 1985, private, Indonesian citizen, residing in South Tangerang City, Kampung Jelupang, RT 004, RW003, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Identity Card number 3674022301850003;

Direktur:

Tuan Rio Handono, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima (29-06-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Taman Asri C. 6/13, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671132906850001;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Tuan TAN PING, lahir di Fujian, pada tanggal dua belas Komisaris Utama April seribu sembilan ratus lima puluh tiga (12-4-1953), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung Jelupang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674021204530004;

Komisaris Independen: Tuan MARIANO HALILINTAR, lahir di Jakarta, pada tanggal enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (6-3-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Seha nomor 10-D, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050603730011.

- f. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan

Director:

Mr. Rio Handono, born in Jakarta, on 29 Juni 1985, private, Indonesian citizen, residing in Tangerang City, Jalan Taman Asri C. 6/13, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan Kota Tangerang, Identity Card Number 3671132906850001;

President Commissioner:

Mr. TAN PING, born in Fujian, April 12, 1953, private, Indonesian citizen, domicile in South Tangerang, Kampung Jelupang, RT 004, RW 003, Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Identity Card number: 3674021204530004;

Independent Commissioner:

Mr. MARIANO HALILINTAR, born in Jakarta, March 6, 1973 (6-3-1973), private, Indonesian citizens, domicile in South Jakarta, Jalan Seha No. 10-D, RT 006, RW 010, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Identity Card number 3174050603730011.

- f. Approval of Amendment to the Company's Articles of Association, in accordance with the provisions of Bapepam LK Regulation Number IX.J.1 on Principles of the Company's Articles of Association that Conduct Public Offering of Equity-Type Securities and Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners, including changing the purpose and objectives and business activities of the Company so as to reflect

adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;

- g. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperlihatkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal
 - mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - hal-hal lain yang berkaitan;
- h. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum dan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 127 tanggal 19 Agustus 2020 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057136.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan telah terdaftar

the core and the supporting business activities of the Company;

- g. Granting power to the Board of Directors of the Company, with the rights of substitution, to do all and every action necessary in connection with the Public Offering on the Capital Market, including but not limited to:
 - to determine the Offer Price for the shares to be offered in the Public Offering;
 - to determine the use of funds for funds obtained through Public Offerings;
 - to list the Company's shares which are shares that have been issued and fully paid on the Indonesia Stock Exchange by showing the applicable rules and regulations in the Capital Market sector
 - registering shares in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the prevailing rules and regulations in this regard;
 - other related matters

- i. Granted power of attorney to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of new shares issued in the context of the Public Offering and the amount of increase in the issued and paid-up capital of the Company after the Public Offering is completed and after the shares are issued. the shares are listed on the Indonesia Stock Exchange and the names of the shareholders resulting from the Public Offering have been registered in the Register of Shareholders;

6. Based on the Deed of Decision of the Shareholders of the Company No. 127 dated 19 August 2020 made before Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notary in West Jakarta Administrative City, the deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0057136.AH.01.02.year 2020 dated August

dalam Daftar Perseroan No. AHU.0136671.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020. Akta tersebut memutuskan:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan ("penawaran umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perusahaan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. GRAND HOUSE MULIA, Tbk
- III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portopel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (Seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- IV. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- V. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang

19, 2020 and has been registered in the Company Register No. AHU.0136671.AH.01.11. year 2020 dated 19 August 2020. The deed stipulates:

- I. Approved the Company's plan to conduct ("public offering") and list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange;
- II. Approved the change of the Company's status from a Closed Company to a Public Company and approved the change of the Company's name to PT. GRAND HOUSE MULIA, Tbk
- III. Approved to issue shares in the Company's savings/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering to the public in the amount of a maximum of 157,500,000 (one hundred fifty seven million five hundred thousand) new shares with a nominal value of each -each share amounting to Rp 100.00 (One Hundred Rupiah), taking into account the prevailing laws and regulations including the Capital Market and Stock Exchange Regulations in Indonesia in force at the place where the Company's shares are listed;
- In connection with the decision, the shareholders of the Company hereby agree and declare to waive their rights to pre-purchase the offer or sale of new shares in the context of a Public Offering to the public through the Capital Market as mentioned above;
- IV. Approved to list all of the Company's shares, after the Public Offering of the shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by the current shareholders (other than public shareholders) of the Company on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing)), and agree to register the Company's shares in Collective Custody which is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in the Indonesian Capital Market sector;
- V. Approved the Amendment to the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Bapepam LK Regulation Number IX.J.1 concerning the Principles of the Articles of Association of Companies

Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perusahaan;

VI. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas :

- a. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- b. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
- c. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Hal-hal lain yang berkaitan;

VII. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada Bursa efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners, including changing the aims and objectives and business activities of the Company so as to reflect the existence of the Company's main business activities and supporting business activities;

VI. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company, with substitution rights to take all and any necessary actions in connection with the Public Offering of shares to the public through the Capital Market, including but not limited to:

- a. To determine the Offer Price for the shares to be offered in the Public Offering;
- b. To determine the use of funds for funds obtained through a Public Offering;
- c. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Other related matters

VII. Granted power to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the context of the implementation of the Public Offering, as well as to state the composition of the Company's shareholders in the deed, after the Public Offering is completed and the issuance of the shares is listed on the Indonesia Stock Exchange and the names of the shareholders resulting from the Public Offering have been recorded in the Register of Shareholders.

VISI & MISI

VISION & MISSION

Visi

Vision

- | | |
|--|---|
| 1. Menjadi pengembang properti unggul dan terpercaya yang dapat memberikan value bagi masyarakat | 1. Become a superior and trusted property developer that can provide value to the community |
| 2. Menjadi pengembang properti yang dapat menciptakan produk properti yang affordable | 2. Become a property developer that can create affordable property product. |
| 3. Menjadi pengembang properti yang innovative dalam konsep green living | 3. Become an innovative property developer in the green living concept |
| 4. Menjadi pengembang properti yang berguna dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia | 4. Become a property developer that is useful in improving the quality of human life |

Misi

Mission

- | | |
|--|---|
| 1. Mengembangkan Produk properti yang inovatif dengan harga yang terjangkau | 1. Develop innovative property products at affordable prices |
| 2. Menciptakan hunian yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan papan | 2. Creating a quality shelter that can meet the needs of the board |
| 3. Bersama pemerintahan setempat dalam membangun area kota yang belum berkembang | 3. Together with local government in developing undeveloped urban areas |
| 4. Memberi dampak positif bagi komunitas dan lingkungan sekitar | 4. Provide a positive impact on the community and the environment |

Kegiatan dan Bidang Usaha

Corporate Activities and line of Business

Kegiatan operasional yang terintegrasi mendorong stabilitas Perseroan dalam mewujudkan kelancaran bisnis. Seluruh elemen utama yang memiliki fondasi kuat menjadi kekuatan utama Perseroan memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pelanggan dalam melakukan kegiatan bisnis.

PT Grand House Mulia, Tbk mengunggulkan SDM yang berkualitas tinggi sebagai pusat kekuatan perputaran Perseroan dalam melakukan kegiatan bisnis. Industri properti menegaskan pemenuhan standardisasi dalam melakukan kegiatan produksi, sehingga investasi terus dilakukan Perseroan demi menjaga konsistensi. Pengontrolan yang berkesinambungan merupakan tolok ukur Perseroan dalam menjalankan setiap kegiatan operasional terutama dalam menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan agar dapat menjaga stabilitas yang akan menghasilkan jasa yang memenuhi standar kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan nilai tambah, Perseroan terus menjaga tenggat waktu setiap proyek agar proses kegiatan operasional terorganisir serta menghasilkan kualitas kinerja yang unggul. Dengan pengawasan yang sistematis, Perseroan terus berupaya untuk menyediakan para mitra bisnis produk dan jasa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang Pembangunan dan pemberian. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama :

1. Berusaha dalam bidang real estate pada umumnya, terutama tapi tidak terbatas pada bidang Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan dan pengoperasian real estate seperti bangunan apartemen, persewaan, dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan

Integrated operational activities encourage the Company's stability in realizing a smooth business. All of the main elements that have a strong foundation become the Company's main strength in meeting the needs and convenience of customers in conducting business activities.

PT Grand House Mulia, Tbk favors high quality human resources as the center of the Company's rotational strength in conducting business activities. The property industry emphasizes the fulfillment of standardization in carrying out production activities, so that the Company continues to make investments in order to maintain consistency. Continuous control is the Company's benchmark in carrying out every operational activity, especially in carrying out business in the field of development in order to maintain stability which will produce services that meet the standard criteria that have been set. As an embodiment of added value, the Company continues to maintain the deadlines for each project so that the operational process is organized and produces superior quality performance. With systematic supervision, the Company continues to strive to provide business partners with the best products and services to meet their needs.

The purpose and objective of the Company is to engage in development and delivery. To achieve the aims and objectives, the Company may carry out the following business activities:

Main business activities:

1. Doing business in the real estate sector in general, especially but not limited to the field of Real Estate that is owned or leased, which includes the business of buying, selling and operating real estate such as apartment buildings, rentals, and real estate operations both owned and rented . Division of real

lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah

2. Berusaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi pada umumnya, khususnya Hotel Bintang Tiga, yang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Menjalankan usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki proyek perumahan yang berlokasi di Gunung Sindur - Bogor, yang sedang dalam tahap pembangunan terbagi menjadi cluster-cluster perumahan bernama "Canola, Astoria dan Valencia". Perseroan memiliki tanah yang siap untuk dibangun proyek perumahan dengan total luasan kurang lebih 6 Ha (enam hektar).

estate into plots without land development and operation of residential areas for movable houses

2. Business in the field of providing accommodation in general, especially three-star hotels, which includes the business of providing lodging services, eating and drinking and other services for the public by using part or all of the building. This business is managed commercially and meets the requirements as a three-star hotel as stipulated in the decree of the agency that fosters it.

Supporting Business Activities:

Running other businesses related to and supporting the Company's main business activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Company has a housing project located in Gunung Sindur - Bogor, which is in the construction stage divided into housing clusters named "Canola, Astoria and Valencia". The Company owns land that is ready for housing projects with a total area of approx 6 Ha (six hectares).

PROFIL DEWAN KOMISARIS PROFILE OF BOARD OF COMMISSIONERS



TAN PING **Komisaris Utama**

Meraih gelar Sarjana jurusan Sastra Ekonomi China dari Fujian Shi Fan University China.

Menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai komisaris untuk Baros Chicken Egglayer Farm sejak tahun 2003 dan komisaris untuk Scorpio Poultry Farm sejak tahun 1986. Saat ini juga menduduki posisi komisaris di PT Grand House Mulia, PT. Tridaya Bangun Cipta, PT. Graha Mulia Indotama dan PT Berkat Indotama Gemilang.

President Commissioner

He holds a Bachelor's degree in Chinese Economic Literature from Fujian Shi Fan University in China.

Served as commissioner of the Company since 2012. Currently also serves as commissioner for Baros Chicken Egglayer Farm since 2003 and commissioner for the Scorpio Poultry Farm since 1986. He also hold position for commissioner in PT Grand House Mulia, PT. Tridaya Bangun Cipta, PT. Graha Mulia Indotama and PT Berkat Indotama Gemilang.



Mariano Halilintar **Komisaris Independen**

Meraih Bachelor of Science jurusan Akuntansi dari Woodbury University, Burbank, California, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 17 Mei 2018.

Sebelumnya pernah bekerja di PT OSO International Jakarta sebagai Chief Executive Officer sejak tahun 2012-2015, Ibris Holdings & Investment/Risjadson Holdings & Investment sejak tahun 2010-2012, Ernst & Young Transaction Advisory Service sebagai Director, Corporate Finance & Advisory sejak tahun 2009-2010, sebagai Independent Financial Adviser sejak tahun 2006-2009, PricewaterhouseCoopers Advisory sebagai Senior Manager, Advisory sejak tahun 2004-2006, Investment Banking Trimegah Securities sebagai Senior Manager sejak tahun 2003-2004, Morgan Stanley New York sebagai Analyst, Investment Consulting Group sejak tahun 2001-2003 dan sebagai Financial Advisor sejak tahun 1998-2001.

Independent Commissioner

He holds a Bachelor of Science majoring in Accounting from Woodbury University, Burbank, California, United States in 1996.

Served as Independent Commissioner of the Company since May 17, 2018.

Previously he worked at PT OSO International Jakarta as Chief Executive Officer since 2012-2015, Ibris Holdings & Investment / Risjadson Holdings & Investment since 2010-2012, Ernst & Young Transaction Advisory Service as Director, Corporate Finance & Advisory since 2009- 2010, as an Independent Financial Adviser from 2006-2009, PricewaterhouseCoopers Advisory as a Senior Manager, Advisory from 2004- 2006, Trimegah Securities Investment Banking as a Senior Manager since 2003-2004, Morgan Stanley New York as Analyst, Investment Consulting Group since 2001-2003 and as Financial Advisor since 1998- 2001.

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS



VELLIANA TANAYA

DIREKTUR UTAMA

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2006 dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009, kemudian meraih Doktorial Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2017.

Saat ini bekerja dan menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Grand House Mulia, Tbk dan pada tahun 2010 bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan

PRESIDENT DIRECTORS

He holds a Bachelor's degree in Faculty of Law from Pelita Harapan University in 2006 , holds a Master of Law degree from Faculty of Law from Pelita Harapan University in 2006, and then get Doctor of Law from Pelita Harapan University in 2017.

Currently working and serving as President Director of PT. Grand House Mulia, Tbk and in 2010 worked as a Lecturer in the Faculty of Law at Pelita Harapan University



SURYADI
WAKIL DIREKTUR UTAMA

Meraih gelar Sarjana jurusan Business Marketing dari University Technology of Sydney, Australia dan meraih Diploma jurusan International Business & Trade dari Insearch UTS, Australia.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2014. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Direktur Utama untuk PT Grand Indomining sejak tahun 2012-2014, Wealth Management Banker untuk Standard Chartered Bank, Indonesia sejak tahun 2009-2012 dan International Business Manager untuk Alibaba Group, Beijing, China sejak tahun 2007-2009. Saat ini juga menjabat sebagai direktur di PT. Grand House Mulia, PT. Tridaya Bangun Cipta, dan PT. Graha Mulia Indotama, serta sebagai Komisaris di PT Berkat Indotama Gemilang.

Vice President Director

He holds a Bachelor's degree in Business Marketing from University Technology of Sydney, Australia and holds a Diploma in International Business & Trade from UTS Insearch, Australia.

Served as President Director of the Company since 2014. Previously he worked as Managing Director for PT Grand Indomining since 2012-2014, Wealth Management Banker for Standard Chartered Bank, Indonesia since 2009-2012 and International Business Manager for Alibaba Group, Beijing, China since 2007-2009.

Currently also hold position as director in PT. Grand House Mulia, PT. Tridaya Bangun Cipta, dan PT. Graha Mulia Indotama, as well hold position as Commissioner in PT Berkat Indotama Gemilang.



RIO HANDONO DIREKTUR

Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akunting dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2009. Kemudian memperoleh Magister Akunting Jurusan Perpajakan Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2013

Saat ini bekerja dan menjabat sebagai Komite Audit di PT. Trimitra Propertindo, Tbk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bekerja sebagai Deputy CFO di PT. Buntolo Giri Mas. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014 bekerja sebagai Manager Akunting dan Tax di PT. Citra Putra Mandiri. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bekerja sebagai Accounting & Tax Spv di PT. Transmarco.

RIO HANDONO DIREKTUR

Get a Bachelor of Economics degree majoring in Accounting from Trisakti University, Jakarta in 2009. Then obtained a Masters in Accounting Department of Taxation, Trisakti University, Jakarta in 2013.

Currently working and serving as the Audit Committee at PT. Trimitra Propertindo, Tbk from 2014 to 2017 worked as Deputy CFO at PT. Buntolo Giri Mas. From 2011 to 2014 he worked as Accounting and Tax Manager at PT. Citra Putra Mandiri. From 2009 to 2011 worked as Accounting & Tax Spv at PT. Transmarco.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



The Best Thematic Housing in Serpong 2019
“ Home Of a Thousand Flower”

SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDMnya melalui peningkatan kemampuan karyawan dan pelayanan kesejahteraan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 10 orang karyawan tetap. Perseroan mempekerjakan karyawan kontrak sebanyak 20 karyawan kontrak, dan seluruh karyawan Perseroan merupakan WNI karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Desember 2020.

The Company realizes that human resources play a very important role in the success of the Company in carrying out its business. Therefore, the Company always pays attention to the development and quality of its human resources through improving employee capabilities and welfare services.

As of December 31, 2020, the Company has 10 permanent employees. The Company employed 20 contract employees, and all of its employees are Indonesian citizen since the Company does not employ foreign workers.

Employee Composition

The following is a description of the composition of employees as of December 31, 2020

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan Description	31 Desember Desember 31	31 Desember Desember 31
	2020	2019
Direktur/Director	3	1
Manager	3	3
Supervisor	3	3
Staf/Staff	21	12
Jumlah/Total	30	19

Employee Composition by Position

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan Description	31 Desember Desember 31	31 Desember Desember 31
	2020	2019
>S-1	2	2
S-1	17	9
Diploma/Bachelor	3	3
SMA/Senior High School	8	5
SMP/Junior High School		
SD/Elementary School		
Jumlah/Total	30	19

Employee Composition by Education

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan Description	31 Desember Desember 31	31 Desember Desember 31
	2020	2019
Karyawan Tetap/Permanent Employees	10	10
Karyawan Kontrak/Contract Employees	20	9
Jumlah/Total	30	19

Employee Composition by Work Status

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia**Employee Composition by Age**

Keterangan Description	31 Desember Desember 31	31 Desember Desember 31
	2020	2019
>55tahun/>55 years	0	0
46 s/d 55 tahun/ 46 tp 55 years	2	2
31 s/d 40 tahun / 31 to 40 years	13	7
s/d 30 tahun / up to 30 years	15	10
Jumlah/Total	30	19

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja**Employee Composition by Location**

Keterangan Description	31 Desember Desember 31	31 Desember Desember 31
	2020	2019
Tangerang Selatan/South	20	-
Tangerang	10	19
Kab. Bogor		
Jumlah/Total	30	19

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

The Company does not employ workers with special expertise in their fields.

Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yaitu kewajiban Wajib Laport Ketenagakerjaan. Peraturan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

The Company has complied with the provisions of the laws and regulations in the field of manpower, namely the obligation to report Manpower. This regulation along, with other policies, is the basis that guarantee the rights and the obligations of the Company and employees in creating a harmonious working conditions and relationships between them, which ultimately can support the smoothness and progress of the business to achieve common goals.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sampai dengan tanggal Annual Report ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

The Company has no agreement to provide employees and management with share ownership, including agreement on share ownership program for employees or members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. Until the date of this Annual Report published, the Company does not have labor union formed by its employees. The Company does not have a Collective Labor Agreement between the Company and Company employees / trade unions.

Prinsip Pengembangan Potensu Karyawan**Employee's Competency Development Principle**

Pengembangan kompetensi karyawan di Perusahaan dilakukan secara proporsional dengan menekankan pada peningkatan dari sisi kemampuan teknis, manajerial dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Perseroan, antara lain peningkatan motivasi kerja atau

The Company's employee competency development is implemented in a proportional manner by emphasizing on the improvement of technical, managerial and other aspects related to Company's business activities, among others, the enhancement of work motivation or the introduction of laws and

pengenalan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang usaha Granddevelopment.

Perseroan menyusun program khusus manajemen talenta sebagai upaya tingkat lanjut pengelolaan SDM dan upaya Perusahaan dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Dalam hal ini Perusahaan melakukan pengamatan terhadap potensi yang dimiliki masing-masing karyawan dari program Management Trainee, dan mengevaluasi kinerja para karyawan tersebut. Karyawan yang berprestasi akan mendapatkan perlakuan khusus dan dipersiapkannya jenjang karir di bidang kerja yang sesuai dengan potensi karyawan tersebut.

Dalam proses persiapan tersebut Perusahaan melakukan beberapa upaya antara lain dengan mengikutsertakan karyawan dalam program:

- Advance Leadership Program (ALP) tingkat Manajer Proyek dan Kepala Seksi, dimulai dari identifikasi, seleksi kandidat, pengembangan hingga final exam.
- Individual Development Program (IDP), yang menekankan pada 3 (tiga) aspek, yaitu Knowledge, Skill, dan Attitude.

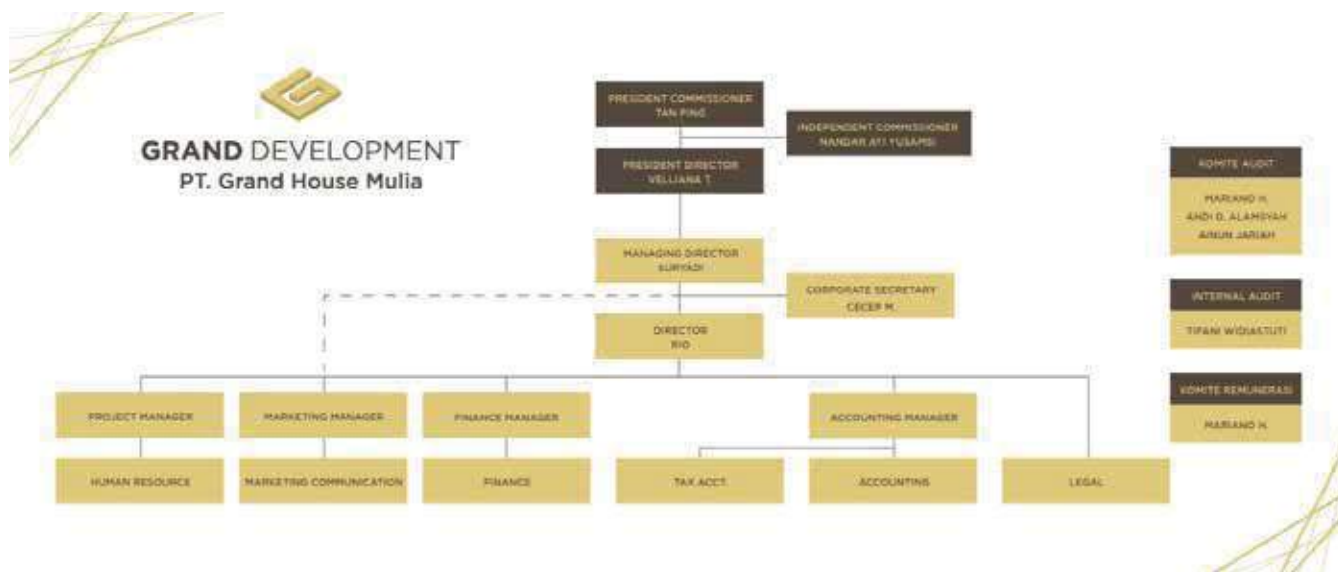
regulations relating to the business of Granddevelopment.

The Company organized a special talent management program as an advanced effort of Human Capital management and the Company's efforts in preparing for leadership regeneration. In this case, Company observes the potential of each Management Trainee program employees, and evaluates the performance. Employee with excellent achievement would obtain special treatment and have the career prepared in the appropriate work field.

In the preparation process, Company made numerous efforts by involving employees in the program:

- Advance Leadership Program (ALP) of Project Manager and Section Head level, starting from identification, selection of candidates, development to the final exam.
- Individual Development Program (IDP), which emphasizes on 3 (three) aspects, namely Knowledge, Skill and Attitude.

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE



Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Stock Exchange Listings

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak melakukan pencatatan efek lainnya di bursa efek baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Perusahaan tidak dapat menjabarkan informasi terkait pencatatan efek lainnya.

Throughout 2020, the Company did not have other stock exchange listings in IDX both inside and outside the country. Therefore, the Company could not make a grade of information related to other securities.

Daftar Komposisi Pemilik Efek List of Stock Ownership Composition

DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK EFEK
EMITEN: PT GRAND HOUSE MULIA, TBK.
Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Status Pemilik	Pemilikan dalam Standar Satuan Perdagangan			Pemilikan Tidak dalam Standar Satuan Perdagangan			Jumlah		
		Jml P.E	Jumlah Efek	% Kepemilikan	Jml. P.E	Jumlah Efek	% Kepemilikan	JmlP.E	Jumlah Efek	% Kepemilikan
	PEMODAL NASIONAL:									
1	Perorangan Indonesia	583	787.500.000	100.000%	0	0	0,000%	583	787.500.000	100.000%
2	Perseroan Terbatas	0	0	0.000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
3	Danareksa	0	0	0.000%	0	0	0,000%	3	0	0,000%
4	Asuransi	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
5	Yayasan	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
6	Koperasi	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
7	Lain-lain	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
	SUB TOTAL	583	787.500.000	100.000%	0	0	0,000%	583	787.500.000	100.000%
	PEMODAL ASING:									
1	Perorangan Asing	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
2	Badan Usaha Asing	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
3	Lain-lain	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
	SUB TOTAL	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%
	TOTAL	583	787.500.000	100,000%	0	0	0,000%	583	787.500.000	100,000%

LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS

EMITEN : PT Grand House Mulia, Tbk.
BAE : PT RAYA SAHAM REGISTRA
BULAN : 31 Desember 2020

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham	Persentase (%)
1.	Tan Ping	Komisaris Utama	94.500.000	12,00
2.	Mariano Halilintar	Komisaris Independen	0	0,00
3.	Velliana Tanaya	Direktur Utama	31.500.000	4,00
4.	Suryadi	Wakil Direktur Utama	63.000.000	8,00
5.	Rio Handono	Direktur	0	0,00

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
PT GRAND HOUSE MULIA, TBK.
Per Tanggal 31 Desember 2020

No	Nama	Jumlah Kepemilikan Saham	Presentase (%)
1.	PT Graha Mulia Indotama	409.500.000	52.00
2.	Tan Ping	94.500.000	12.00
3.	Suryadi	63.000.000	8.00
4.	Velliana Tanaya	31.500.000	4.00
5.	Willy	31.500.000	4.00
6.	Masyarakat	157.500.000	20.00
Total		787.500.000	100.00

Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada tabel di atas

A number of shareholders and the percentage of ownership as of the end of fiscal year in a basis of locals and foreign classifications could be seen on the aforementioned table.

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik : KAP Tjahjadi & Tamara
Gedung Jaya Lantai 4Jl. M.H.
Thamrin No. 12 Jakarta

Telp. : 021-31908550

Fax. : 021-31908502

STTD : STTD.AP-360/PM.22/2018
tertanggal 9 Februari 2018
a.n.Junarto Tjahjadi.

Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia

Pedoman Kerja : Standar Audit

Surat Penunjukkan : No. 018/JT/IV/18 tertanggal 2 April
2018

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah- jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

PUBLIC ACCOUNTANTS

Public Accountant : KAP Tjahjadi & Tamara
Gedung Jaya Lantai 4
Jl. M.H. Thamrin No. 12 Jakarta

Tel. : 021-31908550

Fax. : 021-31908502

STTD : STTD.AP-360 / PM.22 / 2018
dated 9 February 2018
a.n.Junarto Tjahjadi.

Association : Institute of Indonesian Public
Accountants

Work Guidelines : Audit Standards

Appointment Letter : No. 018 / JT / IV / 18 dated April
2, 2018

Main Duties and Obligations:

The main function of the Public Accountant in this Public Offering is to carry out audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Accountants. The standard requires that the Public Accountant plan and carry out an audit in order to obtain adequate confidence that the financial statements are free of material misstatement and are responsible for the opinions given to the audited financial statements. Audits conducted by Public Accountants include examining on the basis of testing evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management and evaluating the overall financial statement presentation. Public Accountants are responsible for opinions regarding the fairness of the Company's financial statements.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra
Alamat : Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl.
Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Telp. : (021) 2525666
Fax. : (021) 2525028
STTD : Kep-79/PM/1991 tertanggal
18 September 1991.Asosiasi
Biro Administrasi Efek
Indonesia (ABI) No.
ABI/IV/2011-004 tanggal 6
April 2011
Pedoman Kerja : UUPM dan peraturan
Pasar modal yang berlaku.
Surat Penunjukkan : 007/GHM/DIR/II/2020

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

Securities Administration Agency :
PT Raya Saham Registra
Address : Plaza Sentral Building 2 Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Tel. : (021) 2525666
Fax. : (021) 2525028
STTD : Kep-79 / PM / 1991 dated
September 18, 1991.
Association of Indonesian
Securities Administration (ABI)
No. ABI / IV / 2011-004 dated
April 6, 2011
Work Guideline : UUPM and applicable
capital market regulations.
Appointment Letter : 007/GHM/DIR/II/2020

The main duties and obligations of the Securities Administration Bureau ("Registrar") in accordance with the applicable Professional Standards and Capital Market Regulations include receipt of share orders in the form of a Share Purchase Order List ("DPPS") and Share Purchase Order Form ("FPPS") that has been equipped with documents as required in the stock purchase order and has been approved by the Underwriter as an order submitted for the allotment of shares as well as administering stock purchase orders in accordance with the application available at the Registrar. Together with the Underwriter, BAE has the right to refuse the order to purchase shares that do not meet the booking requirements by taking into account the applicable regulations. In the event of an order that exceeds the number of Shares Offered, the BAE carries out the share allotment process based on the allotment formula set by the Allotment Manager, prints out the FKPS and prepares the allotment report. The Registrar is also responsible for issuing Share Collective Letters ("SKS"), if necessary, and preparing Public Offering reports in accordance with applicable capital market legislation.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal

KSEI

Kustodian Sentral Efek Indonesia

Alamat : Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 1 Lantai 5, Jl. Jend.
Sudirman Kav 52-53, Jakarta,
Indonesia
Telp. : (021) 52997099
Pedoman Kerja : UUPM dan peraturan
Pasar modal yang berlaku.
Surat Penunjukkan : SP-597/I/SHM/KSEI/0820

Tugas dan kewajiban pokok KSEI

1. KSEI memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek, meliputi: penyimpanan Efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi Efek, administrasi Rekening Efek, distribusi hasil Corporate Action, dan jasa-jasa terkait lainnya.
2. Emiten yang Efeknya terdaftar di KSEI menggunakan jasa KSEI untuk mengadmitsitrasikan Efek yang telah mereka keluarkan, antara lain untuk memperoleh data pihak-pihak yang menjadi pemegang Efeknya dan sebagai bagian dari proses distribusi aksi korporasi.
3. Menyediakan aplikasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

All Capital Market Supporting Professionals hereby declare that they have no affiliation with the Company, either directly or indirectly as specified in the Capital Market Law.

KSEI

Indonesia Central Securities Depository

Address : Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 1 Lantai 5, Jl. Jend.
Sudirman Kav 52- 53, Jakarta,
Indonesia
Telp : (021) 52997099
Work Guidelines : UUPM and applicable
capital market regulations.
Appointment Letter : SP-597/I/SHM/KSEI/0820

KSEI's main duties and obligations :

1. KSEI provides Securities Depository and Transaction settlement services, including: Securities depository in electronic form, Stock transaction settlement, Securities Account administration, distribution of Corporate Action results, and other related services.
2. The issuer's Securities which registered at KSEI whose using KSEI services to administer the Securities issued by issuer, among others to obtain data on from the parties which owned the Securities holders and as part of the distribution process of corporate actions.
3. Provide an application for the General Meeting of Shareholders (GMS) for the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company under the prevailing regulations in the capital market sector.



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management
Discussion Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri Economy and Industry Review

Di tengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu, Indonesia masih mampu mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 2,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2020 didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%.

Kondisi perekonomian global yang belum berjalan secara merata seiring dengan perkembangan kasus Pandemi di masing-masing Negara. Maka sepanjang Juli-September, Bank Indonesia menahan suku bunga kebijakan pada level 4,00% dalam rangka menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendorong pemulihan ekonomi. Berdasarkan data Bappenas bahwa pada triwulan III Rupiah relatif stabil dengan penguatan 1,8% dari triwulan sebelumnya. Perkembangan inflasi pada triwulan III rendah dan berada di bawah batas minimal sasaran inflasi 2020. Sepanjang Juli-September terjadi deflasi sebesar 0,1% setiap bulannya

Di tengah kondisi perekonomian yang belum cukup kondusif, sektor real estate mampu menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil pada tahun 2020. Memiliki peran penting sebagai penyedia salah satu kebutuhan dasar manusia, kontribusi sektor real estate terhadap PDB Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya

Pertumbuhan pada sektor real estate tersebut dapat terjadi karena didukung oleh sektor perbankan yang menyalurkan kredit property, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPA)

In the midst of uncertain global economic dynamics, Indonesia was still able to record that Indonesia's economic growth experienced a growth contraction in 2020 by 2.07% compared to the previous year. Indonesia's economic structure in 2020 is dominated by the province of Java at 58.75% with economic performance experiencing a growth contraction of 2.51%..

Global economic conditions that have not run evenly along with the development of Pandemi cases in each country. So throughout July-September, Bank Indonesia held the policy interest rate at the level of 4.00% in order to maintain the stability of the rupiah value and encourage economic recovery. Based on Bappenas data, in the third quarter the Rupiah was relatively stable with a 1.8% strengthening from the previous quarter. Inflation in the third quarter was low and below the minimum inflation target for 2020. Throughout July-September there was a deflation of 0.1% per month.

In the midst of such an unfavorable economic condition, the real estate sector was able to show relatively stable growth in 2020 Having an important role as a provider of one of the basic human needs, the contribution of the real estate sector to Indonesia's GDP continues to increase every year..

The growth in the real estate sector is made possible due to the support it received from the banking sector that provides property loans, including housing ownership loans (KPR).

TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW

Pembahasan kinerja keuangan berikut ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan data keuangan dan operasional, dan harus dibaca bersama dengan Laporan Keuangan PT Grand House Mulia, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjadi & Tamara (Anggota Morison KSi) dan disertakan sebagai bagian dari Laporan Tahunan ini.

Angka-angka yang berpadanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan untuk tujuan analisis dan atau perbandingan.

Menurut opini KAP Tjahjadi & Tamara, Laporan Keuangan ini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Grand House Mulia, Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

The following financial performance overview is an integral part of financial and operational data, and should be read together with the Consolidated Financial Statements of PT Grand House Mulia, Tbk for the years ending December 31, 2020 and 2019, audited by Public Accounting Firm (KAP) Tjahjadi & Tamara (a Member of Morison KSi) and included as part of this Annual Report.

The corresponding figures for the year ending December 31, 2020 are presented for analysis and/ or comparison purposes.

In the opinion of KAP Tjahjadi & Tamara, this Financial Statements is fairly present, in all material respects, the financial position of PT Grand House Mulia, Tbk as of December 31, 2020, including their financial performance and cash flows, in accordance with Indonesian financial accounting standards

I. LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. Aset

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

I. REPORT ON FINANCIAL POSITION

1. Asset

Expressed in Rupiah unless stated otherwise

	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	11.108.774.250	4.863.379.520
Piutang usaha - pihak ketiga	2.359.633.190	2.287.433.725
Aset real estat	117.620.944.785	87.710.266.680
Uang muka	1.446.638.375	1.666.626.118
Biaya dibayar di muka	6.694.371	888.583.502
JUMLAH ASET LANCAR	132.542.684.971	97.416.289.545
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi	-	1.275.000.000
Tanah untuk pengembangan	82.783.320.591	20.710.225.647
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	19.031.647.449	2.920.281.076
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 406.472.866 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 287.207.301 pada tanggal 31 Desember 2019	397.727.504	452.646.699
Properti investasi	-	23.162.000.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	102.212.695.544	48.520.153.422
JUMLAH ASET	234.755.380.515	145.936.442.967

Pada tahun 2020, Perseroan mencatat jumlah total aset sebesar Rp234,75 miliar, meningkat 60,86% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp145,94 miliar. Pada akun Kas dan setara kas mengalami peningkatan, yakni sebesar 128,42% dari Rp4,86 miliar di tahun 2019, menjadi Rp11,12 miliar di tahun 2020. Selain itu, jumlah Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya menurun sangat signifikan, yakni sebesar -12,13% dari semula Rp452,65 juta menjadi Rp397,73 juta.

In 2020, the Company recorded a total assets of Rp234,75 billion, a solid growth of 60,86% compared to the previous year which was recorded at Rp145,94 billion. In cash and cash equivalents increased by 128,42% from Rp.4,86 billion in 2019, to Rp11,12 billion in 2020. In addition, the restricted cash equivalents also shows significant decrease, by -12,13% from Rp452,65 million to Rp397,73 million.

Jumlah aset lancar yang dimiliki Perseroan pada tahun 2020, tercatat sebesar Rp132,54 miliar, yang bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp97,42 miliar, meningkat signifikan 36,06%. Sementara jumlah aset tidak lancar, juga meningkat cukup signifikan, yakni 110,66%, dari Rp48,52 miliar di tahun 2019 menjadi Rp102,21 miliar di tahun 2020.

Total current assets posted by the Company in 2020, amounted to Rp132,54 billion, when compared to the previous year, which was Rp97,42 billion, shows a significant increase of 36,06%. While the number of non-current assets also decreased significantly by 110,66%, from Rp48,52 billion in 2019 to Rp102,21 billion in 2020.

2. Liabilitas

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

2. Liabilities

Expressed in Rupiah unless stated otherwise

	2020	2019
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha - pihak ketiga	5.960.056.662	13.489.222.133
Beban akrual	79.229.821	50.000.000
Uang muka pelanggan	59.942.333.665	21.123.109.650
Utang pajak	9.880.401.096	5.890.175.852
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	25.020.000.000	12.954.067.753
Utang pembiayaan konsumen	97.806.535	89.907.038
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	100.979.827.779	53.596.482.426
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	19.237.115.325	35.155.232.247
Utang pembiayaan konsumen	17.116.966	114.923.501
Utang pihak berelasi	-	200.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	124.370.000	86.738.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	19.378.602.291	35.556.893.748
JUMLAH LIABILITAS	120.358.430.070	89.153.376.174

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan liabilitas total, dan tingkat peningkatannya cukup signifikan, yakni 35%. Pada tahun 2019, liabilitas total tercatat sebesar Rp89,15 miliar, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp120,35 miliar.

In 2020, the Company posted a quite significant increase in total liabilities, at 35%. In 2019, total liabilities stood at Rp89,15 billion, while in 2020 increased to Rp120,35 billion.

Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan Liabilitas Jangka Pendek dan penurunan Liabilitas Jangka Panjang, masing-masing sebesar 88,41% dan -45,50%. Bila menganalisa peningkatan Liabilitas Jangka Pendek, walaupun secara presentase terlihat ada peningkatan signifikan pada hampir semua akun Liabilitas Jangka Pendek kecuali utang usaha pihak ketiga.

Sementara itu, bila melihat akun-akun Liabilitas Jangka Panjang, juga terlihat penurunan jumlah Utang Bank jangka Panjang, dari Rp35,15 miliar di tahun 2019 menjadi Rp19,24 miliar atau menurun -45,28%.

This incline was due to a increase in Short-term and decreased Long-Term Liabilities, each by 88,41% and -45,50% respectively. Regarding the increase in Liabilities, although in terms of percentage showing a significant increase in almost all of Short-Term Liabilities accounts except Operating Payables - third parties

On the other hand, in terms of Long-Term Liabilities accounts, there is also a decrease in the amount of Long-term Bank Payables, from Rp35,15 billion in 2019 to Rp19,24 billion or by -45,28%.

3. Ekuitas

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

3. Equities

Expressed in Rupiah unless stated otherwise

EKUITAS	2020	2019
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada		
pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 2.500.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		
- 31 Desember 2020: 787.500.000 saham		
- 31 Desember 2019: 630.000.000 saham	78.750.000.000	63.000.000.000
Tambahan modal disetor	40.588.033.379	-
Defisit	(4.951.083.418)	(6.226.934.205)
Sub jumlah - neto	114.386.949.961	56.773.065.795
Kepentingan nonpengendali	10.000.484	10.000.998
JUMLAH EKUITAS	114.396.950.445	56.783.066.793

Perseroan mencatat peningkatan ekuitas, yakni 101,46% dari Rp56,78 miliar di tahun 2019 menjadi Rp114,40 miliar di tahun 2020. Peningkatan ini terutama didorong oleh berkurangnya Saldo defisit, dari -Rp6,23 miliar tahun 2019 menjadi -Rp4,95 miliar di tahun 2020. Menurun -20,49%.

The Company recorded a decrease in equity, 101,46% from Rp56,78 billion in 2019 to Rp114,40 billion in 2020. This increase was mainly driven by Reduced balance of deficit, from -6,23 billion in 2019 to -Rp4,95 billion in 2020. decreased by -20,49%.

II. LAPORAN LABA RUGI

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun 2020 tercatat menurun pesat, yakni sebesar -68% dari Rp3,99 miliar tahun 2019 menjadi Rp1,27 miliar tahun 2020. Akan tetapi laba per saham justru menurun - 98,67% dari Rp138,67 per saham di tahun 2019 menjadi Rp1,84 per saham di tahun 2020.

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

II.LAPORAN LABA RUGI

Total Comprehensive Profit for the Year 2020 decreased significantly by -68% from Rp3,99 billion in 2019 to Rp1,27 billion in 2020. However, earnings per share decreased by -98,67% from Rp138,67 per shares in 2019 to Rp1,84 per share in 2020.

Expressed in Rupiah unless stated otherwise

	2020	2019
PENJUALAN	28.839.344.166	31.699.102.918
BEBAN POKOK PENJUALAN	(18.206.843.501)	(21.426.567.711)
LABA BRUTO	10.632.500.665	10.272.535.207
BEBAN USAHA		
Beban penjualan	(3.862.804.858)	(2.405.073.925)
Beban umum dan administrasi	(4.535.767.195)	(1.776.027.647)
LABA USAHA	2.233.928.612	6.091.433.635
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Biaya keuangan	(1.096.137.223)	(1.768.575.094)
Penghasilan lain-lain - neto	833.210.489	228.717.799
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN		
PAJAK PENGHASILAN	1.971.001.878	4.551.576.340
BEBAN PAJAK FINAL	(720.983.605)	(573.786.987)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.250.018.273	3.977.789.353
PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA TAHUN BERJALAN	1.250.018.273	3.977.789.353
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali program imbalan pasti	25.832.000	8.992.000
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.275.850.273	3.986.781.353
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG		
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.250.018.787	3.977.788.355
Kepentingan nonpengendali	(514)	998
Jumlah	1.250.018.273	3.977.789.353
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN		
BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.275.850.787	3.986.780.355
Kepentingan nonpengendali	(514)	998
Jumlah	1.275.850.273	3.986.781.353
LABA PER SAHAM DASAR	1,84	138,67

1. Penjualan

Pada tahun 2020, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp28,84 miliar, terjadi penurunan -9,02% dibandingkan Rp31,70 miliar pada tahun 2019. Pendapatan usaha ini diperoleh dari penjualan unit rumah pada perumahan Parkville Serpong.

Sementara itu, Beban Pokok Pendapatan juga tercatat meningkat, yakni -15,03%. Dari -Rp21,43 miliar di tahun 2019 menjadi -Rp18,21 miliar di tahun 2020

Rincian pendapatan atas penjualan unit rumah pada perumahan Parkville Serpong adalah sebagai berikut:

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

1. Sales

In 2020, the Company recorded revenues of Rp28,84 million, a slight increase of -9,02%, compared to Rp31,70 million in 2019. Operating revenues were generated from the sales of housing units in the Parkville Serpong.

On the other hand, the Cost of Goods sold also increased by -15,03%, from -Rp21,43 billion in 2019 to -Rp18,21 billion in 2020.

Details of income from the sale of housing units in the Parkville Serpong are as follows:

Expressed in Rupiah unless stated otherwise

	2020	2019	Pertumbuhan /Growth (%)
Tipe 73/60 / Type 73/60	21.530.472.678	13.762.937.720	56%
Tipe 63/60 / Type 63/60	7.308.871.488	17.936.165.198	-59%
Jumlah / Total	28.839.344.166	31.699.102.918	-9%

Sementara rincian Beban Pokok Pendapatan dari penjualan unit rumah pada perumahan Parkville Serpong adalah sebagai berikut :

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

While the details of Cost of Goods Sold from the sale of housing units in the Parkville Serpong are as follows :

Expressed in Rupiah unless stated otherwise.

	2020	2019	Pertumbuhan / Growth (%)
Tipe 73/60 / Type 73/60	13.592.609.606	9.755.831.543	39%
Tipe 63/60 / Type 63/60	4.614.233.895	11.670.736.168	-60%
Jumlah / Total	18.206.843.501	21.426.567.711	-15%

2. Laba Bruto

Laba bruto pada tahun 2020 meningkat 3,50% dari Rp10,27 miliar di tahun 2019 menjadi Rp10,63 miliar di tahun 2020. Peningkatan Laba Bruto ini berasal dari penurunan penjualan yang lebih rendah daripada Beban Pokok Pendapatan.

Penjualan unit rumah tipe 73/60 meningkat 56%, dari Rp13,76 miliar menjadi Rp21,53 miliar. Sementara penjualan unit rumah tipe 63/60 menurun signifikan -59%, dari Rp17,94 miliar di tahun 2019 menjadi Rp7,31 miliar di tahun 2020. Walaupun porsi penjualan unit rumah tipe 63/60 jauh lebih kecil dibandingkan porsi penjualan unit rumah tipe 73/60.

3. Beban Usaha

Beban Usaha terdiri dari 2 komponen, yakni Beban Penjualan serta Beban Umum dan Administrasi. Beban Penjualan tercatat meningkat 60,61% dari -Rp2,41 miliar di tahun 2019 menjadi -Rp3,86 miliar di tahun 2020. Sebaliknya, Beban Umum dan Administrasi meningkat signifikan 155,39% dari -Rp1,78 miliar di tahun 2019 menjadi -Rp4,54 miliar di tahun 2020.

4. Laba Usaha

Perseroan mencatat penurunan yang sangat signifikan pada Laba Usaha tahun 2020, yakni -63,33%, dari Rp6,09 miliar menjadi Rp2,23 miliar. Besarnya penurunan Laba Usaha ini terutama dikarenakan adanya penurunan terhadap Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi.

5. Laba Tahun Berjalan

Perseroan juga mencatat penurunan yang sangat signifikan pada laba tahun berjalan, yakni -68,58% dari Rp3,98 miliar menjadi Rp1,25 miliar. Tentunya hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Laba Usaha yang signifikan seperti yang diuraikan di atas.

2. Gross Profit

Gross profit in 2020 increased by 3,50% from Rp10,27 billion in 2019 to Rp10,63 billion in 2020. This increase in Gross Profit is attributable to the higher decrease in sales compared to the Cost of Goods Sold.

The sales of housing units type 73/60 increased by 56%, from Rp13,76 billion to Rp21,53 billion. While sales of housing units type 63/60 decreased significantly by -59%, from Rp17,94 billion in 2019 to Rp7,31 billion in 2020. Although the sales portion of housing units type 63/60 much smaller than the sales portion of housing units type 73/60.

3. Operating Expense

Operating Expenses consist of 2 components, namely Sales Expenses and General and Administrative Expenses. Sales expenses increased by 60,61% from -Rp.2,41 billion in 2019 to -Rp.3,86 billion in 2020. In contrast, General and Administrative Expenses increased significantly by 155,39% from -Rp.1,78 billion in 2019 to -Rp4,54 billion in 2020.

4. Operating Income

The Company recorded a very significant decrease in Operating Income in 2020, which was -63,33%, from Rp6,09 billion to Rp2,23 billion. Such a significant decrease in Operating Income was mainly due to the decrease in Sales Expenses and Administrative Expenses.

5. Current Year Profit

The company also recorded a very significant decrease in the Current Year Profit, which was -68,58% from Rp3,98 billion to Rp1,25 billion. Of course this is mainly due to the significant decrease in Operating Profit as described above.

ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Saat Perseroan melakukan ekspansi usaha, maka arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi umumnya akan tercatat negatif dan mengisyaratkan peningkatan kebutuhan pendanaan modal kerja Perseroan yang tercermin dari peningkatan pengambilan pinjaman pendanaan oleh Perseroan.

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

CASHFLOW

The cash flow report presents information on receipts and disbursements of cash and cash equivalents in operating, investing and financing activities using the direct method. When the Company expands its business, in general the net cash flows generated from operating activities will be recorded negative, indicating an increase in the need of funding for working capital, which is reflected in the increase in the taking of funding loans by the Company.

Expressed in Rupiah unless stated otherwise.

	2020	2019	Pertumbuhan / Growth (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI/ Cash Flows from Operational Activities	(6.397.500.566)	(28.562.003.876)	78%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/ Cash Flows Investment Activities	(40.828.046.370)	(32.628.881.025)	-25%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ Cash Flows from Financing Activities	53.470.941.666	61.726.586.282	-13%
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS/ Cash Net Increase and Cash Equivalent	6.245.394.730	535.701.381	1066%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/ Cash and Equivalent Cash in Beginning Year	4.863.379.520	4.327.678.139	12%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/ Cash and Equivalent Cash in Ending Year	11.108.774.250	4.863.379.520	128%

Informasi Keuangan Material Lainnya

1. Kemampuan Membayar Utang baik jangka pendek maupun panjang (Rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan ybs).
2. Tingkat Kolektibilitas Piutang (Rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan yang bersangkutan).
3. Struktur Modal.
4. Ikatan material untuk investasi barang modal (pada tahun buku terakhir).

Other Material Financial Information

1. Debt Paying Ability both short and long term (Relevant ratios according to the type of industry the company is in).
2. Collectability of accounts receivable (Relevant ratios according to the type of industry of the company concerned).
3. Capital Structure.
4. Material ties for capital goods investment (in the last fiscal year).

5. Investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.
 6. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan realisasi, yang mencakup :
 - Pendapatan
 - Laba (Rugi)
 - Struktur Modal
 - Hal lain yang dianggap penting oleh perusahaan
 7. Informasi dan Fakta material setelah tanggal Laporan Akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.
 8. Kebijakan Dividen dan rencana pembagian Dividen.
 9. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku.
 10. Rencana dan rincian penggunaan dana hasil penawaran umum/IPO.
 11. Investasi, Ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, dan transaksi dengan afiliasi di tahun buku (bila ada).
 12. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan (bila ada).
 13. Perubahan peraturan Perundang-undangan pada tahun buku terakhir yang berpengaruh signifikan (bila ada).
 14. Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (bila ada).
 15. Ketaatan sebagai Wajib Pajak.
 16. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan tahun buku terakhir terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada
5. Capital goods investment realized in the last financial year.
 6. Comparison between targets / projections at the beginning of the financial year with realization, which includes :
 - Income
 - Profit and Loss
 - Capital Structure
 - Other things considered important by the company
 7. Material information and facts after the date of the Accountant's Report, including its impact on business performance and risk in the future.
 8. Dividend policy and dividend distribution plan.
 9. Employee Stock Ownership Programs and / or Management conducted by the company (ESOP/MSOP) which still exist until the financial year.
 10. Plan and evaluate the use of the proceeds from the public offering / IPO.
 11. Investment, expansion, divestment, business merger / acquisition, acquisition, debt / capital restructuring, and affiliate transactions in the financial year (if any).
 12. Material transactions that contain conflicts of interest (if any).
 13. Changes to the legislation in the last fiscal year that have a significant effect (if any).
 14. Changes in Accounting Policies applied by the company in the last financial year, reasons and impacts on financial statements (if any).
 15. Obedience as a Taxpayer.
 16. Matters that have the potential to significantly influence the business continuity of the company in the last fiscal year.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Rasio pembayaran utang yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah Rasio Lancar (Current Ratio) yang mempunyai angka rasio 1 (satu) kali, dan Rasio Utang (Debt Asset Ratio) sebesar 51%, maka Perusahaan punya kemampuan dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aset lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki.

Tingkat Kolektibilitas piutang diukur dari Receivables Turnover yang mempunyai angka rasio 12 (dua belas) kali selama tahun 2020.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perusahaan dan tidak terdapat ikatan material dan investasi barang modal Perusahaan.

Receivables and Debt Collectability

The debt collectability ratio exerted to measure the Company's ability in fulfilling its obligations is the Current Ratio which has a ratio of 1 (one) times and the Debt Asset Ratio of 51%, thus, the Company can pay off its obligations. Due to the ratio of assets is more immense than the liabilities the Company possesses.

The Receivables collectability level is measured by Turnover Receivables which has a ratio of 12 (twelve) times throughout 2020.

Bond Material for Capital Goods Investment

There is no material commitment to capital goods investment made by the Company and there is no material commitment and investment in the Company's capital goods.

Target dan Proyeksi Perusahaan

Target dan proyeksi Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

The Company's Target and Projection

The Company's Target and Projection for the upcoming one year is as follows :

Description	Year 2
	2021
Revenue	97.282.500.000
Sales	97.282.500.000
COGS	61.514.982.709
Other Operating Income	640.224.000
Other Operating Expenses	576.201.600
Gross Operating Income	35.831.539.691
	37%
Direct Expenses	8.269.012.500
Operational Exp	2.843.275.707
Net Operating Income	24.717.251.484
	25%
Others Expenses	10.266.108.606
Net Profit Before Tax	14.453.142.878
Income Taxes Expenses	16.005.600
Others Comprehensif Income	10.488.269
NET PROFIT	14.447.625.546
	15%

N o	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Harga IPO	Jumlah	Nominal
1	PT Graha Mulia Indotama	52%	100	409.500.000	40.950.000.000
2	Tan Ping (Komisaris Utama)	12%	100	94.500.000	9.450.000.000
3	Velliana Tanaya (Direktur Utama)	8%	100	63.000.000	6.300.000.000
4	Suryadi (Wakil Direktur Utama)	4%	100	31.500.000	3.150.000.000
5	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	24%	100	189.000.000	18.900.000.000
	TOTAL	100%		787.500.000	78.750.000.000

Aspek Pemasaran

Guna mendukung pemasaran dari produk-produk Perseroan, maka Perseroan mengedepankan kesadaran dari calon-calon konsumen atas keunggulan hunian yang ditawarkan Perseroan, maka Perseroan merencanakan strategi-strategi pemasaran yang efektif agar mampu memberikan hasil yang optimal, yaitu dengan metode soft selling dan hard selling.

Adapun metode soft selling adalah dengan mengadakan acara gathering untuk calon-calon pembeli dan dapat dihadiri juga oleh pemilik hunian. Setiap minggunya diadakan acara yang beragam dimana Perseroan selain menyampaikan paparan atas keunggulan dan keuntungan memiliki hunian yang dibangun dan dikembangkan oleh Perseroan, juga disajikan makanan-makanan dan acara yang beragam.

Sedangkan untuk metode hard selling adalah dengan melakukan direct selling kepada calon-calon pembeli, antara lain dengan turut serta pada pameran yang diadakan di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat serba guna yang mengadakan pameran properti. Selain itu, Perseroan juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada calon pembeli untuk pembayaran hunian yang dikembangkan oleh Perseroan.

Untuk mendukung penjualan yang dikembangkan oleh Perseroan, maka Perseroan bekerjasama dengan agen sales property yang berstandar internasional untuk membantu penjualan yang dikembangkan oleh Properti sekaligus memberikan pelatihan kepada sales-sales inhouse Perseroan.

Pangsa pasar Perseroan cenderung mengarah kepada pasangan muda, eksekutif muda dan untuk investor yang ingin berinvestasi pada hunian real estate di kawasan yang terletak selangkah dari hunian yang berkembang pesat di kawasan Lingkar luar BSD.

Marketing Aspect

In order to support the marketing of the Company's products, the Company prioritizes the awareness of prospective consumers of the real estate excellence offered by the Company, the Company plans effective marketing strategies which are able to yield great outcomes, namely by the method of soft-selling and of hard-selling.

The soft-selling method is to hold a gathering for prospective buyers and can as well be attended by the real estate owners. A variety of events is held on weeks where the Company not only to convey exposure to the prominences and the leberages of owning a residence built and developed by the Company, but also to serve a variety of food and events.

Whereas the hard-selling method is a direct selling act towards the prospective buyers, including by participating in exhibitions held in public places, such as shopping centers and multipurpose places that hold property exhibitions. In addition, the Company provides facilities to the prospective buyers for payment of real estate developed by the Company.

To boost up sales developed by the Company, the Company collaborates with international standard property sales agents to assist in the sale developed by the Property and to purvey training to the Company's inhouse sales.

The Company's market share tends to lead to young couples, young executives, and investors who want to invest in real estate in an area that is located a step away from a rapidly growing residential area in the outer ring BSD area.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan atau Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Terdapat Investasi dan Restrukturisasi Utang/ Modal yang terjadi antara tahun buku 2019 sampai 2020. Dan tidak terdapat Ekspansi, Divestasi, Penggabungan atau Peleburan Usaha, Akuisisi, Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang terjadi antara tahun buku 2019 sampai 2020.

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger or Consolidation of Businesses, Acquisitions, Debt/Capital Restructuring, Affiliated Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest

There is an Investment and Debt/Capital Restructuring that occurred between 2019 to 2020 fiscal year. And there is no Expansion, Divestment, Merger or Consolidation of Businesses, Acquisitions, Affiliated Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest that occurred between 2019 to 2020 fiscal year.

Kebijakan Akuntansi

Tidak ada perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh signifikan dan dampaknya terhadap Perusahaan.

Accounting Policy

There are no changes in statutory provisions and alterations in accounting policies that have a significant effect and an impact towards the Company.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Use Of Initial Public Offering Realization

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PT GRAND HOUSE MULIA, TBK. PER 31 DESEMBER 2020

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1	Penawaran Umum Perdana (IPO)	10/09/2020	59.850.000.000	3.862.012.450	55.987.987.550
	JUMLAH		59.850.000.000	3.862.012.450	55.987.987.550

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA
PT GRAND HOUSE MULIA, TBK.
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Uraian	Total
1	Utang Bank	1.623.637.232
2	Modal kerja	52.987.987.550
	JUMLAH	54.611.624.782

Rencana Penggunaan Dana			Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Hutang Bank	Modal Kerja	Total	Hutang Bank	Modal Kerja	Total	
3.000.000.000	52.987.987.550	55.987.987.550	1.623.637.232	52.987.987.550	54.611.624.782	1.376.362.768
3.000.000.000	52.987.987.550	55.987.987.550	1.623.637.232	52.987.987.550	54.611.624.782	1.376.362.768

LAPORAN PENEMPATAN SISA DANA PENAWARAN UMUM PERDANA
PT GRAND HOUSE MULIA, TBK.
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	TANGGAL	JENIS PENEMPATAN	NO. DOKUMEN	JANGKA WAKTU	JATUH TEMPO	NAMA AKUN	BANK	BUNGA/NISBAH	NILAI
1	31/12/2020	GIRO	-	-	-	PT.Grand House Mulia Tbk.	BTN Syariah	-	1.376.362.768
Jumlah									1.376.362.768



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

INTRODUCTION

Perseroan menyadari arti penting penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di setiap aspek usaha untuk menjaga kepentingan serta peningkatan nilai-nilai bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham. Penerapan GCG bukan hanya sebagai suatu kewajiban namun juga menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan keberlangsungan usaha.

Untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di ranah nasional, regional maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah bagian dari komitmen Granddevelopment untuk mendorong terwujudnya entitas yang kokoh dan independen.

The Company realizes the importance of implementing good corporate governance (GCG) in every aspect of its business to safeguard interests and increase values for stakeholders and shareholders. The implementation of GCG is not only an obligation but also a necessity needed to realize business continuity.

In terms of embodying a company that is trusted by stakeholders, work excellence, and grows sustainably, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within every business activity is necessarily required. With this commitment, the Company always follows the development of best governance practices which are applicable in the national, regional, and international domains that are relevant and are appropriate to their needs. This is part of Granddevelopment commitment to encourage the establishment of a solid and an independent entity.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Dalam melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan, Perseroan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai-nilai inti Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien;
3. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut;
4. Memastikan setiap karyawan dalam Perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
5. Mewujudkan praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten.

In implementing the practice of Corporate Governance, the Company is guided by the applicable rules and regulations. The Company is committed to applying the principles of Good Governance with the following objectives:

1. Distending the Company's core values by enhancing the principles of transparency, accountability, and responsibility;
2. Ensuring that the Company's management is professional organized, transparent and efficient;
3. Independence in making decisions in accordance with the roles and responsibilities of each leader in the management;
4. Assuring that each employee engaged within the Company in accordance with the applicable authority and responsibility;
5. Executing business practices with the GCG Principles consistently.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN COMMITMENT TO IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan internal dan lingkungan eksternal Perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Beberapa faktor yang memegang peranan penting keberhasilan pelaksanaan praktik GCG adalah sebagai berikut:

Faktor internal

1. Budaya Perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di Perusahaan;
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan prinsip dasar GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko Perusahaan berdasarkan pada standar GCG.
4. Sistem audit internal (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang akan terjadi.
5. Keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami perkembangan dan dinamika Perusahaan.

Faktor eksternal

1. Sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government untuk mewujudkan komitmen Beyond Governance.
3. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.

The implementation of Corporate Governance in the Company's internal and external environment is expected to provide benefits, such as:

1. Arrange relationships among stakeholders.
2. Run a business that is transparent, obedient to rules, and has good business ethics.
3. Increased risk management.
4. Increased competitiveness and capability of the Company in facing a dynamic industrial changes.
5. Preventing irregularities in the management of the company.

Several factors having an imperative role in the successful implementation of GCG practices are as follows:

Internal factors:

1. Corporate Culture supporting the implementation of GCG in the mechanism and business management system within the Company;
2. The diverse regulations and policies issued by the Company are in line with GCG's principles;
3. The Company's risk management is based on GCG standards;
4. Effective internal audit system (inspection) within the Company to avoid any irregularities that would occur;
5. Disclosure of information for the Public on the development and dynamics of the Company.

External factors:

1. Proper legal system as to ensure the enforcement of a consistent and effective legal supremacy;
2. Support the implementation of GCG from the public sector or government institutions that are expected to implement Good Governance and Clean Government towards the actual Good Governance;
3. Establishment of a social value system that supports the implementation of GCG in the community. This system is expected to arise the active participation of society to support the application and GCG socialization voluntarily;

4. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana Perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor Perusahaan dalam implementasi GCG.
4. The presence of an anti-corruption spirit in the public in which the Company operates is accompanied by improved quality of education and the expansion of employment opportunities. Improvement of the public environment affects the quality and score of the Company in the implementation of GCG

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan mengembangkan struktur dan tata kelola yang memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta praktik terbaik bagi Perusahaan. Secara konsisten, Perusahaan menerapkan prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Transparansi, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Perusahaan meyakini bahwa Perusahaan telah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik dan tepat dalam menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dengan publikasi informasi keuangan mengenai kinerja Perusahaan.
2. Akuntabilitas, yakni kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Seluruh organ tata kelola Perusahaan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban yang sistematis. Hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perusahaan yang memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola.
3. Responsibilitas, yakni kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang

Principles of Corporate Governance

The Company develops the structure and principles of Good Corporate Governance in accordance with applicable rules and regulations and best practices for the Company. Consistently, the Company applies the GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness with the following conditions:

1. Transparency, i.e openness in conducting the decision making process, disclosing material, and relevant information about the Company. The Company provides true, accurate, and timely information to all Stakeholders. The Company believes that the principles of transparency has been implemented well and precisely in avoiding the occurrence of conflict of interest with various parties. This is evidenced by the publication of financial information that has a significant impact on the performance of the Company.
2. Accountability, i.e the clarity of functions, implementation and accountability of the organs with the result that the management of the Company implemented effectively. The organ of Corporate Governance has accountability principles with clarity of function, structure, system, and systematic accountability. This could be seen through the management of the Company that separates duties and responsibilities and clearly describes the functions, rights, obligations and authority of each governance organ.
3. Responsibility, i.e conformity in business management related to rules and regulation and

sehat. Bentuk pertanggungjawaban Perusahaan dibuktikan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pembayaran pajak, pelaksanaan hubungan industrial, melindungi segenap karyawan dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial Perusahaan yang berkelanjutan.

4. Independensi, yakni pengelolaan Perusahaan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan prinsip korporasi yang sehat.

sound corporate principles. The form of corporate liability is evidenced by compliance with applicable regulations, such as tax payments, industrial relations implementation, protecting all employees by implementing occupational health and safety, and environmental protection through sustainable Corporate Social Responsibility programs.

4. Independence, i.e professional management of the Company without conflict of interest and influence from any party that is not in compliance with rules and regulations as well as sound corporate principles.
5. Fairness, i.e equality in fulfilling the rights of all Shareholders based on sound corporate principles.

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha Perusahaan sebagai standar landasan operasionalnya. Melalui penerapan Pedoman GCG, diharapkan semua nilai-nilai perusahaan dapat ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan yang menguntungkan.

Tujuan penyusunan Pedoman GCG Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan;
2. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar GCG;
3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan;
4. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju Budaya Perusahaan yang lebih baik.

The Corporate Governance Guidelines (GCG) are applied consistently across all lines and aspects of managing the Company's business as the operational foundation standard. Through the implementation of the GCG Guidelines, it is expected that all company's values could be increased optimally and produce a pattern of beneficial relationships.

The objectives of the Company's GCG Guidelines are as follows:

1. Encourage the Company's organs (General Meetings of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors) in decisions and execute actions in accordance with high moral values and compliance with the provisions of the Articles of Association and applicable Regulation and responsible to Stakeholders;
2. Urge and support the Company's development, resources and risk management with the application of prudent principles, in line with GCG's principles;
3. Drive the Company's awareness and social responsibility towards society and environmental sustainability especially around the Company;
4. Develop attitudes and behaviours that are in line with the evolving demands and changes in the business environment towards a better Corporate culture.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan standar tata kelola yang terbaik melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan, serta tidak hanya merujuk pada minimal standar maupun rekomendasi yang harus dipenuhi. Saat ini, Perseroan telah melakukan penilaian atas penerapan GCG kepada semua organ perusahaan beserta pemangku kepentingan melalui penilaian sendiri (self-assessment), yang diimplementasikan dengan menerapkan metode Key Performance Indicators (KPI) yang diterapkan kepada seluruh karyawan Perseroan.

The Company is committed to implement the best governance standard through numerous improvements, by not only complying to minimum standards or requirements. Currently, the Company has implemented assessment of GCG practice to all company's organs and stakeholders, by conducting self assessment method, which implemented applying Key Performance Indicators (KPI) methods, which are applicable to all the Company's employees.

Implementasi Rekomendasi OJK

Implementation of OJK Recommendation

Perseroan berkomitmen agar pedoman tata kelola Perseroan sebagai perusahaan terbuka mengacu pada aspek pelaksanaan dan prinsip-prinsip pedoman tata kelola perusahaan yang unggul mencakup aspek implementasi standar dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang harus diterapkan Perseroan saat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola. Implementasi tersebut mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan.

The Company is committed that the corporate governance guidelines as a public company refer to the implementation aspects and the guiding principles of superior corporate governance include aspects of the implementation of standards and principles of corporate governance that the Company must apply when implementing the principles of governance. The implementation refers to the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance.

Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policy and Structure

Perusahaan memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Code of Conduct, Board Charter, dan Charter Audit Internal, serta manajemen risiko dan kebijakan lainnya untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan secara berkesinambungan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Bidang Pasar Modal.

The Company enforces the Code of Governance, the Code of Conduct the Board Charter, the Internal Audit Charter, and risk management and other policies to support the implementation of Corporate Governance continuously in accordance with prevailing regulations in Capital Market.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan Perseroan dan memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, wewenang tersebut antara lain termasuk mengambil keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan hal-hal lain terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh seluruh informasi tentang jalannya Perseroan dan meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Perusahaan.

- A. RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan
 - b. RUPS Luar Biasa
- B. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun untuk menyetujui di antaranya Laporan Tahunan, penggunaan laba, atau penetapan Kantor Akuntan Publik.
- C. RUPS Tahunan mengenai laporan tahunan diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun penutupan buku yang bersangkutan.
- D. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the management structure of the Company and has authority not owned by the Board of Commissioners and Directors. In accordance with the Articles of Association of the Company, these authorities include making decisions relating to amendments to the Company's Articles of Association, appointing and dismissing Directors and Members of the Board of Commissioners, deciding the distribution of duties and authority among Directors and other matters relating to merger, consolidation, expropriation, bankruptcy, and dissolution of the Company.

The General Meeting of Shareholders has the right to obtain all information about the Company's operations and hold the Board of Commissioners and Directors accountable for the management of the Company.

- A. RUPS consists of:
 - a. Annual GMS
 - b. Extraordinary GMS
- B. AGMS are held annually to approve, among others, the Annual Report, the use of profits, or the determination of the Public Accounting Firm.
- C. AGMS regarding annual report is held no later than six months after the book's closing year.
- D. Extraordinary GMS could be held at any time in accordance with the needs for the benefit of the Company.

Wewenang RUPS

1. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak;
2. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perusahaan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya;
3. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan;
4. Menyetujui penambahan modal Perusahaan;
5. Memutuskan pengurangan modal Perusahaan;
6. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
7. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;
8. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus;
9. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perusahaan;
10. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih;
11. Mengangkat anggota Dewan Komisaris;
12. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris;
13. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
14. Mengangkat komisaris independen;
15. Mengangkat anggota Direksi;
16. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
17. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
18. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
19. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perusahaan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang;
20. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan, atau menjadikan jaminan utang

GMS Authority

1. Determine on issued shares in the form of cash and or in other forms, for instance fixed assets;
2. Authorize whether the Shareholders and other Creditors could use the bill rights as compensation of deposit liabilities on the stock price taken;
3. Approve the repurchase of the issued shares;
4. Approve the capital increase of the Company;
5. Determine on a reduction of the Company's capital;
6. Validate the business plan proposed by the Board of Directors;
7. Determine on the use of net income, including the determination of the amount of the retained earning reserves;
8. Regulate the procedures for dividend included in the retained earning reserves;
9. Determine on the merger, acquisition, separation, submission in order for bankruptcy declaration, an extension of the time of the establishment, and the dissolution of the Company;
10. Determine the distribution of each Board of Directors' duties and authorities in case that the Board of Directors consists of two or more members;
11. Appoint member of the Board of Commissioners;
12. Establish conditions about the remuneration of the honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners;
13. Determine whether or not the Board or the Commissioner may conduct action of management of the Company in a circumstances for a certain period;
14. Appoint an Independent Commissioner;
15. Appoint member of the Board of Directors;
16. Dismiss member of the Board of Directors at any time by describing the reason;
17. Revoke or ratify decision of the Board of Directors' temporary dismissal that stated by the Board of Commissioners;
18. Determine the provisions of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors;
19. Determine the authority of the Board of Directors to represent the Company in case that the Board of Directors consists of more than 1 person;
20. Comply to switch the Company's assets, or use it as debt guarantees, that is more than 50% of the

kekayaan Perusahaan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;

21. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan kepada Pengadilan Niaga.

Penyelenggaraan RUPS

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan telah melakukan serangkaian proses persiapan mulai dari pemberian informasi terkait waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS kepada seluruh Pemegang Saham serta pendistribusian materi pembahasan RUPS. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS dalam Perusahaan mencakup RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSPLB").

RUPS Tahunan (RUPST)

RUPST diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku. Selama rapat berlangsung, para Pemegang Saham membahas agenda yang telah ditetapkan dan hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS Luar Biasa (RUPSPLB)

RUPSPLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Penyelenggaraan RUPSPLB dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

total Company's net assets in one or more transactions, whether related to each other or not;

21. Approve whether the Board of Directors capable to apply for the Company's bankruptcy to the Court of Commerce.

The Enforcement of GMS

In holding the GMS, the Company has conducted a series of preparatory processes starting from providing information regarding the time and place for holding the GMS to all Shareholders and distributing the GMS discussion material. In accordance with the Articles of Association of the Company, the GMS in the Company includes the Annual GMS ("AGM") and the Extraordinary GMS ("EGMS").

Annual GMS (AGMS)

The AGM is held no later than 6 (six) months after the end of the financial year. During the meeting, the Shareholders discuss the determined agenda and other matters that require the approval of the GMS for the benefit of the Company with due regard to the provisions of the Company's Articles of Association.

Extraordinary GMS (EGMS)

EGMS could be held at any time based on needs for the benefit of the Company. The implementation of EGMS could be carried out at the request of 1 (one) person or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights.

Rencana dan Penyelenggaraan RUPS

RUPST dan RUPSLB diselenggarakan dengan didahului perencanaan yang matang dan tetap mematuhi panduan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS yang menggantikan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang sudah tidak berlaku. Dalam peraturan tersebut, penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan terdiri dari beberapa tahap mulai dari pemberitahuan penyelenggaraan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS.

Perusahaan telah mematuhi prosedur RUPS terkini dan menyelenggarakan RUPS dengan tahapan berikut:

1. Perusahaan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") perihal rencana penyelenggaraan RUPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
2. Perusahaan melakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan pemanggilan RUPS.
3. Perusahaan melakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Plan and Implementation of GMS

The AGMS and EGMS are held in advance of careful planning and still adhere to the procedure guidelines as stipulated in the Financial Services Authority's Articles of Association and Regulations. 32/ POJK.04/2014 dated on December 8, 2014 concerning the Plan and Implementation of the GMS that substitutes the Decree of the Chairperson of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: KEP-60/PM/1996 dated on January 17, 1996 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders which are not applicable any more. In the regulation, the holding of the GMS by the Company consists of several stages commencing from the notification of the implementation of the GMS, the announcement of the GMS, the calling of the GMS, and the implementation of the GMS.

The company has complied with the latest GMS procedures and held a GMS with the following stages:

1. The company submits to the Financial Services Authority ("OJK") regarding the planned implementation of the GMS no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS, without taking into account the date of the GMS announcement.
2. The Company conducts GMS announcements to shareholders through Indonesian language newspapers that have national circulation, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website no later than 14 (fourteen) days prior to the GMS invitation by not taking into account the date of announcement and summons of the GMS.
3. The Company conducts the GMS registration through Indonesian language newspapers that have national circulation, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS without taking into account the date of summons and the date of the GMS.

4. Perusahaan menyampaikan bukti pengumuman dan pemanggilan RUPS kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan pengumuman dan pemanggilan tersebut.
 5. Perusahaan mengumumkan ringkasan risalah RUPS melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dan menyampaikan bukti pengumumannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
4. The Company submits evidence of the announcement and summons of the GMS to FSA no later than 2 (two) working days after the publication of the announcement and the summons.
 5. The Company announces a summary of the minutes of the GMS through Indonesian language newspapers with national circulation, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website no later than 2 (two) working days after the GMS and submits proof of its announcement to OJK no later than 2 (two) days work after being announced.

Pemungutan Suara

Tata cara pemungutan suara yang dilakukan dalam pelaksanaan RUPS adalah secara lisan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut. Apabila terdapat peserta rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat. Perusahaan memberikan hak yang setara kepada seluruh pemegang saham, tanpa membedakan jumlah, jenis, dan kelas saham yang dimiliki, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. RUPS dimulai dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS. Pada pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS akan menyampaikan kondisi Perusahaan, mekanisme pengambilan keputusan untuk mata acara rapat dan prosedur untuk menggunakan hak suara pemegang saham dalam mengajukan permintaan dan/atau komentar.

Voting

The procedure for voting carried out in the implementation of the GMS is conducted in verbal act unless the Meeting Chairperson determines otherwise. Verbal voting is done by "Lifting Hands" with the following procedure. Should there be a meeting participant whose attendance has been calculated in determining the quorum, but who is not in the meeting room at the time the voting is conducted, then the person concerned is deemed to approve all decisions made at the meeting. The company gives equal rights to all shareholders, regardless of the number, type and class of shares held, except as determined in the Articles of Association of the Company.

The GMS is chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners and held in Indonesian. The GMS begins with first reading the rules of the GMS. At the opening of the GMS, the Chairperson of the GMS would convey the conditions of the Company, the mechanism of decision making for the agenda of the meeting, and the procedure for using the voting rights of shareholders to submit requests and/or comments.

Pada akhir pembahasan setiap mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap agenda rapat. Pimpinan RUPS atau Direktur yang ditunjuk oleh ketua rapat, menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan pemegang saham yang hadir.

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilaksanakan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara diselenggarakan secara lisan dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara dan membuat risalah rapat RUPS

Pengambilan Keputusan dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan

Seluruh keputusan RUPS Tahunan sebagaimana tertera di atas disetujui secara musyawarah dan mufakat dan seluruh keputusan telah direalisasikan sebagai berikut:

Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020

RUPS Tahunan dan Public Expose 2020 akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021, mundur dari ketentuan tentang batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan yang berlaku akibat pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-30/D.04/2021 tertanggal 02 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan adanya Pandemi Corona Virus 2019, dengan rencana sebagai berikut

At the end of the discussion of each AGM agenda, the Chairperson of the GMS provides an opportunity for shareholders or their proxies to submit questions/responses and/or proposals on each meeting agenda. The Chairperson of the GMS or the Director appointed by the chairman of the meeting, answers or responds to the questions/notes of the shareholders present.

After all the questions were answered and responded to, then a decision was made based on deliberation to reach consensus. Should deliberations for consensus be not reached, decision making would be carried out through voting. Voting is held verbally and only shareholders or their authorized proxies have the rights to cast votes. Every share gives the holder the rights to cast one vote. The Company has appointed an independent party, namely the Notary assisted by the Securities Administration Bureau in calculating and/or validating the vote and making minutes of the GMS meeting.

Decision Making and Follow-Up to Annual AGMS Decisions

All decisions of the Annual GMS as stated above are agreed upon by consensus and all decisions have been realized as follows:

Implementation Plans for the 2020 Annual GMS

The 2020 Annual GMS and Public Expose will be held in August 2021, postponed from the deadline as regulated due to Covid-19 pandemic as Circulated of Financial Service Authority (FSA) No. S-30/D.04/2021 dated May 02, 2021 about Affairnation, Extension, or Revocation to Relaxastion Policy related to Corona Virus 2019, with the following plans:

No	Kegiatan Activities	Tanggal Date
1.	Pemberitahuan ke OJK dan Bursa Notification to the FSA and Exchange	12 Juli 2021
2.	Iklan Pemberitahuan Notification Announcement	19 Juli 2021
3.	Recording Date RUPS Recording Date GMS	02 Agustus 2021
4.	Iklan Panggilan Summon announcement	03 Agustus 2021
5.	RUPS dan Public Expose GMS and Public Expose	25 Agustus 2021
6.	Iklan Hasil RUPS GMS Results Announcement	27 Agustus 2021

DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi sesuai peraturan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan garis besar kebijakan Perseroan. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), tugas dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta memberi masukan terkait kedua hal tersebut. Adapun anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS serta diharuskan memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lain yang berlaku.

Komposisi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan secara resmi dinyatakan lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi sejumlah syarat kemampuan dan integritas agar dapat melaksanakan dengan baik fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, serta tata kelola perusahaan. Adapun susunan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners of the Company is responsible for carrying out the supervisory function and consultation function in accordance with regulations that apply to the interests of the Company and in accordance with the outline of the Company's policies. Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the task of the Board of Commissioners is to supervise the management and policies made by the management of the Company, as well as provide input regarding the two matters. The members of the Board of Commissioners of the Company are appointed and dismissed by the GMS and are required to meet the general and specific requirements stipulated in the Articles of Association of the Company and other applicable provisions.

The Board of Commissioners' Composition

Members of the Board of Commissioners are appointed through the General Meeting of Shareholders (GMS) after taking the fit and proper test and officially declared to have passed by the Financial Services Authority. In addition, members of the Board of Commissioners must also fulfil a number of conditions of capability and integrity in order to be able to properly carry out the oversight and advisory functions for the benefit of the Company. Members of the Board of Commissioners must also have a good understanding of the Articles of Association, laws and regulations relating to their duties, and corporate governance. The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2020 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Tan Ping	Komisaris Utama President Commissioner
Mariano Halilintar	Komisaris Independen Independent Commissioner

Tugas dan Tangung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan penerapan GCG dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan sehari-hari.
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil kinerja Direksi selama melakukan tindakan pengurusan Perseroan.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan Perseroan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya.
7. Meminta penjelasan dari Direksi baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perseroan yang Baik bagi Perseroan Pembiayaan ("POJK No. 30/2014") dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Based on the Board of Commissioners' Work Guidelines, the duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners related to the implementation of GCG can be described as follows:

1. Supervise and give advice to the Board of Directors on the daily management actions of the Company.
2. Supervise the implementation of the Company's work plan carried out by the Board of Directors.
3. Undertake monitoring and evaluation of the results of the performance of the Board of Directors during the Company's management actions.
4. Perform supervision of the implementation of risk management and the implementation of Good Corporate Governance in each of the Company's business activities at every level and hierarchy of the Company's organization.
5. Commit monitoring and supervision of the Company's compliance with all applicable laws and regulations.
6. Ensure the Board of Directors has followed up on every finding and recommendation from the Internal Audit Unit, External Auditor, FSA (if any), and other relevant parties.
7. Demand an explanation from the Board of Directors both verbally and in writing in order to carry out the duties of the Board of Commissioners.

In the future, the Board of Commissioners, including the Independent Commissioner, will continue to implement and develop their duties as the Company's supervisory organs in accordance with the above and with due regard to the provisions of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies, the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 dated on November 19, 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies ("POJK No. 30/2014") and other related regulations.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

The Company and the Board of Commissioners do not have contracts related to employee benefits after the term of service ends.

Pedoman Kerja (Charter) Dewan Komisaris

Work of Independent Commissioners

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman ini berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mewujudkan Visi dan Misi Perseroan.

The task of supervising and providing advice to the Board of Directors is carried out by referring to the Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners. This guideline contains guidelines for working procedures of the Board of Commissioners and Directors as a reference for the Board of Commissioners and Directors in carrying out their respective duties to realize the Company's Vision and Mission.

Pedoman kerja ini dibuat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik dan mencakup:

This work guideline is made referring to the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or public companies and includes:

1. Persyaratan Dewan Komisaris.
2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
4. Waktu Kerja Dewan Komisaris.
5. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris.
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.
7. Pengunduran Diri.

1. Requirements of the Board of Commissioners.
2. Dual Position of the Board of Commissioners.
3. Tasks, Authorities and Responsibilities of the Board of Commissioners.
4. Working Time of the Board of Commissioners.
5. Policy Meeting of the Board of Commissioners.
6. Report and Accountability of the Board of Commissioners
7. Resignation.

Komisaris Independen

Independent Commissioners

Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara independen dan mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Untuk itu, Komisaris Independen tidak boleh memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten.

The Independent Commissioner is responsible for supervising independently and representing the interests of minority shareholders. For this reason, Independent Commissioners may not have financial, management, share ownership and/or family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or companies that might hinder or hinder their position to act independently in accordance with the principles GCG principles. Appointment of Independent Commissioners is regulated in the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning Issuers and Board of Commissioners.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

Determination Criteria for Independent Commissioners

The Independent Commissioner must fulfill the requirements when appointed and during his tenure as follows:

1. It is not an individual who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company in the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
2. Does not have shares directly or indirectly with the Company;
3. Does not have an affiliate relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders; and
4. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.

Direksi The Board of Director

Direksi telah mengadakan rapat bulanan di tahun 2020 sesuai dengan POJK No. 30/2014.

Komposisi Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme pengambilan suara. Komposisi dan jumlah anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Seluruh anggota Direksi diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik. Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi juga telah dituangkan dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Perseroan. Sampai dengan 31 Desember 2018, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

The Board of Directors has held a monthly meeting in 2020 in accordance with POJK No. 30/2014.

Directors' Composition

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS through a voting mechanism. The composition and number of members of the Board of Directors are also determined by the GMS by taking into account the Company's vision, mission and strategic plans to enable effective, appropriate and fast decision making, and can act independently. All members of the Board of Directors are required to fulfil the requirements and have the experience and expertise needed to carry out their respective functions and duties as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or public companies. The duties, responsibilities and authority of the Board of Directors have also been stated in the Board of Directors and Board of Directors Work Guidelines. As of December 31, 2018, the composition of the Company's Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Velliana Tanaya	Direktur Utama President Director
Suryadi	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Rio Handono	Direktur Director

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan Perseroan terutama terkait pengelolaan terhadap kegiatan usaha. Direktur Utama bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan setiap anggota Direksi.

Tugas dan Wewenang

1. Menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;
2. Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
3. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6. Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors has a very important role in making decisions for the interests of the Company, especially related to the management of business activities. The President Director is responsible for coordinating the activities committed by each member of the Board of Directors.

Duties and Authorities

1. Run the management function of the Company in accordance with the Company's business objectives and objectives;
2. Define the short and long term strategic directions and priorities of the Company.
3. Manage the Company in accordance with the authorities and responsibilities stated in the Articles of Association of the Company and the applicable laws and regulations.
4. Ensure that each policy, provision, system and procedure, as well as the Company's business activities are in accordance with the prevailing laws and regulations and ensure the Company's compliance with all commitments made by the Company to FSA and/or other relevant parties.
5. Implement Good Corporate Governance principles in each of the Company's business activities at every level and hierarchy of the Company's organization.
6. Conduct the Company's social responsibility program to the people in need.
7. Follow up on all audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, External Auditor, FSA (if any), and other relevant

lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

8. Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9. Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
12. Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kedepannya, Direksi termasuk Direktur Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 30/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Selama tahun 2020, dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Program Pengembangan Keahlian Direksi

Sepanjang tahun 2020 Direksi belum mengikuti Pelatihan/Lokakarya/Seminar.

Pedoman Kerja (Board Charter) Direksi

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Direksi memiliki Pedoman Kerja (Board Charter) yang tercakup dalam Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pedoman ini berisi tentang petunjuk tata laksana kerja serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman ini merupakan acuan utama bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan. Board Charter ini disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik.

parties to be reported to the Board of Commissioners.

8. Maintain healthy and open relationships with other members of the Board of Directors.
9. Support the role of the Board of Commissioners as the supervisory organ of the Company by providing accurate and timely information and providing all facilities needed by the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties.
10. Organize a General Meeting of Shareholders (GMS).
11. Responsible for carrying out their duties to shareholders through the GMS.
12. Pay attention to the interests of all the Company's stakeholders in accordance with the applicable laws and regulations.

In the future, the Board of Directors, including the Independent Director, will continue to implement and develop its duties as the organ of the Company in accordance with the above and with due regard to the provisions of the Company Law, POJK No. 30/2014 and other related regulations.

During 2020, in order to improve the competence of the Board of Directors, the Company will include Directors in seminars/workshops held by various competent institutions including those held by the OJK and the Stock Exchange.

Directors' Proficiency Development Program

Throughout 2020 Directors did not attend Training/Workshops/Seminars.

Directors' Charter

As previously stated, the Board of Directors has a Work Charter that is covered by the Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as a guideline in carrying out their duties, responsibilities and authorities. This guideline contains guidelines for work management and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand manner and can be carried out consistently. This guideline is the main reference for the Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission. This Board Charter is prepared in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or public companies.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam Board Charter Perseroan antara lain memuat:

1. Persyaratan Direksi;
2. Rangkap Jabatan Direksi;
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi;
4. Waktu Kerja Direksi;
5. Kebijakan Rapat Direksi;
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi;
7. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara.

The Directors' Charter and Code of Conduct in the Company's Board Charter includes:

1. Requirements for Directors;
2. Trap of Directors Position;
3. Tasks, Authorities and Responsibilities of the Board of Directors;
4. Directors Working Time;
5. Board of Directors Meeting Policy;
6. Reporting and Accountability of Directors;
7. Resignation and Temporary Dismissal.

Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

The company currently does not have a nomination and remuneration committee, but the nomination and remuneration functions have been carried out by the Board of Commissioners in accordance with OJK Regulation No. 34 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi

Meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Joint Meeting of the Board of Commissioners & Directors

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien melalui mekanisme rapat. Rapat tersebut dilakukan baik di dalam lingkungan Dewan Komisaris, Direksi, maupun secara bersama melalui rapat gabungan.

The Board of Commissioners and Directors always communicate and coordinate effectively and efficiently through a meeting mechanism. The meeting was conducted both within the Board of Commissioners, the Board of Directors, and jointly through joint meetings

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat di tahun 2020. Dan untuk kedepannya, Dewan Komisaris tetap akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 30/2014.

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners does not hold a meeting in 2020. As for the future, the Board of Commissioners plans to hold meetings of at least 4 (four) times in 1 (one) year in accordance with POJK No. 30/2014.

Rapat Direksi

Selama tahun 2020, jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Board of Directors Meeting

During 2020, the number of meetings held by the Board of Directors is 4 (four) times with the frequency of attendance as follows:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Name	Position	Total Meetings	Total Attendance	
Velliana Tanaya	Direktur Utama	4 kali	4 kali	100%
	President Director	4 times	4 times	
Suryadi	Wakil Direktur Utama	4 kali	4 kali	100%
	Vice President Director	4 times	4 times	
Rio Handono	Direktur	4 kali	4 kali	100%
	Director	4 times	4 times	

Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners & Directors

Selain itu, Direksi juga mengadakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya sekali dalam 4 bulan

In addition, the Board of Directors also holds Joint Meetings with the Board of Commissioners on a regular basis at least once in 4 months.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Name	Position	Total Meetings	Total Attendance	
Dewan Komisaris				
The Board of Commissioners				
Tan Ping	Komisaris Utama	3 kali	3 kali	100%
	President Commissioner	3 times	3 times	
Mariano Halilintar	Komisaris Independen	3 kali	3 kali	100%
	Independent Commissioner	3 times	3 times	
Direksi				
Directors				
Velliana Tanaya	Direktur Utama	3 kali	3 kali	100%
	President Director	3 times	3 times	
Suryadi	Wakil Direktur Utama	3 kali	3 kali	100%
	Vice President Director	3 times	3 times	
Rio Handono	Direktur	3 kali	3 kali	100%
	Director	3 times	3 times	

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

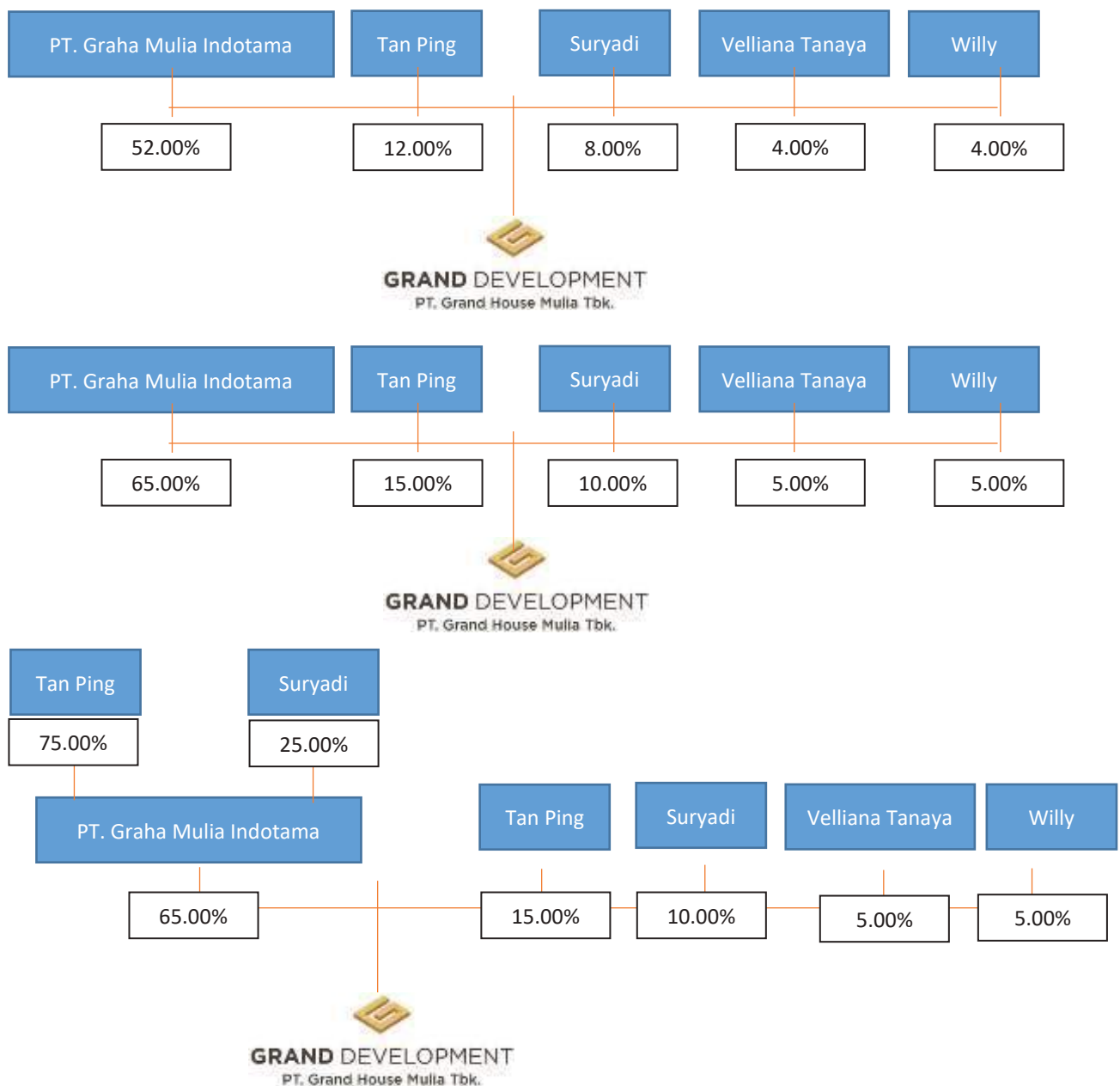
Information on Ultimate and Controlling Shareholders

Berikut ini adalah skema Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.

Pihak pengendali dan pemegang saham utama (ultimate shareholder) dari Perseroan adalah Tan Ping.

The following is the scheme of the Main Shareholders and Controlling Shareholders both directly and indirectly to individual owners.

The controlling party and the ultimate shareholder of the Company are Tan Ping.



Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Affiliation of the Board of Commissioners, Directors and Ultimate/Controlling Shareholders

No	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
	Name	Position	Nature of Family Relationship
1	Tan Ping Suryadi	Komisaris Utama dan Direktur	Orang Tua dan Anak Kandung
		President Commissioner and Director	Parents and Son
2	Tan Ping Velliana Tanaya	Komisaris Utama dan Direktur Utama	Orang Tua dan Anak Kandung
		President Commissioner and President Director	Parents and Son
3	Tan Ping Willy		Orang Tua dan Anak Kandung
			Parents and Son
4	Suryadi Velliana Tanaya	Direktur dan Direktur Utama	Saudara Kandung
		Director and President Director	Siblings
5	Suryadi Willy		Saudara Kandung
			Siblings
6	Velliana Tanaya Willy		Saudara Kandung
			Siblings

Komite Audit Audit Committee

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut "POJK No. 55/2015") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 005/GHM/DIR/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Komposisi Komite Audit

Bahwa Perseroan memiliki Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK No. 73/POJK.05/2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/GHM/DIR/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Mariano Halilintar	Ketua Chairman
Andi Dharma Alamsyah	Anggota Member
Ainun Jariah	Anggota Member

Independensi Komite Audit

Komite Audit bekerja secara independen dan profesional baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan kepada Dewan Komisaris yang telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit bukan merupakan pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perseroan

To fulfil the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated on December 23, 2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee (hereinafter referred to as "POJK No. 55/2015") and Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 November 19, 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, hereby the Company has decided to establish the Company's Audit Committee based on Decree No. 005/GHM/DIR/II/2020 dated on Feb 17, 2020, with the following composition of members:

Audit Committee Composition

That the Company has an Audit Committee in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee and POJK No. 73 / POJK.05 / 2016 based on Decision Corporate Correspondent Board No. 005/GHM/DIR/II/2020 dated Feb 17, 2020, with the following arrangement:

Audit Committee Independence

The Audit Committee works independently and professionally both in carrying out its duties and in reporting to the Board of Commissioners which has fulfilled the independence criteria as follows:

1. Members of the Audit Committee are not executive officers of the Public Accountant Office who provide audit services and/or non-audit services to the

dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit.

2. Anggota Komite Audit bukan merupakan pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perseroan dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris telah disusun dalam Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Februari 2020. Piagam ini mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam menjalankan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit dan pengendalian internal, penerapan GCG, serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik.
7. Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.

Company within the last six months prior to their appointment as members of the Audit Committee.

2. Members of the Audit Committee also do not have financial, management, share ownership and/or family relations with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relations with the Company, which can affect their independence.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris telah disusun dalam Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Februari 2020. Piagam ini mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam menjalankan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit dan pengendalian internal, penerapan GCG, serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Reviewing the financial information that will be issued by the Company to the public and/or the authorities including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
2. Reviewing compliance with the provisions of the laws and regulations relating to the activities of the Company.
3. Providing independent opinion in the event of disagreements between management and accountants for the services they provide.
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and service fees.
5. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.
6. Reviewing the independence and objectivity of public accountants.
7. Conducting a review of the adequacy of examinations conducted by public accountants to ensure all risks.

8. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
 9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
 12. Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan
 13. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
8. Reviewing the implementation of risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
 9. Reviewing complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company.
 10. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company.
 11. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.
 12. Conduct an examination of suspected errors in the Directors 'Meeting Decisions or irregularities in the implementation of the results of the Directors' Meeting Resolutions. The audit can be carried out by the Audit Committee or an independent party appointed by the Audit Committee at a cost borne by the Company; and
 13. Submitting a review report to all members of the Board of Commissioners of the Company after the completion of the review report conducted by the Audit Committee.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 17 Februari 2020. Masa tugas anggota komite audit selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

At present the Audit Committee of the Company has not held a meeting because the formation of the Audit Committee was only held on February 17, 2020. As for the future, the Audit Committee will conduct meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year in accordance with the Financial Services Authority Regulations (OJK) Number 55 / POJK.04 / 2015 dated December 23, 2015 concerning Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee.

At present there is no short report on the implementation of the Audit Committee, because the Company's Audit Committee was only formed on February 17, 2020. The tenure of an audit committee member is 3 (three) years and may not be longer than the term of office of the Company's Board of Commissioners.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Report of the Audit Committee Activities

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan rapat dengan pembahasan sebagai berikut:

During 2020, the Audit Committee held a meeting with the following discussion:

Tanggal Date	Agenda
15 Oktober 2020/ October 15, 2020	Melakukan penunjukan KAP/Appointment of Public Accountant Firm
15 Oktober 2020/ October 15, 2020	Memberikan arahan terkait sistem pengendalian intern perusahaan meliputi/Provide direction regarding the company's internal control system, including: - Kebijakan/rancangandapelaksanaansistempengendalianintern/Policy/designandimplementation of internal control systems - Hasil evaluasi dan efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan operasional/Evaluation results and effectiveness of internal controls at the entity and operational level

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak dua (2) kali, baik dengan auditor eksternal, auditor internal maupun dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frequency of Meetings and Level of Attendance of the Audit Committee

Throughout 2020, the Audit Committee held two (2) meetings, both with external auditors, internal auditors and with the Board of Commissioners and Directors of the Company with the following attendance frequency:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Hadir Total Attendance	%
Mariano Halilintar	Ketua Chairman	2	2	100%
Andi Dharma Alamsyah	Anggota Member	2	2	100%
Ainun Jariah	Anggota Member	2	2	100%

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Penunjukan Sekretaris Perusahaan merujuk pada peraturan Bapepam-LK No.IX.1.4. Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Perseroan yang berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya . Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-undangan di bidang pasar modal dan menjaga citra ke dalam dan ke luar perusahaan. Fungsi utama Sekretaris Perusahaan antara lain mencakup penanganan fungsi sekretariat perusahaan, hubungan kemasyarakatan, corporate lawyer, penerapan GCG, tanggung jawab sosial perusahaan, pembinaan usaha kecil dan koperasi, dan bina lingkungan.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 006/GHM/DIR/II/2020 pada tanggal 17 Februari 2020, Perseroan mengangkat Cecep Miptahudin S.H., M.Kn sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

The Corporate Secretary is appointed based on the Bapepam-LK No. IX.1.4. The Corporate Secretary is a supporting organ of the Company that plays an important role in facilitating communication between the Company's organs, the relationship between the Company and shareholders, regulators, such as the Financial Services Authority, and other stakeholders. Corporate Secretary is in charge of ensuring the Company's compliance with regulations in the capital market sector and maintaining the image in and outside of the Company. Corporate Secretary's main function among others is managing the company's secretariat function, public relations, corporate lawyer, GCG implementation, corporate social responsibility, fostering small businesses and cooperatives, and community development.

Based on Decree No. 006/GHM/DIR/II/2020 on Feb 17 2020, the Company appointed Cecep Miptahudin S.H., M.Kn as Corporate Secretary. The functions and/or responsibilities of the Corporate Secretary as stipulated in POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, among others, following the development of the Capital Market, particularly legislation related to the Capital Market, providing input to the Board of Commissioners and Board of Directors of Issuers or Public Companies to comply with laws and regulations in the Capital Market sector, assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance^{rd of}, as a liaison between the Issuer or Public Company with shareholders, FSA, and other stakeholders.



Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretariat Perusahaan

PT Grand House Mulia, Tbk
Jl. Raya Pengasinan No. 99 Desa Pengasinan,
Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Website:
<http://www.granddevelopment.id/>

Telp.: 021 - 5389788,
Email: corsec@granddevelopment.com

Berikut adalah informasi seputar Cecep Miptahudin SH, M.Kn, yakni sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pamulang dan Magister Hukum dari Universitas Jayabaya Jakarta.

Sebelumnya pernah bekerja di PT Securindo Packatam Indonesia sebagai Regional Bussiness Manager Area Sumatera, kemudian pernah bekerja di PT. Trimitra Propertindo, Tbk sebagai Legal Manager, kemudian bekerja di Padjajaran Law Firm sebagai Advokat, kemudia bekerja sebagai PT. Grand House Mulia, Tbk sebagai Corporate Secretary hingga sekarang.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

The address, telephone number and e mail address of the Corporate Secretary are as follows:

Company Secretariat

PT Grand House Mulia, Tbk
Jl. Raya Pengasinan No. 99,
Pengasinan Village, Gunung Sindur, Bogor District
Website: <http://www.granddevelopment.id/>

Tel : 021 - 5389788,
Email: corsec@granddevelopment.com

The following is information about Cecep Miptahudin SH, M.Kn, which is as follows:

Indonesian citizen

He holds a law degree from Pamulang University and a Masters in Law from Jayabaya University, Jakarta.

Previously worked at PT Securindo Packatam Indonesia as Regional Business Manager for Sumatra Area, then worked at PT. Trimitra Propertindo, Tbk as Legal Manager, then worked at Padjajaran Law Firm as an Advocate, then worked as PT. Grand House Mulia, Tbk as Corporate Secretary until now.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kepada publik khususnya pemegang saham mengenai kondisi Perseroan termasuk kegiatan ataupun transaksi material yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan. 2. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan terkini yang berlaku di pasar modal. 3. Bertindak sebagai mediator antara Perseroan dengan regulator, investor dan publik serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dari para regulator. 4. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik (GCG) di Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia tepat waktu; c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 6. Membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sedikitnya sekali dalam setahun. 7. Memelihara kerahasiaan dokumen, data dan informasi kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Providing information to the public, especially shareholders, regarding the situation, activities, or material transactions that can affect the Company's condition. 2. Following the development of the capital market, especially the latest regulations that apply in the capital market. 3. Acting as a mediator between the Company and regulators, investors and the public and ensuring the Company's compliance with the provisions of the regulators. 4. Provide input to the Board of Directors of the Company regarding the compliance with applicable laws and regulations 5. Supporting the Board of Directors and the Board of Commissioners in monitoring the implementation of Good Governance (GCG) principles in the Company in accordance with applicable laws and regulations including: <ol style="list-style-type: none"> a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Website of the Issuer or Public Company; b. Submission of reports to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange on time; c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders; d. Organizing and documenting Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; and e. Organizing orientation program for the Directors and / or Commissioners. 6. Prepare periodic reports to the Board of Directors regarding the implementation of the corporate secretary functions and submit it to the Board of Commissioners at least once a year. 7. Maintain the confidentiality of documents, data and information except in the context of fulfilling obligations in accordance with laws and regulations or otherwise stipulated in legislation. |
|---|---|

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melakukan sejumlah kegiatan meliputi:

DESCRIPTION ON CORPORATE SECRETARY'S ACTIVITIES

During 2020, Corporate Secretary has conducted multifarious activities among others

Kegiatan Activities	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Webinar - Pelatihan pelaporan ke IDX <i>Webinar - Reporting training to IDX</i>	IDX	24 September 2020
Webinar - Sukuk Syariah dari IDX <i>Webinar-Syariah Sukuk from IDX</i>	IDX	01 Oktober 2020
Sosialisasi Implementasi IDX Industrial Classification <i>IDX Industrial Classification Implementation Socialization</i>	IDX	15 Oktober 2020
Seminar Restrukturisasi dan Tindakan Korporasi dalam rangkaian acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020 - via zoom <i>Corporate Restructuring and Action Seminar in the series of Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020 events - via zoom</i>	IDX dan Bursa Efek Indonesia	20 Oktober 2020
Webinar Focus Group Discussion (FGD) Dengar Pendapat RSEOJK Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan EPP Confirmation <i>Webinar Focus Group Discussion (FGD) RSEOJK Hearing Form and Content of EPP Annual Report Confirmation</i>	OJK	11 November 2020
Webinar Surat Berharga Komersial Sebagai Alternatif Pembiayaan dan Investasi Jangka Pendek , Zoom Meeting - Bank Indonesia <i>Webinar on Commercial Securities as an Alternative to Short-Term Financing and Investment, Zoom Meeting - Bank Indonesia</i>	Bank Indonesia	01 Desember 2020
Dengar Pendapat Konsep Peraturan Bursa – Dalam rangka Rule Making Rule Konsep Peraturan Bursa Nomor II-s tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas dalam pemantauan khusus dan konsep perubahan peraturan bursa nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. <i>Hearings on the Concept of Exchange Regulations – In the context of Rule Making Rule, the Concept of Exchange Regulation Number II-s concerning Trading in Equity Securities under special monitoring and the concept of amendment to the Exchange Rules number I-A concerning the Listing of Shares and Equity Securities other than Shares issued by the Listed Company.</i>	IDX	11 Desember 2020
Peluang Baru : “Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit” <i>New Opportunity : “How Public Accountants Optimize Audit Services”</i>	IDX	16 Desember 2020

AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT

Audit Internal berperan dalam meningkatkan fungsi pengendalian internal serta memastikan jalannya kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Audit Internal juga bekerja secara independen dan tidak diperbolehkan melakukan perangkapan tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.OS/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Tifani Widiastuti, untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan No. 004/GHM/DIR/II/2020 tanggal 17 Februari 2020

Internal Audit plays a role in improving the internal control function and ensuring operational activities are in accordance with applicable regulations. In addition, Internal Audit also works independently and is not permitted to carry out concurrent assignments and positions, both in the Company and its subsidiaries.

The legal basis for the formation of the Company's Internal Audit Unit is the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.OS/2014 dated 19 November 2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies and Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on Establishment and Guidelines for Preparation of the Internal Audit Unit Charter. At present the Head of the Internal Audit Unit is held by Tifani Widiastuti, for a term that is not determined by duration, based on Decree No. 004/GHM/DIR/II/2020 dated Feb 17, 2020



Keterangan tentang Tifani Widiastuti adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia,
Memperoleh gelar Sarjana jurusan Administrasi Negera dari STIA Yappnn Jakarta

Information about Tifani Widiastuti is as follows:

Indonesian citizens,
Obtained a Bachelor's degree in State Administration from the STIA Yappnn Jakarta.

Sebelumnya bekerja di PT Ace Hardware Indonesia pada tahun 2011, Pernah bekerja di PT. Grains Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016, kemudian bekerja di PT. Grand House Mulia, Tbk sejak 2018 hingga sekarang.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Previously worked at PT Ace Hardware Indonesia in 2011, Worked at PT. Grains Indonesia from 2012 to 2016, then worked at PT. Grand House Mulia, Tbk since 2018 until now.

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are as follows:

- Develop and implement an annual Internal Audit plan.
- Test and evaluate the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with Company policies.
- Conducting checks and evaluations on efficiency and effectiveness in the field of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
- Provide objective and informative corrective advices on activities examined at all levels of management.
- Make an audit report and submit the report to the President Director, the Board of Commissioners and / or the Audit Committee.
- Monitor, analyze, and report on the implementation of suggested improvements.
- Cooperate with the Audit Committee and / or External Auditors for the implementation of audit activities.
- Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities that it does; and
- Conduct special audit whenever deemed necessary.

In implementing good Corporate Governance, the Internal Audit Unit has an important role in evaluating the adequacy of internal controls, compliance with regulations. Thus, internal control becomes an integrated part of the system and procedures at each activity in the work unit, so that any irregularities can be identified early so that the work unit concerned can take corrective measures.

Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

DIVISI AUDIT INTERNAL **INTERNAL AUDIT DIVISION**

AUDIT INTERNAL

Komposisi Divisi Audit Internal terdiri dari para auditor sejumlah satu (1) orang, yaitu Tifani Widiastuti sebagai Manajer Audit Internal. Pengangkatan Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama atas Persetujuan Dewan Komisaris. Secara struktural, Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Secara umum, lingkup tugas Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas di bidang Keuangan, Akuntansi, Operasional, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya.
3. Memberikan berbagai informasi yang objektif dan rekomendasi perbaikan tentang berbagai kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan Manajemen.
4. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5. Mengawasi, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut korektif yang telah disarankan.

The Internal Audit Unit always conducts internal supervision by carrying out a systematic approach so that the application of good corporate governance principles can run well and appropriately.

The term of service of members of the Internal Audit Unit is 5 (five) years and may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners of the Company.

Internal Audit

The composition of the Internal Audit Division consists of one (1) auditor, namely Tifany Widiastuti as Manager of Internal Audit. Appointment of Internal Audit is carried out by the President Director at the Board of Commissioners' Approval. Structurally, Internal Audit is responsible to the President Director of the Company and has a functional relationship with the Audit Committee.

Internal Audit Duties and Responsibilities

In general, the scope of duties of the Internal Audit Division are as follows:

1. Conduct testing and evaluation of the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with Company policies.
2. Conduct audits and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of Finance, Accounting, Operations, Human Resources, Marketing, Information Technology and other activities.
3. Provide a variety of objective information and recommendations for improvements regarding various audited activities at all levels of Management.
4. Submitting the audit report to the President Director and the Board of Commissioners.
5. Supervise, analyze and report on the implementation of corrective follow-up that has been suggested.

Kedudukan Unit Audit Internal Dalam Struktur Perusahaan

Unit Audit Internal dalam Perseroan berkedudukan di bawah Komite Audit, di mana Komite Audit merupakan Komite yang langsung berada di bawah Dewan Komisaris.

Position of Internal Audit Unit in Company Structure

The Internal Audit Unit in the Company serves under the Audit Committee, while the Audit Committee is a Committee directly under the Board of Commissioners.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Internal

Sepanjang tahun 2020, Unit Audit Internal telah melaksanakan audit untuk dua (2) proyek dari dua (2) proyek.

Report on the Implementation of Internal Audit Unit Activities

Throughout 2020, the Internal Audit Unit conducted audits for two (2) projects from two (2) projects

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014. Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 Oktober 2018, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Nomination and Remuneration function to determine salaries, fees, and/or allowances for members of the Board of Directors as stated in OJK Regulation No.34/2014. Based on the Guidelines for the Board of Commissioners of the Company dated October 22, 2018, the function of the Nomination and Remuneration Committee of the Company is carried out by the Board of Commissioners of the Company.

Saat ini terkait dengan fungsinya sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak tiga (3) kali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik, dimana Komite melaksanakan rapat sekurang-kurangnya tiga (3) kali dalam satu tahun.

As of recently, related to its function as the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners of the Company has held meetings three (3) times. This is in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, where the Committee carries out meetings at least three (3) times in one year

KEBIJAKAN DIVIDEN DIVIDEND POLICY

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang

New shareholders from Initial Public Offering will obtain equal rights with the Company's existing shareholders, including the right to receive dividends. Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, dividend distribution is carried out based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS). Before the fiscal year is ended, interim dividends can be distributed in accordance with the Company's Articles of Association and interim dividend distribution shall not cause the Company's net assets to be less than the issued and fully paid capital and the Company's required reserves. The distribution of the interim dividend is determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. After the end of the financial year, if the Company's interim dividend distribution is incurred a loss, then the interim dividend that has been distributed must be returned by the shareholders to the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors will be jointly and severally responsible for the said return if the interim dividend is not returned by the shareholders. After the Initial Public Offering, the Company's Management has the policy to pay dividends with a maximum ratio of 30% (thirty percent) of the Company's profit for the financial year 2024 based on the current profit year 2023, in cash to all shareholders of the Company. at least once a year, but with due regard to the financial position or soundness of the Company and the decisions of the General Meeting of Shareholders.

Cash dividends will be paid in Rupiah. At the recording date, the shareholders will obtain the rights to the dividend in full amount and be subject to income tax applicable in the tax provisions in Indonesia. Cash dividends received by shareholders from outside

saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2018, 2019, dan 2020.

Indonesia will be subject to income tax in accordance with the provisions of taxation in Indonesia.

There is no negative covenant that can prevent the Company from distributing dividends to shareholders. The Company did not distribute dividends in the fiscal years of 2018, 2019 and 2020.

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah- jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

The main function of Public Accountant in Public Offering is to carry out the audits based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Accountants. The standard requires Public Accountant to plan and carry out audits in order to obtain sufficient assurance that the financial statements prepared by the Company is free from material misstatement. Public Accountant is responsible to provide opinions regarding the audited financial statements. Audit conducted by Public Accountant shall include examining the basis of testing evidence that support the amounts and disclosures stated in the financial statements. Also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management and evaluating the overall financial statement presentation. Public Accountants are responsible for opinions regarding the fairness of the Company's financial statements.

Manajemen Risiko Perusahaan Company Risk Management

Manajemen Risiko adalah tanggung jawab seluruh jajaran manajemen pada setiap unit bisnis dengan tugas mengidentifikasi dan mengelola risiko sesuai dengan wewenang yang melekat masing-masing unit terkait. Dalam menghadapi kondisi industri yang penuh dengan tantangan, Perseroan mengutamakan prinsip pengelolaan manajemen risiko yang berazaskan penghindaran risiko, pemindahan risiko, pengurangan efek negatif risiko, serta penampungan sebagian atau seluruh konsekuensi atas risiko tertentu.

Manajemen Risiko adalah suatu budaya, di mana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna, terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan. Pengelolaan manajemen risiko dilaksanakan melalui tata cara pengelolaan yang sistematis, terintegrasi, optimal, dan berkesinambungan. Prosedur pelaksanaan manajemen risiko diawali dari proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai faktor risiko yang mungkin muncul dan menghambat proses operasional dan manajerial perusahaan. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko yang tercermin dalam implementasi manajemen risiko. Perseroan melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko sekaligus usaha perbaikan untuk menanggulangi implikasi negatif dari risiko tersebut. Upaya pengendalian risiko akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah penurunan nilai perusahaan yang signifikan sekaligus mempertahankan daya saing.

Manajemen Risiko yang Diterapkan Dalam Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko di Perseroan, Direksi menerapkan pendekatan multi aspek untuk menelaah risiko secara terintegrasi. Untuk itu, sistem manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan adalah Enterprise Risk Management (ERM)

Risk Management is the responsibility of all management levels in each business unit, where they are tasked with identifying and managing risks in accordance with the inherent authority of each related unit. In the face of challenging industry conditions, the Company prioritizes risk management principles that are based on risk avoidance, risk transfer, reduction of negative risk effects, and the collection of some or all of the consequences of certain risks.

Risk Management is a culture, where processes and structures are directed at managing appropriate management, with potential opportunities and adverse impacts. Risk management is carried out through systematic, integrated, optimal, and sustainable management procedures. The procedure for implementing risk management begins with the risk identification process which aims to identify various risk factors that may arise and hinder the company's operational and managerial processes. The next step is controlling risk which is reflected in the implementation of risk management. The Company carries out various efforts needed to minimize the possibility of the occurrence of risks while at the same time addressing the negative implications of these risks. Risk control efforts will be carried out on an ongoing basis to prevent a significant decline in the value of the company while maintaining competitiveness.

Risk Management Applied in the Company

In order to improve the effectiveness of risk management in the Company, the Board of Directors applies a multi-aspect approach to analyse risks in an integrated manner. For this reason, the Company adopts the Enterprise Risk Management (ERM), which

yang merupakan suatu proses untuk mengelola risiko-risiko Perseroan secara menyeluruh (firm-wide basis) yang menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi, dan kegiatan usaha. Cakupan pengelolaan risiko pada Perseroan, antara lain meliputi bidang usaha residential/ housing, mal, hotel, apartemen, perkantoran, golf, waterpark, dan rumah sakit.

Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, Perseroan telah menyusun pedoman yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Perseroan serta sejalan dengan proses penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan. Perseroan juga senantiasa melakukan pembaruan pada kerangka manajemen risiko dengan standar yang merujuk pada standar internasional manajemen risiko ISO 31000.

Untuk menjalankan fungsi manajemen risiko, Perseroan memiliki Unit Manajemen Risiko (UMR) yang berfungsi:

1. Membantu pihak manajemen dalam membangun kerangka kerja ERM yang sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan masing-masing unit bisnis.
2. Berperan penting dalam melakukan konsolidasi dan pelaporan risiko utama yang diidentifikasi di berbagai unit bisnis kepada Direksi.
3. Mengkomunikasikan risiko strategis yang menjadi perhatian Direksi kepada seluruh unit bisnis.
4. Bertindak sebagai fasilitator dalam pengelolaan risiko dalam memberikan masukan atas pengelolaan risiko, pemantauan profil risiko, dan peninjauan efektivitas rencana mitigasi risiko yang disusun oleh setiap unit bisnis.

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan agar dapat meningkatkan efektivitas pelaporan, menjaga kelancaran proses mitigasi, serta pengawasan tingkat risiko. Penyempurnaan dan perbaikan sistem manajemen risiko di Perseroan juga dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan oleh manajemen di seluruh unit bisnis.

is a process to manage risks as a whole (firm-wide basis) that include various types of risks, locations and business activities. The risk management coverage of the Company includes, among others, residential/ mall, hotel, apartment, office, golf, waterpark and hospital fields.

In carrying out the risk management function, the Company has developed guidelines that are consistent with the characteristics and needs of the Company and are in line with the process of creating value for stakeholders. The Company also constantly updates its risk management framework with standards that refer to the ISO 31000 international risk management standard.

To carry out the risk management function, the Company has a Risk Management Unit (UMR) that functions:

1. Helping management in building an ERM framework in accordance with the organizational structure and needs of each business unit.
2. Consolidating and reporting key risks identified in various business units to the Directors.
3. Communicating strategic risks that are the concern of the Board of Directors to all business units.
4. Acting as a facilitator in risk management in providing input on risk management, monitoring risk profiles, and reviewing the effectiveness of risk mitigation plans prepared by each business unit.

The Company is always committed to improving and perfecting the risk management implemented in the Company so that it can improve the effectiveness of reporting, maintain the smoothness of the mitigation process, and monitor risk levels. Improving the risk management system in the Company can support appropriate decision making by management in all business units.

PROFIL RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN COMPANY RISK PROFILE

Ada dua kategori utama dalam profil risiko Perseroan, yakni risiko strategis (reputasi, kepatuhan pada regulasi, keuangan, dll) serta risiko operasional (sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis & SOP, dll). Penyusunan profil risiko dilakukan melalui pendekatan bottom-up dari unit-unit bisnis dan disempurnakan dengan umpan balik (top-down) dari Direksi. Pemantauan terhadap pelaksanaan mitigasi profil risiko tersebut juga senantiasa dilakukan secara berkala.

Terdapat empat jenis risiko yang dihadapi Perseroan dan harus dikelola dengan baik. Keempat jenis risiko tersebut meliputi: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko suku bunga. Adapun penjelasan mengenai risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Kelompok Usaha berasal dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha kepada pihak ketiga) dan dari kegiatan pendanaan, termasuk rekening bank dan deposit berjangka.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Kelompok Usaha menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

3. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Kelompok Usaha dihadapkan dengan fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas.

There are two main categories in the Company's risk profile, namely strategic risk (reputation, regulatory compliance, finance, etc.) and operational risk (human resources, information technology, business processes & SOPs, etc.). The risk profile is prepared through a bottom-up approach from business units and is enhanced by feedback from the Directors. Monitoring of the implementation of the risk profile mitigation is also carried out regularly.

There are four types of risks faced by the Company and must be managed properly. The four types of risk include: credit risk, liquidity risk, currency exchange risk, and interest rate risk. The explanation of these risks is as follows:

1. Credit Risk

Credit risk is a risk in which one party in a financial instrument transaction fails to fulfill its obligations and causes the other party to incur a financial loss. Credit risk faced by the Group comes from operating activities (mainly from trade accounts receivable from third parties) and from funding activities, including bank accounts and time deposits.

2. Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as the risk when the Group's cash flow position shows that short-term revenues do not adequately cover short-term expenses.

3. Risk of Currency Exchange Rates

Currency exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Company is faced with exchange rate fluctuations mainly from cash and cash equivalents.

4. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Kelompok Usaha dihadapkan dengan risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank yang dikenakan suku bunga mengambang.

4. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. The Group is faced with the risk of changes in market interest rates primarily related to bank loans subject to floating interest rates.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam mengelola risiko yang dihadapi, Perseroan melakukan identifikasi dengan membuat daftar atas risiko-risiko yang dihadapi serta membuat rencana mitigasi risiko. Dari identifikasi yang dibuat, Perseroan akan menghitung nilai risiko baik yang melekat (sebelum mitigasi) maupun nilai risiko residual (setelah mitigasi).

Rencana mitigasi risiko akan dipantau realisasinya dan dilaporkan setiap tiga bulan untuk kemudian dihitung kembali nilai risiko residualnya. Tingkat efektivitas pengelolaan risiko dapat diukur dari menurunnya nilai risiko inherent (sebelum mitigasi) menjadi nilai risiko residual (setelah mitigasi).

Risk Management Efforts

The Company identifies the risks it faces by making a list of the risks faced, as well as making a risk mitigation plan. From this identification, the Company will calculate the risk value, both inherent (before mitigation) and residual risk value (after mitigation).

This risk mitigation plan will be monitored and reported every three months and then the value of the residual risk is recalculated. The level of effectiveness of risk management can be measured by decreasing the value of inherent risk (before mitigation) into the residual risk value (after mitigation).

SISTEM PENGENDALIAN INTERN INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Implementasi sistem pengendalian internal di Perseroan berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang berlaku umum untuk setiap departemen/bagian yang terkait operasional maupun keuangan. Adapun tujuan dari pengendalian internal dalam lingkup Perseroan adalah untuk memastikan bahwa semua sistem, prosedur, kaidah, dan norma telah berjalan dengan baik di semua organ dan seluruh personil Perseroan. Melalui sistem pengendalian internal yang baik, Perseroan berhadapan dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Financial and Operational Control System

The implementation of the internal control system in the Company refers to policies and procedures that are generally applicable to each operational and financial department. The purpose of internal control in the Company is to ensure that all systems, procedures, rules and norms are in place, in all organs and in all Company personnel. Through a good internal control system, the Company will be able to realize the effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

Sistem pengendalian internal di Perseroan juga dilakukan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan dan menyiapkan laporan keuangan yang ditujukan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun Dewan Komisaris turut melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap aspek keuangan dan operasional terutama terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO (Internal Control Framework)

Implementasi pengendalian internal di Perseroan merujuk pada standar internasional, yakni kerangka COSO. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam proses bisnis. Penerapan sistem pengendalian internal juga bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki suatu sistem yang andal terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, pelaporan keuangan, dan juga operasional. Untuk mengontrol dan meminimalisir risiko yang ada dalam pengendalian keuangan dan operasional, Perseroan menerjemahkan pengendalian internal dalam bentuk prosedur dan kebijaksanaan yang jelas.

Berdasarkan COSO framework, pengendalian internal di Perseroan terdiri dari lima komponen yang saling berhubungan yaitu:

1. Control Environment

Sebagai dasar komponen Pengendalian Internal yang menyediakan arahan bagi Perseroan dan memberikan pengaruh akan kesadaran pengendalian dari individu yang ada di dalam Perseroan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Control Environment antara lain adalah integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik serta kebijakan SDM.

The internal control system in the Company is also carried out to ensure the reliability of financial reporting and prepare financial reports for external purposes in accordance with applicable accounting principles. The Board of Commissioners also supervises and provides advices on financial and operational aspects, especially regarding the preparation and presentation of financial statements and risk management with due regard to the principle of prudence.

Conformity of the Internal Control System with COSO (Internal Control Framework)

The implementation of internal controls in the Company refers to international standards, namely the COSO framework. It is part of good corporate governance implementation in preventing fraud in the business processes. The implementation of the internal control system also aims to ensure that the Company has a reliable system of compliance with laws and regulations, financial reporting, and also operations. To control and minimize the risks involved in financial and operational controls, the Company translates internal controls into clear procedures and policies.

Based on the COSO framework, internal control in the Company consists of five interconnected components, namely:

1. Control Environment

The basis for the Internal Control that provides direction for the Company and affects the awareness of individuals within the Company towards internal control. The factors that influence Control Environment include integrity and ethical values, commitment to competence, the Board of Directors and Audit Committee, management style and operating style, organizational structure, authorization and responsibility, practices and HR policies.

2. **Monitoring**
Merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan, evaluasi secara terpisah atau kombinasi dari keduanya. Proses ini dilakukan untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian internal yang mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu serta pengambilan tindakan perbaikan. Dalam hal ini pemantauan terhadap kegiatan Perseroan dilakukan oleh Internal Audit.
3. **Risk Assessment**
Membentuk suatu fondasi untuk mengidentifikasi pengelolaan risiko dan melakukan analisis risiko yang relevan.
4. **Control Activities**
Memberikan suatu tingkat keyakinan akan adanya tindakan yang diperlukan dalam rangka menanggulangi risiko.
5. **Information and Communication**
Menyediakan informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk melakukan identifikasi, penggabungan, analisis, klasifikasi, pencatatan, dan pelaporan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Informasi terkait harus diidentifikasi, terdeskripsi dan terkomunikasi dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan tiap individu melaksanakan tanggung jawabnya.

Evaluasi yang Dilakukan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan, Internal Audit melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas proses operasi dan pengendalian Internal Perseroan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Laporan Hasil Audit yang mencakup rekomendasi dan saran perbaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2. **Monitoring**
A continuing activity, evaluation in a separate or combined manner of the two. This process is carried out to determine the quality of internal control performance which includes determining the design and operation of timely control and taking corrective actions. In this case the monitoring of the Company's activities is carried out by Internal Audit.
3. **Risk Assessment**
A foundation for identifying risk management and conducting relevant risk analysis.
4. **Control Activities**
Provide a level of assurance of the actions needed to mitigate risks.
5. **Information and Communication**
Providing relevant information in financial reporting, which includes an accounting system that contains methods for identifying, merging, analyzing, classifying, recording and reporting transactions and maintaining the accountability of assets and liabilities. Related information must be identified, described and communicated in the form and period of time that allows each individual to carry out his responsibilities.

Evaluation on the Effectiveness of the Internal Control System

In order to improve the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis, Internal Audit conducts examinations and evaluates the Company's operational processes and internal control. The results of the evaluation are then set forth in the Audit Results Report which includes recommendations for corrective actions to the President Director and the Board of Commissioners.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN LEGAL CASES INVOLVING THE COMPANY, BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF DIRECTORS

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun di tempat lainnya. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan maupun tempat lainnya. Selain itu, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun.

Throughout 2020, the Company is not involved in any criminal or civil cases, tax disputes or any disputes in the State Administrative Court, National Arbitration Board of Indonesia, Commerce, and Industrial Relations in the courts at the domicile of the Company or elsewhere. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are not involved in any criminal or civil cases, tax disputes, or any other disputes in the State Administrative Court of Indonesia, National Board of Arbitration Indonesia, or Commercial and Industrial Relation at the District Courts at the personal domicile of members of the Directors and the Board of Commissioners, the Company and other places. In addition, members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company do not accept any subpoena from any party.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN COMPANY INFORMATION ACCESS

Untuk mendukung penerapan prinsip GCG, terutama transparansi, Perseroan telah memiliki situs resmi (www.granddevelopment.id) di mana semua informasi mengenai Perseroan dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut masyarakat dapat mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada: corsec@granddevelopment.com

To support the implementation of GCG principles, especially transparency, the Company has an official website (www.granddevelopment.id) where all information about the Company can be accessed by the general public. In addition, to get further explanation, the public can send electronic mail addressed to: corsec@granddevelopment.com

Kode Etik Code of Ethics

Kepatuhan terhadap Kode Tata Laku sebagai kode etik Perseroan merupakan hal yang sangat penting terutama untuk membangun budaya kerja yang baik di lingkungan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk mengimplementasikannya dan mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap pilar dalam Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku tersebut dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada setiap jajaran. Pedoman Kode Tata Laku mengatur etika perilaku sebagai berikut:

- Tata Laku Pengurus dan Karyawan;
- Tata Laku terhadap Pelanggan;
- Tata Laku terhadap Pemegang Saham;
- Tata Laku terhadap Pemasok;
- Tata Laku terhadap Masyarakat
- Aspirasi Karyawan

Kode etik ini berlaku bagi seluruh level organisasi dan tertuang dalam Bab III (Penutup) Pedoman Tata Laku yang menyatakan bahwa Setiap Pengurus dan Karyawan Granddevelopment menerima salinan Kode Tata Laku sebagai Aturan tentang bagaimana Perseroan dan Karyawan berperilaku dalam menjalankan bisnis Perseroan. Upaya sosialisasi Kode Tata Laku dilakukan dengan cara pembagian dan penandatanganan Buku Kode Tata Laku yang dilakukan pada saat penetapan kontrak kerja yang harus dibaca dan ditandatangani oleh setiap karyawan. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan mengenai IPE.

Compliance with the Code of Conduct as a code of ethics of the Company is very important, especially to build a good work culture within the Company. In addition, the Company is also committed to implementing it and requires all leaders of each pillar in the Company to be responsible for ensuring that the code of conduct is adhered to and carried out properly at every level. The Code of Conduct Guidelines govern the ethics of behavior as follows:

- Management and Employee Code of Conduct;
- Code of Conduct towards Customers;
- Code of Conduct for Shareholders;
- Code of Conduct for Suppliers;
- Code of Conduct for the Community
- Employee Aspirations

This code of ethics applies to all levels of the organization and is contained in Chapter III (Closing) Code of Conduct which states that Each Granddevelopment Management and Employee accepts a copy of the Code of Conduct as a Rules for how the Company and Employees behave in conducting the Company's business. The socialization of the Code of Conduct is carried out by dividing and signing the Code of Conduct Book which is carried out at the time of stipulating the work contract that must be read and signed by each employee. In addition, the Company also held training on IPE.

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran Kode Tata Laku merujuk pada Peraturan Perusahaan pasal 46 yang berbunyi:

1. Menurut berat ringannya, sanksi terhadap pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja dapat berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Surat Peringatan Tertulis (I, II dan III).
 - c. Ganti rugi.
 - d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Dalam hal dilakukannya pelanggaran atau tindakan lain yang nyata-nyata secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan Perseroan, maka Perseroan berhak menjatuhkan sanksi yang berat atau terberat tanpa terikat pada urutan-urutan jenis sanksi sebagaimana diuraikan pada ayat 1 (satu) di atas.
3. Untuk pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan berulang kali walaupun sudah diberikan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat tingkatannya.

Sanksi yang dapat diberikan juga berdasarkan undang-undang yang berlaku.

The type of sanction for each violation of the Code of Conduct refers to Article 46 of the Company Regulation which reads:

1. According to its light weight, sanctions for violations of discipline and work discipline can be in the form of:
 - a. Oral reprimand.
 - b. Written Warning Letters (I, II and III).
 - c. Compensation.
 - d. Termination of employment (PHK).
2. In the event that a violation or other act that is directly or indirectly detrimental to the Company has been committed, the Company has the right to impose severe or heaviest sanctions without being bound to the sequence of types of sanctions as described in paragraph 1 (one) above.
3. For minor violations which are carried out repeatedly even though they have been given verbal reprimand and / or written warnings, sanctions can be imposed that are more severe.

Sanctions that can be given are also based on applicable laws.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Tidak ada pelanggaran Kode Etik selama tahun 2020

Number of Code Violations

There is no violation of the Code of Ethics during 2020.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Hingga saat ini, Perseroan belum memiliki tim khusus untuk menangani sistem pelaporan (whistleblowing system). Namun, segala pelaporan dari adanya unsur kecurangan atau kejanggalan akan ditangani oleh Divisi Audit Internal. Cakupan penanganan pelaporan oleh Audit Internal adalah penyelidikan dan ditindaklanjuti segala bentuk pelaporan yang masuk.

Divisi Audit Internal telah melakukan sosialisasi tentang adanya kebijakan sistem pelaporan (whistleblowing system) melalui penempatan standing banner di area yang terlihat oleh konsumen, kontraktor, supplier, dan lain-lain. Perseroan juga telah menyediakan beberapa pilihan dan mekanisme kepada semua pihak untuk melakukan pengaduan atas adanya penyimpangan dan/atau pelanggaran antara lain melalui hotline di nomor 021 - 5389788 dan email ke corsec@granddevelopment.com. Selain itu, Perseroan juga memberikan jaminan perlindungan sepenuhnya kepada para pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan jika pelapor merupakan karyawan maka keamanan posisinya juga dijamin karena identitasnya dirahasiakan.

Adapun penanganan dari setiap pengaduan yang masuk apabila bersifat komplain terhadap proyek maka akan diteruskan ke pihak Manajemen untuk ditindaklanjuti. Sedangkan pengaduan atas pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Divisi Audit Internal yang kemudian akan melakukan investigasi lebih dalam.

Until present, the Company has yet appointed a special team to handle the reporting system (whistleblowing system). However, all complaints or report of fraud or irregularities will be handled by the Internal Audit Division, with the scope of duty in handling reporting include conducting investigation and follow-up all kind of incoming report.

The Internal Audit Division has socialized the existence of a whistleblowing system through the placement of standing banners in areas seen by consumers, contractors, suppliers, and others. The Company has also provided several options, and mechanisms for all parties to file complain on irregularities and/or violations, among others, through the hotline at numbers 021 - 5389788 and email to corsec@granddevelopment.com. In addition, the Company guarantees a full protection to the whistleblower by maintaining the confidentiality of the reporter and if the whistle-blower is an employee then his/her position at the office is also guaranteed because his/her identity is kept confidential.

In handling each complaint, should it be related to the project, the complaint will be forwarded to the Management to be followed up, properly. Whereas complaints of violations will be followed up by the Internal Audit Division who will then conduct a deeper investigation.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Kebijakan dan Tata Kelola Granddevelopment telah menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). The Company terus berkomitmen untuk menjadikan filosofi dan tujuan CSR sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas Perusahaan yang berpijak pada konsep pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. The Company juga menyadari bahwa keberlanjutan Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal seperti sosial dan lingkungan hidup.

Atas dasar itu, Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perseroan memiliki keyakinan kuat bahwa sinergi antara kegiatan CSR dan kinerja bisnis berperan penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.

Perusahaan menerapkan kebijakan strategis dalam implementasi CSR untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR Perusahaan mengacu pada UU No 40 Tahun 2007 tentang The Company Terbatas pasal 74 maupun UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Regulasi ini menjadi landasan sekaligus pedoman bagi Perusahaan untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial yang baik dan merata di seluruh Aspek.

Sepanjang tahun 2020, Granddevelopment telah melaksanakan sejumlah program tanggung jawab sosial kepada segenap kalangan masyarakat, termasuk kepada pekerja.

Pelaksanaan program juga ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, di lokasi Perusahaan beroperasi.

Tata Kelola & Organisasi Kegiatan CSR dikelola dan ditangani oleh Bagian Komunikasi Perusahaan yang merupakan bagian dari Sekretaris Perusahaan.

Alokasi Anggaran Dana kegiatan CSR Perusahaan secara khusus dianggarkan dan dicatat sebagai biaya CSR yang merupakan bagian dari beban operasional. Perusahaan selalu berupaya untuk menjadi entitas yang senantiasa memberikan kontribusi nyata terhadap

The policy and Governance of Granddevelopment have implemented Corporate Social Responsibility or CSR. The Company is consistently committed to adapting CSR philosophy and purpose as integrated part of the Company's activity which is grounded on sustainable community development concept.

The Company is as well cognizant that the its sustainability is related with external factors such as social and environmental factors.

Based on this condition, the Company is committed to fulfilling its social responsibility to the surrounding society and environment. The company strongly believes that synergy between CSR activity and business performance have important role to achieve sustainable growth.

The Company implements strategic policy in CSR implementation to grow conducive and sustainable business atmosphere. The Company's CSR implementation refers to Law Number 40 of 2007 on Capital Investment.

This regulation is treated as foundation as well as guideline for the The Company to exercise good and fair social responsibility in all aspects.

Throughout 2020, Granddevelopment has implemented series of social responsibility program to all part of the society including our employees.

The program implementation is also emphasized to establish harmonious relationship with the neighbourhood where the Company is operated.

Governance and CSR activity were managed and handled by Corporate Communication Unit part of Corporate Secretary.

The Company's CSR activity funds is budgeted and recognized as CSR activity as part of operating expenses.

The Company always strives to be an entity that always makes a real contribution to the environment.

lingkungan sekitar. Aktualisasi dari peran tersebut dalam mengembangkan dan menjaga potensi lingkungan sekitar adalah dengan menyelenggarakan berbagai aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Aksi ini merupakan salah satu manifestasi kepedulian Perusahaan untuk menciptakan atmosfer positif guna mendorong potensi karyawan, pemegang saham, konsumen dan tentunya masyarakat luas.

Perusahaan senantiasa memperhatikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini didasari oleh faktor tuntutan global yang memiliki kaitan penting terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas dan etika bisnis. Di sisi lain, aktivitas CSR mendukung Perusahaan dalam mewujudkan konsistensi kinerja operasional Perusahaan dengan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar.

Berikut adalah aspek-aspek yang menjadi tolak ukur Perusahaan dalam menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:

- Lingkungan
- Pekerjaan, Kesehatan dan Keselamatan
- Masyarakat dan Pembangunan Sosial
- Tanggung jawab terhadap Pelanggan

Kegiatan sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan masih menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan aktivitas CSR sepanjang tahun 2020. Akan tetapi, Perusahaan tidak membatasi kegiatan-kegiatan pengembangan lainnya yang mendukung program CSR.

Actualization of the role in developing and maintaining the potential of the surrounding environment is by organizing various Corporate Social Responsibility (CSR) activities. This action is one manifestation of the Company's concern to create a positive atmosphere to encourage potential employees, shareholders, consumers and of course the wider community.

The Company always takes into account the implementation of Corporate Social Responsibility. This is based on global demand factors that have important links to the implementation of Good Corporate Governance and increased public awareness of the importance of accountability and business ethics. On the other hand, CSR activities support the Company in realizing the consistency of its operational performance by having a positive impact on the surrounding environment.

The following are aspects of the Company's benchmarks in conducting its Corporate Social Responsibility activities:

- Environment
- Employment, Health, and Safety
- Society and Social Development
- Customer Responsibility

Social activities relating to societies are still major priorities in organizing CSR activities throughout 2020. However, the Company does not limit other development activities that support CSR programs.

NO	Nama Kegiatan Activity	Tempat Venue
1	Pengajian rutin 3 bulanan & doa bersama Reading Quran every 3 month and prayer altogether	Marketing Gallery Grand Development
2	Santunan Anak Yatim Donations for orphans	Sekitar Lokasi Proyek Grand Development
3	Bantuan hewan kurban Animal qurban assistance	Warga sekitar Proyek Grand Development

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 PT Grand Development, Tbk.

Statement of The Board of Commissioners and Directors on Accountability for The Content of 2020 Annual Report of PT Grand Development, Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Grand House Mulia, Tbk. tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare the completeness of the information contained in the 2020 Annual Report of PT Grand House Mulia, Tbk. and our full responsibility for the accuracy of its content.

This statement has been made truthfully to the best of our knowledge.

Jakarta, 30 Juni 2021

Dewan Komisaris / Board of Commissioners



Tan Ping

Komisaris Utama

President Commissioner



Mariano Halilintar

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Jakarta, 30 Juni 2021

Direksi / Board of Directors



Velliana Tanaya

Direktur Utama

President Director



Suryadi

Wakil Direktur Utama

Vice President Director



Rio Handono

Direktur

Director



Laporan Keuangan

Financial Statement

**PT GRAND HOUSE MULIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Dengan Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

**PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)**

Daftar isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 50

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT GRAND HOUSE MULIA Tbk dan ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

No. 019/GHM/DIR/IV/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Velliana Tanaya
Alamat kantor : Jl. Raya Pengasinan No. 99, RT005/RW003
Pengasinan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Alamat domisili sesuai KTP Barat : Jl. Kelapa Sawit XIV BG 13/11 RT008/RW013 Kelurahan Pakulon
Kecamatan Kelapa Dua
Nomor telepon : 021-5389388
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rio Handono
Alamat kantor : Jl. Raya Pengasinan No. 99, RT005/RW003
Pengasinan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Alamat domisili sesuai KTP : Taman Asri C 6/13 RT008/001
Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan
Nomor telepon : 021-5389388
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian PT Grand House Mulia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 30 April 2021

Atas nama dan mewakili Direksi


Velliana Tanaya
Direktur Utama


Rio Handono
Direktur





Morison KSi
Independent member

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Centennial Tower 15/F, Suite 15B
Jl. Gatot Subroto Kav. 25, Jakarta 12930, Indonesia
Phone : (62 -21) 2295 8350
Fax : (62 -21) 2295 8351

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00279/2.0853/AU.1/03/0264-1/1/IV/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Grand House Mulia Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Grand House Mulia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Grand House Mulia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 27 Juli 2020, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan tambahan paragraf hal lain atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

TJAHJADI & TAMARA

Riani
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264

30 April 2021

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2d,4,27	11.108.774.250	4.863.379.520
Piutang usaha - pihak ketiga	2d,5,27	2.359.633.190	2.287.433.725
Aset real estat	2f,2k,6	117.620.944.785	87.710.266.680
Uang muka	7	1.446.638.375	1.666.626.118
Biaya dibayar di muka	2g,8	6.694.371	888.583.502
JUMLAH ASET LANCAR		132.542.684.971	97.416.289.545
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	2d,2i,17,27	-	1.275.000.000
Tanah untuk pengembangan	2h,2k,9	82.783.320.591	20.710.225.647
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	2d,10,27	19.031.647.449	2.920.281.076
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 406.472.866 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 287.207.301 pada tanggal 31 Desember 2019	2i,2k,11	397.727.504	452.646.699
Properti investasi	2j,2k,12	-	23.162.000.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		102.212.695.544	48.520.153.422
JUMLAH ASET		234.755.380.515	145.936.442.967

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	2d,13,27	5.960.056.662	13.489.222.133
Beban akrual	2d,27	79.229.821	50.000.000
Uang muka pelanggan	2n,14	59.942.333.665	21.123.109.650
Utang pajak	2o,15a	9.880.401.096	5.890.175.852
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2d,27		
Utang bank	16,17	25.020.000.000	12.954.067.753
Utang pembiayaan konsumen	11	97.806.535	89.907.038
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		100.979.827.779	53.596.482.426
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2d,27		
Utang bank	16,17	19.237.115.325	35.155.232.247
Utang pembiayaan konsumen	11	17.116.966	114.923.501
Utang pihak berelasi	2d,21,17,27	-	200.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	2m,18	124.370.000	86.738.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		19.378.602.291	35.556.893.748
JUMLAH LIABILITAS		120.358.430.070	89.153.376.174
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 2.500.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
- 31 Desember 2020: 787.500.000 saham	19	78.750.000.000	63.000.000.000
- 31 Desember 2019: 630.000.000 saham	2q,20	40.588.033.379	-
Tambahan modal disetor		(4.951.083.418)	(6.226.934.205)
Defisit			
Sub jumlah - neto		114.386.949.961	56.773.065.795
Kepentingan nonpengendali	2c	10.000.484	10.000.998
JUMLAH EKUITAS		114.396.950.445	56.783.066.793
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		234.755.380.515	145.936.442.967

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENJUALAN	2n,21	28.839.344.166	31.699.102.918
BEBAN POKOK PENJUALAN	2n,22	(18.206.843.501)	(21.426.567.711)
LABA BRUTO		10.632.500.665	10.272.535.207
BEBAN USAHA			
Beban penjualan	2n,23	(3.862.804.858)	(2.405.073.925)
Beban umum dan administrasi	2n,23	(4.535.767.195)	(1.776.027.647)
LABA USAHA		2.233.928.612	6.091.433.635
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Biaya keuangan	2n	(1.096.137.223)	(1.768.575.094)
Penghasilan lain-lain - neto	2n	833.210.489	228.717.799
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		1.971.001.878	4.551.576.340
BEBAN PAJAK FINAL	2o,15b	(720.983.605)	(573.786.987)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.250.018.273	3.977.789.353
PAJAK PENGHASILAN	2o,15c	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		1.250.018.273	3.977.789.353
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	2m,18	25.832.000	8.992.000
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.275.850.273	3.986.781.353
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		1.250.018.787	3.977.788.355
Kepentingan nonpengendali		(514)	998
Jumlah		1.250.018.273	3.977.789.353
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		1.275.850.787	3.986.780.355
Kepentingan nonpengendali		(514)	998
Jumlah		1.275.850.273	3.986.781.353
LABA PER SAHAM DASAR	2p, 24	1,84	138,67

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk							
	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Defisit	Jumlah - Neto	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2019		1.000.000.000	-	(10.213.714.560)	(9.213.714.560)	-	(9.213.714.560)
Penambahan modal saham	19	62.000.000.000	-	-	62.000.000.000	-	62.000.000.000
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	1c	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000
Laba tahun berjalan		-	-	3.977.788.355	3.977.788.355	998	3.977.788.353
Penghasilan komprehensif lain	18	-	-	8.992.000	8.992.000	-	8.992.000
Saldo 31 Desember 2019		63.000.000.000	-	(6.226.934.205)	56.773.065.795	10.000.998	56.783.066.793
Penawaran umum perdana saham Perusahaan:							
Penerbitan saham baru	19	15.750.000.000	-	-	15.750.000.000	-	15.750.000.000
Tambahan modal disetor - neto	20	-	40.588.033.379	-	40.588.033.379	-	40.588.033.379
Laba tahun berjalan		-	-	1.250.018.787	1.250.018.787	(514)	1.250.018.273
Penghasilan komprehensif lain	18	-	-	25.832.000	25.832.000	-	25.832.000
Saldo 31 Desember 2020		78.750.000.000	40.588.033.379	(4.951.083.418)	114.386.949.961	10.000.484	114.396.950.445

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		54.745.756.038	22.951.479.487
Pembayaran kas kepada:			
Pemasok		(53.523.606.472)	(46.756.815.682)
Karyawan		(3.318.740.366)	(1.201.214.860)
Kegiatan operasional lainnya		(4.300.909.766)	(3.555.452.821)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(6.397.500.566)	(28.562.003.876)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan tanah untuk pengembangan	9	(40.763.700.000)	(8.469.181.025)
Perolehan aset tetap	11	(64.346.370)	(7.700.000)
Perolehan properti investasi	12	-	(23.162.000.000)
Akuisisi entitas anak	1c	-	(990.000.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(40.828.046.370)	(32.628.881.025)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari hasil penawaran umum perdana saham - neto	19,20	56.338.033.379	-
Penurunan (peningkatan) piutang pihak berelasi	17	1.275.000.000	(1.275.000.000)
Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka panjang	16	(3.852.184.675)	19.756.648.435
Pembayaran utang pihak berelasi	17	(200.000.000)	(18.882.416.596)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(89.907.038)	(82.645.557)
Penambahan modal saham	19	-	62.000.000.000
Penerimaan utang pihak berelasi	17	-	200.000.000
Setoran modal entitas anak dari kepentingan nonpengendali	1c	-	10.000.000
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		53.470.941.666	61.726.586.282
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		6.245.394.730	535.701.381
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		4.863.379.520	4.327.678.139
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	11.108.774.250	4.863.379.520

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Grand House Mulia Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 9 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan Akta No. 02 tanggal 11 Juli 2007 dan No. 01 tanggal 4 Januari 2008, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ny. Suryati Moerwibowo, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-05124.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn No. 127 tanggal 19 Agustus 2020, antara lain mengenai perubahan status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, penerbitan saham baru dalam rangka *go public* dan perubahan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057136.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan penyedia akomodasi pada umumnya, khususnya hotel bintang tiga. Saat ini, Perusahaan sedang mengembangkan proyek perumahan "Parkville Serpong" yang berlokasi di Gunung Sindur, Bogor. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2019.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Raya Pengasinan No. 99, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Entitas induk langsung Perusahaan dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup") adalah PT Graha Mulia Indotama, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Tan Ping.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-232/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat sejumlah 157.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang merupakan saham baru Perusahaan, dengan harga penawaran sebesar Rp 380 per saham. Pada tanggal 10 September 2020, seluruh saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

c. Entitas Anak

Perusahaan mempunyai pengendalian dan kepemilikan langsung lebih dari 50% saham pada entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)	
				2020	2019	2020	2019
PT Berkat Indokarya Gemilang ("BIG")	Banten	Real estat dan penyediaan akomodasi	Belum beroperasi	99,96%	99,96%	35.904	23.364

Pada tanggal 25 November 2019, Perusahaan mengakuisisi 990 saham atau 99% kepemilikan saham BIG dari pihak berelasi dengan harga akuisisi sebesar Rp 990.000.000 atau sama dengan nilai buku ekuitas BIG pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2019, BIG melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan penuh sebesar Rp 22.162.000.000 yaitu dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 23.162.000.000, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sehingga persentase kepemilikan saham Perusahaan meningkat dari 99% menjadi 99,96%.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Kepala Unit Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 20 Februari 2020 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn No. 116 tanggal 21 Februari 2020 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0016135.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Februari 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Tan Ping	Direktur Utama	: Velliana Tanaya
Komisaris Independen	: Mariano Halilintar	Wakil Direktur Utama	: Suryadi
		Direktur	: Rio Handono

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 8 November 2019 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Raden Adrianto, SH No. 10 tanggal 11 November 2019 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0093138.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 November 2019, susunan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris	: Tan Ping
Direktur	: Velliana Tanaya

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/GHM/DIR/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Perusahaan telah membentuk Komite Audit dan susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mariano Halilintar
Anggota	: Andi Dharma Alamsyah
Anggota	: Ainun Jariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/GHM/DIR/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Direksi memutuskan pengangkatan Cecep Miptahudin sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/GHM/DIR/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, Direksi memutuskan pengangkatan Tifani Widiastuti sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

Manajemen kunci meliputi anggota Direksi dan manajemen senior Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah sejumlah 30 dan 10 karyawan (tidak diaudit).

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 April 2021.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK"), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013, No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali atas penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan konsolidasian, beberapa standar akuntansi keuangan yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan menggunakan metode langsung.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Penerapan kebijakan akuntansi;
- Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi dan tahun-tahun yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup diungkapkan pada Catatan 3.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar akuntansi keuangan.

Amandemen dan penyesuaian tahunan atas standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Judul Laporan Keuangan dan Definisi Material;
- Amandemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang Definisi Material;
- Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" tentang Menerapkan PSAK 71, Instrumen Keuangan dengan PSAK 62, Kontrak Asuransi;
- Penyesuaian Tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- ISAK 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- ISAK 36, "Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16, Aset Tetap dan PSAK 73, Sewa";
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Amandemen yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan:

- Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

Implementasi dari standar akuntansi keuangan tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 1c. Kendali diperoleh bila Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Perusahaan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Bila Perusahaan tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee* termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perusahaan.

Perusahaan menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada periode tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perusahaan memperoleh kendali sampai tanggal Perusahaan tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit.

Laporan keuangan entitas anak dibuat untuk tahun pelaporan yang sama dengan Perusahaan, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Seluruh saldo akun, transaksi, penghasilan dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra grup yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset, liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan.

i. Mulai 1 Januari 2020

- Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- 2) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") atau melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

- Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi aset keuangan tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga.

Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pihak berelasi dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVTPL dan FVOCI.

- Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, beban akrual dan utang jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Sebelum 1 Januari 2020

- Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pihak berelasi dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dalam laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

- Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, beban akrual, utang jangka panjang dan utang pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan awal

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal transaksi, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

i. Mulai 1 Januari 2020

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

ii. Sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir tahun pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara andal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

i. Mulai 1 Januari 2020

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.

ECL diakui dalam dua tahap. Jika belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, ECL diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Namun, jika telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, terlepas dari jangka waktu gagal bayar (ECL sepanjang umurnya).

Untuk piutang usaha, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi gagal bayar ketika telah menunggak lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit.

Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

ii. Sebelum 1 Januari 2020

Setiap akhir tahun pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

ii. Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah penyisihan kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir tahun pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasi lain.

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, sehingga aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada penghasilan komprehensif lain harus diakui pada laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir tahun pelaporan.

f. Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari tanah dalam pengembangan dan bangunan dalam konstruksi.

Biaya perolehan tanah dalam pengembangan meliputi biaya perolehan tanah untuk pengembangan (Catatan 2h), biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada kegiatan pengembangan real estat. Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dapat dijual lainnya, dialokasikan kepada area yang dapat dijual.

Biaya perolehan bangunan dalam konstruksi akan dipindahkan menjadi bangunan jadi pada saat selesai dikonstruksi.

Aset real estat dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal yang didasarkan pada harga pasar pada tanggal pelaporan dan didiskontokan sesuai nilai waktu uang, jika material, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya untuk melaksanakan penjualan. Penurunan nilai aset real estat ditetapkan untuk mengurangi nilai tercatat ke nilai realisasi neto dan penurunan tersebut diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Tanah untuk Pengembangan

Tanah untuk pengembangan merupakan tanah mentah yang akan dibangun properti pada tahun-tahun berikutnya. Biaya perolehan tanah untuk pengembangan dipindahkan ke dalam akun tanah dalam pengembangan pada saat telah matang dan siap untuk dikembangkan. Semua biaya dialokasikan secara proporsional ke tanah yang dapat dijual berdasarkan luas area masing-masing.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Aset Tetap

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tarif	Tahun
Kendaraan	12,5%	8
Inventaris dan peralatan kantor	25%	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pengeluaran yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti biaya perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Dalam situasi dimana dapat dibuktikan secara jelas bahwa pengeluaran tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis yang diharapkan diperoleh dari penggunaan aset tetap tersebut di masa datang yang melebihi kinerja normalnya, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, nilai residu, manfaat ekonomis dan metode penyusutan dievaluasi, dan jika sesuai keadaan, disesuaikan secara prospektif.

j. Properti Investasi

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi Grup terdiri dari tanah yang dikuasai Grup untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Grup menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri oleh Grup menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai rugi penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

l. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

m. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebagai liabilitas pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan pasca kerja

Grup memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba atau rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam tahun terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo akun defisit.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Efektif tanggal 1 Januari 2019, Grup telah melakukan penerapan dini atas PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

PSAK 72 mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, sebagai berikut:

- a) Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan).

Pendapatan diukur berdasarkan nilai yang diharapkan dapat diterima Grup atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagihkan atas nama pihak ketiga.

Pendapatan diakui ketika Grup memenuhi kewajibannya untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Jumlah pendapatan yang diakui adalah sebesar jumlah yang dialokasikan untuk bagian dari kewajiban yang terpenuhi.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan aset real estat diakui pada saat pengendalian atas aset real estat telah dialihkan ke pelanggan dan Grup tidak memiliki keterlibatan substansial yang berkelanjutan dengan real estat tersebut. Berdasarkan standar ini, Grup mengakui pendapatan dari penjualan aset real estat pada saat terjadi penyerahan aset real estat kepada pembeli (*at a point in time*). Uang muka yang diperoleh dari pelanggan diakui sebagai liabilitas kontrak dan disajikan dalam akun "Uang Muka Pelanggan".

Dalam menentukan harga transaksi, Grup menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak memberikan pelanggan atau Grup manfaat signifikan berupa pendanaan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan, dan dengan demikian mengandung komponen pendanaan signifikan. Berdasarkan panduan praktis dalam PSAK 72 untuk komponen pendanaan signifikan, Grup tidak perlu menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak komponen pendanaan signifikan jika Grup memperkirakan, pada saat kontrak dimulai, bahwa periode antara ketika Grup mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan ketika pelanggan membayar barang atau jasa tersebut dalam setahun atau kurang dari setahun.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

o. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71/2008 tanggal 4 November 2008, efektif tanggal 1 Januari 2009, penghasilan dari penjualan atau pengalihan tanah dan bangunan untuk pengembang real estat dikenai pajak final.

Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subyek pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Grup menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Untuk kegiatan lainnya, maka pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara pajak aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau entitas bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

p. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Laba per Saham (lanjutan)

Perubahan jumlah saham tanpa mengubah sumber daya diperlakukan secara retroaktif, sehingga jumlah saham yang beredar pada tahun yang disajikan sebelumnya disesuaikan secara proporsional seolah-olah perubahan jumlah saham tersebut telah terjadi sejak permulaan tahun paling awal yang disajikan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

q. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham perdana Perusahaan kepada masyarakat dikurangkan langsung dengan hasil emisi saham tersebut dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori geografis.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

s. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 38. Berdasarkan PSAK 38, transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Grup tersebut.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

t. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dipulihkan.

u. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

v. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kelangsungan Usaha

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi Instrumen keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apabila definisi yang ditetapkan PSAK 71 (mulai 1 Januari 2020) atau PSAK 55 (sebelum 1 Januari 2020) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi penjualan dan beban pokok penjualan. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah Indonesia.

Properti Investasi dan Properti Digunakan Sendiri

Grup menentukan apakah sebuah properti memenuhi syarat sebagai properti investasi. Dalam menentukan penilaiannya Grup mempertimbangkan apakah properti menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dimiliki oleh Grup. Properti yang digunakan sendiri menghasilkan arus kas yang dapat diatribusikan tidak hanya ke properti, tetapi juga ke aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

i. Sebelum 1 Januari 2020

Apabila terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang usaha, Grup mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha yang secara individual diidentifikasi ragu-ragu untuk ditagih. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas piutang usaha yang dinilai secara individual, maka Grup memasukkan piutang usaha tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha (lanjutan)

i. Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Tingkat cadangan ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang usaha tersebut. Grup menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia dan situasi-situasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, lama hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang usaha Grup ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

ii. Mulai 1 Januari 2020

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari *letter of credit* dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode atau tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian dapat dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Nilai tercatat piutang usaha Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 2.359.633.190 dan Rp 2.287.433.725. Penjelasan lebih rinci diungkapkan Catatan 5.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap tertentu disusutkan berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2i, yang merupakan umur ekonomis yang secara umum berlaku dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai buku aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 397.727.504 dan Rp 452.646.699. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 11.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Seperti dijelaskan pada Catatan 2m, hasil aktual yang berbeda dari asumsi Grup diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dikarenakan kompleksitas dari penilaian, asumsi dan periode jangka panjang, kewajiban manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 124.370.000 dan Rp 86.738.000. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18.

Pajak Penghasilan

Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha bisnis yang normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana hasil keputusan final tersebut dikeluarkan.

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2020	2019
Kas	146.180.612	141.311.817
Bank		
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.118.407.380	292.063.626
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.729.682.572	30.593.405
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.614.219.292	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	239.753.411	232.731.017
PT Bank Central Asia Tbk	131.480.880	238.435.570
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	129.050.103	1.146.388.514
Jumlah bank	10.962.593.638	1.940.212.132
Deposito berjangka		
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	2.781.855.571
Jumlah	11.108.774.250	4.863.379.520

Semua rekening bank dan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah Indonesia dan ditempatkan pada bank pihak ketiga.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Tingkat suku bunga rata-rata tahunan deposito berjangka adalah sebesar 5% untuk tahun 2019.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, akun ini merupakan piutang usaha dari pelanggan pihak ketiga dalam mata uang Rupiah Indonesia atas penjualan unit rumah di perumahan Parkville Serpong.

Rincian umur piutang usaha dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Belum jatuh tempo	2.359.633.190	2.209.108.801
Sudah jatuh tempo:		
91 sampai dengan 360 hari	-	78.324.924
Jumlah	2.359.633.190	2.287.433.725

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang usaha dari pihak ketiga dijadikan jaminan atas utang bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah (Catatan 16).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat tertagih seluruhnya dan terdapat jaminan unit rumah atas piutang tersebut.

6. ASET REAL ESTAT

Aset real estat terdiri dari:

	2020	2019
Bangunan dalam konstruksi	66.621.680.161	52.145.695.856
Tanah dalam pengembangan	50.999.264.624	35.564.570.824
Jumlah	117.620.944.785	87.710.266.680

Mutasi bangunan dalam konstruksi dan tanah dalam pengembangan adalah sebagai berikut:

	2020				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Bangunan jadi	-	-	11.945.293.530	11.945.293.530	-
Bangunan dalam konstruksi	52.145.695.856	26.421.277.835	-	(11.945.293.530)	66.621.680.161
Tanah dalam pengembangan	35.564.570.824	19.843.638.715	6.261.549.971	1.852.605.056 *	50.999.264.624

* Reklasifikasi dari tanah untuk pengembangan (Catatan 9).

	2019				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Bangunan jadi	-	-	15.690.556.470	15.690.556.470	-
Bangunan dalam konstruksi	25.368.238.183	42.468.014.143	-	(15.690.556.470)	52.145.695.856
Tanah dalam pengembangan	37.485.810.815	3.814.771.250	5.736.011.241	-	35.564.570.824

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET REAL ESTAT (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset real estat tidak diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, perjanjian pengikatan jual beli aset real estat yang telah dilakukan adalah untuk 211 unit rumah dengan nilai sebesar Rp 175.747.998.200.

Tanah dalam pengembangan merupakan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Pengasinan No. 99, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat dengan jumlah luas masing-masing 24.699 meter persegi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 27.388 meter persegi pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dibangun perumahan Parkville Serpong, atas nama Perusahaan dan tanah dalam pengembangan ini dijaminkan untuk utang bank yang diperoleh dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah (Catatan 16).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, bangunan dalam konstruksi merupakan biaya pembangunan untuk masing-masing 196 dan 144 unit rumah di atas tanah dalam pengembangan Perusahaan.

Berdasarkan hasil penelaahan, Grup berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai atas aset real estat.

7. UANG MUKA

Akun ini merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan operasional sehubungan dengan pengurusan perijinan-perijinan Grup masing-masing sebesar Rp 1.446.638.375 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 1.666.626.118 pada tanggal 31 Desember 2019.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Asuransi dibayar di muka	6.694.371	21.422.000
Emisi dibayar di muka	-	867.161.502
Jumlah	6.694.371	888.583.502

9. TANAH UNTUK PENGEMBANGAN

Tanah untuk pengembangan merupakan tanah milik:

	2020	2019
Perusahaan	48.180.820.591	20.710.225.647
Entitas Anak	34.602.500.000	-
Jumlah	82.783.320.591	20.710.225.647

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

9. TANAH UNTUK PENGEMBANGAN (lanjutan)

Perusahaan

Perusahaan memiliki tanah untuk pengembangan yang terletak di Jalan Raya Pengasinan No. 99, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat dengan jumlah luas masing-masing 24.788 meter persegi dan 20.381 meter persegi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Mutasi tanah untuk pengembangan milik Perusahaan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	20.710.225.647	12.241.044.622
Penambahan	29.323.200.000	8.469.181.025
Reklasifikasi ke tanah dalam pengembangan (Catatan 6)	(1.852.605.056)	-
Saldo akhir	48.180.820.591	20.710.225.647

Entitas Anak

Entitas Anak memiliki tanah untuk pengembangan yang terletak di Jalan Kampung Cisauk Erpak, Cisauk, Tangerang Selatan dengan jumlah luas 19.271 meter persegi.

Mutasi tanah untuk pengembangan milik Entitas Anak selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	-	-
Reklasifikasi dari properti investasi (Catatan 12)	23.162.000.000	-
Penambahan	11.440.500.000	-
Saldo akhir	34.602.500.000	-

Berdasarkan hasil penelaahan, Grup berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai atas tanah untuk pengembangan.

10. SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya PT Bank OCBC NISP Tbk	10.684.791.478	-
Rekening <i>escrow</i>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.350.518.243	1.016.307.615
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.045.499.948	-
PT Bank Central Asia Tbk	572.320.280	11.652.961
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	222.290.000	1.120.943.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah	156.227.500	771.377.500
Jumlah rekening <i>escrow</i>	8.346.855.971	2.920.281.076
Jumlah	19.031.647.449	2.920.281.076

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

10. SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka dan rekening escrow yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") untuk unit perumahan Parkville Serpong kepada para pelanggan Perusahaan. Deposito berjangka dan rekening escrow tersebut akan segera dicairkan oleh pihak Bank setelah Akta Jual Beli ditandatangani, pemecahan sertifikat telah dilakukan dan diserahkan kepada bank yang bersangkutan (Catatan 26).

Tingkat suku bunga rata-rata tahunan setara kas yang dibatasi penggunaannya dalam Rupiah Indonesia adalah sebesar 4,5% untuk tahun 2020 dan 5% untuk tahun 2019.

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap dan mutasinya adalah sebagai berikut:

2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Inventaris dan peralatan kantor	113.554.000	64.346.370	-	177.900.370
<u>Pembiayaan konsumen</u>				
Kendaraan	626.300.000	-	-	626.300.000
Jumlah harga perolehan	739.854.000	64.346.370	-	804.200.370
Akumulasi penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Inventaris dan peralatan kantor	64.423.968	40.978.065	-	105.402.033
<u>Pembiayaan konsumen</u>				
Kendaraan	222.783.333	78.287.500	-	301.070.833
Jumlah akumulasi penyusutan	287.207.301	119.265.565	-	406.472.866
Nilai buku neto	452.646.699			397.727.504
2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Inventaris dan peralatan kantor	105.854.000	7.700.000	-	113.554.000
<u>Pembiayaan konsumen</u>				
Kendaraan	626.300.000	-	-	626.300.000
Jumlah harga perolehan	732.154.000	7.700.000	-	739.854.000
Akumulasi penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Inventaris dan peralatan kantor	36.320.886	28.103.082	-	64.423.968
<u>Pembiayaan konsumen</u>				
Kendaraan	144.495.833	78.287.500	-	222.783.333
Jumlah akumulasi penyusutan	180.816.719	106.390.582	-	287.207.301
Nilai buku neto	551.337.281			452.646.699

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 penyusutan aset tetap dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 119.265.565 dan Rp 106.390.582 (Catatan 23).

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance, perusahaan pembiayaan pihak ketiga, untuk perolehan kendaraan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) tahun, dengan jaminan kendaraan yang bersangkutan.

Jadwal pembayaran nilai kini utang pembiayaan konsumen berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Dalam satu tahun	103.788.000	103.788.000
Lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari tiga tahun	17.298.000	121.086.000
Jumlah pembayaran angsuran masa depan	121.086.000	224.874.000
Dikurangi beban keuangan di masa depan	(6.162.499)	(20.043.461)
Nilai kini utang pembiayaan konsumen	114.923.501	204.830.539
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(97.806.534)	(89.907.038)
Bagian jangka panjang	17.116.967	114.923.501

Berdasarkan hasil penelaahan, Grup berkeyakinan tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang mengindikasikan penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

12. PROPERTI INVESTASI

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan tanah milik Entitas Anak yang terletak di Jalan Kampung Cisauk Erpak, Cisauk, Tangerang Selatan dengan jumlah luas 19.271 meter persegi.

Sehubungan dengan telah diperolehnya perijinan untuk pengembangan tanah tersebut, properti investasi tersebut telah direklasifikasi sebagai tanah untuk pengembangan pada tahun 2020 (Catatan 9).

13. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, akun ini merupakan liabilitas Grup atas pekerjaan konstruksi perumahan Parkville Serpong kepada pemasok dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
PT Jakpon Mitra Selaras	5.626.936.783	12.562.309.526
PT Saka Jagad Pratama	-	407.833.435
KJPP Ihot Dollar & Raymond	-	127.500.000
PT Deyon Resources	-	121.918.181
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 juta)	333.119.879	269.660.991
Jumlah	5.960.056.662	13.489.222.133

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh nilai tercatat utang usaha Grup berdenominasi Rupiah Indonesia.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

14. UANG MUKA PELANGGAN

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan dan *booking fee* untuk penjualan rumah pada perumahan Parkville Serpong dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Tipe 73/60	35.825.554.788	15.594.517.071
Tipe 63/60	24.116.778.877	5.528.592.579
Jumlah	59.942.333.665	21.123.109.650

Tidak terdapat uang muka pelanggan dari pihak berelasi.

15. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pajak penghasilan:		
Pasal 4 (2)	1.616.362.219	1.263.369.471
Pasal 21	54.912.283	109.225.773
Pasal 23	49.384.624	47.070.997
Pajak Pertambahan Nilai	8.159.741.970	4.470.509.611
Jumlah	9.880.401.096	5.890.175.852

b. Pajak final

Beban pajak final sehubungan dengan penjualan unit rumah pada perumahan Parkville Serpong adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pendapatan yang dikenakan pajak final pada tarif pajak yang berlaku	28.839.344.166	31.699.102.918
Beban pajak final	720.983.605	573.786.987

Grup menyajikan beban pajak final sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.250.018.273	3.977.789.355
Rugi (laba) sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	1.191.500	(2.310.723)
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	1.251.209.773	3.975.478.632
Laba yang dikenakan pajak final	(1.251.209.773)	(3.975.478.632)
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan	-	-
Beban pajak penghasilan kini	-	-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh pendapatan Grup dikenakan pajak final sehingga tidak terdapat beban pajak penghasilan.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT") Perusahaan.

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2019 sudah sesuai dengan SPT yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 30 April 2020.

Tidak terdapat Surat Ketetapan Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Tidak terdapat pajak penghasilan tangguhan karena seluruh pendapatan Grup dikenakan pajak final.

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan fasilitas Kredit Pembiayaan Konstruksi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	48.109.300.000	28.352.651.565
Penambahan selama tahun berjalan	-	19.756.648.435
Pembayaran selama tahun berjalan	(3.852.184.675)	-
Saldo akhir tahun	44.257.115.325	48.109.300.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(25.020.000.000)	(12.954.067.753)
Bagian jangka panjang	19.237.115.325	35.155.232.247

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah ("BTNS")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 002.SP3/MSY/TGR/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan konstruksi dari BTNS sebesar Rp 74.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit ini adalah untuk keperluan pembiayaan proyek perumahan Parkville Serpong. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2022 dengan jadwal pembayaran pokok kredit sesuai proyeksi arus kas yang disepakati.

Atas pinjaman ini, Perusahaan menjaminkan:

- Tanah dalam pengembangan atas proyek perumahan Parkville Serpong yang terletak di Gunung Sindur, Bogor (Catatan 6).
- Jaminan pribadi dari Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan (Catatan 17).
- Piutang Perusahaan terkait dengan proyek perumahan Parkville Serpong (Catatan 5).

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus tetap menjaga rasio agunan minimal 125% dan DER di bawah 500% pada setiap pencairan.

Berdasarkan perjanjian kredit, Perusahaan tanpa persetujuan dari BTNS dilarang melakukan hal-hal berikut:

- Melakukan penggabungan (*merger*), akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian harta atau modal saham perusahaan lain, menjual, menyewakan, mengalihkan semua atau bagian terbesar dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa dan membubarkan diri;
- Menjual, mengalihkan menjamin, atau membebaskan saham-saham dari pemegang saham kepada pihak manapun;
- Melakukan investasi/penyertaan pada pihak lain;
- Melakukan penyelesaian/pelunasan utang baik sebagian atau seluruh atas penempatan modal/investasi kepada investor atau pemegang saham;
- Menggunakan modal dan keuntungan usaha untuk kepentingan di luar Perusahaan;
- Memberi pinjaman kepada pihak lain atau pemegang saham dan pengurus kecuali karena berhubungan dengan bisnis Perusahaan;
- Membubarkan Perusahaan/lembaga atau meminta dinyatakan pailit;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- Melunasi utang kepada pemegang saham;
- Menerima pinjaman dari pihak lain untuk obyek pembiayaan yang sama;
- Merubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar Perusahaan, memindahkan tangankan saham Perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan atau mengubah susunan pengurus atau perubahan pendiri Perusahaan;
- Menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga;
- Memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Surat No. 546/TGR/COMC/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, BTNS telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") Perusahaan kepada masyarakat dan memberikan *waiver* atas syarat perjanjian kredit Perusahaan untuk melaksanakan IPO.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

17. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Semua transaksi berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Piutang pihak berelasi

Rincian piutang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tan Ping	-	1.275.000.000
Persentase terhadap jumlah aset	-	0,87%

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh Tan Ping dan tidak dikenai bunga serta tanpa jaminan.

Utang pihak berelasi

Rincian utang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
PT Trimitra Propertindo Tbk	-	200.000.000
Persentase terhadap jumlah liabilitas	-	0,22%

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan utang terkait operasional entitas anak.

Jaminan

Tan Ping dan Velliana Tanaya memberikan jaminan pribadi atas utang bank yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah (Catatan 16).

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun
PT Trimitra Propertindo Tbk	Entitas sepengendali	Utang pihak berelasi
Tan Ping	Komisaris Utama	Piutang pihak berelasi dan pemberi jaminan pribadi
Velliana Tanaya	Direktur Utama	Pemberi jaminan pribadi

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup memberikan imbalan pascakarya kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan pascakarya yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh PT Kappa Konsultan Utama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 3 Maret 2021 untuk tahun 2020 dan 20 Desember 2019 untuk tahun 2019.

Perhitungan aktuaris menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat diskonto	7,00%	7,77%
Tingkat kenaikan gaji	6,30%	8,51%
Tingkat cacat total permanen	10% TMI IV	10% TMI 2011
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
Tingkat pengunduran diri	6%	6%

Rincian dari liabilitas imbalan pascakarya yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	124.370.000	86.738.000

Rincian beban imbalan pascakarya yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Biaya jasa kini	56.724.000	52.789.000
Biaya bunga	6.740.000	3.291.000
Jumlah (Catatan 23)	63.464.000	56.080.000

Rincian beban imbalan pascakarya yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada ekuitas adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:		
Perubahan asumsi aktuarial	(20.185.000)	5.098.000
Penyesuaian pengalaman liabilitas program	(5.647.000)	(14.090.000)
Jumlah	(25.832.000)	(8.992.000)

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	86.738.000	39.650.000
Imbalan pasca kerja yang diakui pada laba rugi (Catatan 23)	63.464.000	56.080.000
Imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(25.832.000)	(8.992.000)
Saldo akhir	124.370.000	86.738.000

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban manfaat pasti dan biaya jasa kini pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Kenaikan 1%:		
Nilai kini kewajiban manfaat pasti	(45.233.000)	(31.312.000)
Biaya jasa kini	(21.872.000)	(20.288.000)
Penurunan 1%:		
Nilai kini kewajiban manfaat pasti	45.276.000	31.523.000
Biaya jasa kini	21.890.000	20.428.000

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Dalam waktu 1 tahun	-	-
Dalam 1 - 5 tahun	-	-
Di atas 5 tahun	124.370.000	86.738.000
Jumlah	124.370.000	86.738.000

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 14,68 tahun.

Manajemen telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk memenuhi liabilitas imbalan pasca kerja Grup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja tersebut di atas masih menggunakan UU No. 13/2003 yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 karena Peraturan Pemerintah ("PP") No. 35/2021 mengenai "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja", untuk melaksanakan beberapa ketentuan dari UU No. 11/ 2020 mengenai "Cipta Kerja" baru diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup masih mempelajari dampak dari penerapan PP tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

19. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan pemegang saham Perusahaan berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Graha Mulia Indotama	409.500.000	52%	40.950.000.000
Tan Ping (Komisaris Utama)	94.500.000	12%	9.450.000.000
Suryadi (Wakil Direktur Utama)	63.000.000	8%	6.300.000.000
Velliana Tanaya (Direktur Utama)	31.500.000	4%	3.150.000.000
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	189.000.000	24%	18.900.000.000
Jumlah	787.500.000	100%	78.750.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2019, susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Graha Mulia Indotama	409.500.000	65%	40.950.000.000
Tan Ping	94.500.000	15%	9.450.000.000
Suryadi	63.000.000	10%	6.300.000.000
Velliana Tanaya	31.500.000	5%	3.150.000.000
Willy	31.500.000	5%	3.150.000.000
Jumlah	630.000.000	100%	63.000.000.000

Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 18 Desember 2019

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 18 Desember 2019 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Raden Adrianto, SH No. 17 tanggal 20 Desember 2019, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Merubah nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.
2. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 250.000.000.000.
3. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 63.000.000.000 atau meningkat sejumlah Rp 62.000.000.000 yang akan diambil bagian oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah
PT Graha Mulia Indotama	40.950.000.000
Tan Ping	8.900.000.000
Suryadi	6.150.000.000
Velliana Tanaya	3.000.000.000
Willy	3.000.000.000
Jumlah	62.000.000.000

Perubahan anggaran dasar seperti yang dinyatakan dalam Akta No. 17 tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108304.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 18 Agustus 2020

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 18 Agustus 2020 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn No. 127 tanggal 19 Agustus 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui dan memutuskan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
2. Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.
3. Pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 157.500.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100 melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.

Perubahan anggaran dasar seperti yang dinyatakan dalam Akta No. 127 tersebut di atas telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057136.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Pernyataan Pendaftaran Perusahaan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham kepada masyarakat telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-232/D.04/2020 tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") sebanyak 157.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang merupakan saham baru Perusahaan, dengan harga penawaran sebesar Rp 380 per saham. Pada tanggal 10 September 2020, seluruh saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan selisih antara penerimaan IPO dengan jumlah nilai nominal saham yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Penerimaan IPO	59.850.000.000	-
Jumlah nilai nominal dari 157.500.000 saham baru yang diterbitkan sehubungan dengan IPO	(15.750.000.000)	-
Selisih dana	44.100.000.000	-
Biaya-biaya yang terkait dengan penerbitan saham baru sehubungan dengan IPO	(3.511.966.621)	-
Neto	40.588.033.379	-

Biaya-biaya yang terkait dengan penerbitan saham baru sehubungan dengan IPO Perusahaan terdiri dari imbalan yang dibayarkan kepada penjamin emisi efek, akuntan publik, penasihat hukum, penasihat keuangan, penilai dan Biro Administrasi Efek serta biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses IPO.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

21. PENJUALAN

Akun ini merupakan pendapatan dari penjualan unit rumah pada perumahan Parkville Serpong dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Tipe 73/60	21.530.472.678	13.762.937.720
Tipe 63/60	7.308.871.488	17.936.165.198
Jumlah	28.839.344.166	31.699.102.918

Pada tahun 2020 dan 2019, tidak terdapat penjualan kepada pihak berelasi dan tidak terdapat penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan.

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan atas penjualan unit rumah pada perumahan Parkville Serpong adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tipe 73/60	13.592.609.606	9.755.831.543
Tipe 63/60	4.614.233.895	11.670.736.168
Jumlah	18.206.843.501	21.426.567.711

Pada tahun 2020 dan 2019, tidak terdapat pembelian kepada pihak berelasi.

Seluruh biaya konstruksi bangunan Grup dikerjakan oleh PT Jakpon Mitra Selaras, pihak ketiga.

23. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Penjualan</u>		
Iklan dan promosi	1.678.084.568	1.692.514.558
Komisi	936.217.412	81.998.304
Gaji dan tunjangan	809.125.366	81.615.111
Pameran	191.405.091	159.096.441
Lain-lain	247.972.421	389.849.511
Jumlah beban penjualan	3.862.804.858	2.405.073.925
<u>Umum dan Administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan	2.469.747.500	1.121.404.023
Jasa profesional	1.365.172.648	296.400.000
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	119.265.565	106.390.582
Jamuan dan sumbangan	88.297.180	51.900.000
Imbalan pasca kerja (Catatan 18)	63.464.000	56.080.000
Lain-lain	429.820.302	143.853.042
Jumlah beban umum dan administrasi	4.535.767.195	1.776.027.647
Jumlah	8.398.572.053	4.181.101.572

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

24. LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Perhitungan laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebagai berikut

	2020	2019
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.250.018.273	3.977.788.355
Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk perhitungan laba per saham dasar	678.328.767	28.684.932
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1,84	138,67

Sesuai dengan ketentuan PSAK 56 (Revisi 2011), perubahan jumlah saham akibat perubahan nilai nominal saham (Catatan 19) yang tidak merubah sumber daya Perusahaan dianggap seolah-olah terjadi sejak 1 Januari 2019.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

25. INFORMASI SEGMENT

Grup mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara geografis, terutama terdiri dari:

- Gunung Sindur
- Cisauk

Manajemen memantau hasil operasi dari setiap pekerjaan di atas secara terpisah untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Grup konsisten dengan klasifikasi di atas.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Grup:

	2020		
	Gunung Sindur	Cisauk	Jumlah
Penjualan	28.839.344.166	-	28.839.344.166
Beban pokok penjualan	(18.206.843.501)	-	(18.206.843.501)
Laba bruto	10.632.500.665	-	10.632.500.665
Beban penjualan	(3.862.804.858)	-	(3.862.804.858)
Beban umum dan administrasi	(4.535.767.195)	-	(4.535.767.195)
Laba usaha	2.233.928.612	-	2.233.928.612
Biaya keuangan	(1.096.137.223)	-	(1.096.137.223)
Penghasilan lain-lain - neto	834.401.989	(1.191.500)	833.210.489
Beban pajak final	(720.983.605)	-	(720.983.605)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.251.209.773	(1.191.500)	1.250.018.273
Penghasilan komprehensif lain			25.832.000
Kepentingan nonpengendali			514
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			1.275.850.787

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

25. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Grup: (lanjutan)

	2020 (lanjutan)		
	Gunung Sindur	Cisauk	Jumlah
Informasi lainnya			
Aset segmen	200.151.761.292	34.603.619.223	234.755.380.515
Liabilitas segmen	120.358.430.070	-	120.358.430.070
Perolehan aset tetap	64.346.370	-	64.346.370
Penyusutan aset tetap	119.265.565	-	119.265.565
	2019		
	Gunung Sindur	Cisauk	Jumlah
Penjualan	31.699.102.918	-	31.699.102.918
Beban pokok penjualan	(21.426.567.711)	-	(21.426.567.711)
Laba bruto	10.272.535.207	-	10.272.535.207
Beban penjualan	(2.405.073.925)	-	(2.405.073.925)
Beban umum dan administrasi	(1.776.027.647)	-	(1.776.027.647)
Laba usaha	6.091.433.635	-	6.091.433.635
Biaya keuangan	(1.768.575.094)	-	(1.768.575.094)
Penghasilan lain-lain - neto	226.407.076	2.310.723	228.717.799
Beban pajak final	(573.786.987)	-	(573.786.987)
Laba sebelum pajak penghasilan	3.975.478.630	2.310.723	3.977.789.353
Penghasilan komprehensif lain			8.992.000
Kepentingan nonpengendali			(998)
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			3.986.780.355
Informasi lainnya			
Aset segmen	122.572.132.244	23.364.310.723	145.936.442.967
Liabilitas segmen	88.953.376.174	200.000.000	89.153.376.174
Perolehan aset tetap	7.700.000	-	7.700.000
Penyusutan aset tetap	106.390.582	-	106.390.582

26. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Pemilikan Rumah

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa bank yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah dalam rangka penyediaan fasilitas kredit kepada pembeli untuk pemilikan rumah. Oleh karena itu, saldo bank dan deposito berjangka Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan tersebut (Catatan 10). Saldo bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan sebagian dana yang diperoleh Perusahaan dari bank atas penjualan unit rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") yang dibatasi penggunaannya oleh bank terkait sampai dengan tercapainya penyelesaian persyaratan dan ketentuan sesuai kesepakatan dengan bank tersebut.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

27. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*) dan memiliki pengetahuan, dalam suatu transaksi yang wajar dan bukanlah dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- Nilai tercatat dari aset keuangan berupa setara kas yang dibatasi penggunaannya dan liabilitas keuangan berupa utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen mendekati nilai wajarnya karena ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.
- Nilai wajar piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari akun-akun tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Aset keuangan		
<u>Aset keuangan lancar</u>		
Kas dan setara kas	11.108.774.250	4.863.379.520
Piutang usaha	2.359.633.190	2.287.433.725
Jumlah aset keuangan lancar	13.468.407.440	7.150.813.245
<u>Aset keuangan tidak lancar</u>		
Piutang pihak berelasi	-	1.275.000.000
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	19.031.647.449	2.920.281.076
Jumlah aset keuangan tidak lancar	19.031.647.449	4.195.281.076
Jumlah aset keuangan	32.500.054.889	11.346.094.321
Liabilitas keuangan		
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>		
Utang usaha	5.960.056.662	13.489.222.133
Beban akrual	79.229.821	50.000.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	25.020.000.000	12.954.067.753
Pembiayaan konsumen	97.806.535	89.907.038
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	31.157.093.018	26.583.196.924
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	19.237.115.325	35.155.232.247
Pembiayaan konsumen	17.116.966	114.923.501
Utang pihak berelasi	-	200.000.000
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	19.254.232.291	35.470.155.748
Jumlah liabilitas keuangan	50.411.325.309	62.053.352.672

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

28. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan utama Grup terdiri dari utang usaha, beban akrual, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen. Grup juga mempunyai aset keuangan yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan setara kas yang dibatasi penggunaannya. Tujuan utama dari instrumen keuangan ini adalah untuk membiayai kegiatan operasional Grup.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi, pengembangan bisnis serta untuk mengelola risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup yaitu risiko kredit, risiko tingkat suku bunga dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup dihadapkan pada risiko kredit dari bank dan setara kas, piutang usaha dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan transaksi pembelian unit rumah secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang usaha dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang usaha.

Grup juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank dalam bentuk rekening bank maupun deposito berjangka. Untuk mengatasi risiko ini, Grup memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank yang mempunyai reputasi yang baik.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur maksimum risiko kredit Grup pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan operasi utama pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

2020				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Jumlah
Bank	10.962.593.638	-	-	10.962.593.638
Piutang usaha - pihak ketiga	2.359.633.190	-	-	2.359.633.190
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	19.031.647.449	-	-	19.031.647.449
Jumlah	32.353.874.277	-	-	32.353.874.277
2019				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Jumlah
Bank dan setara kas	4.722.067.703	-	-	4.722.067.703
Piutang usaha - pihak ketiga	2.287.433.725	-	-	2.287.433.725
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	2.920.281.076	-	-	2.920.281.076
Jumlah	9.929.782.504	-	-	9.929.782.504

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

28. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Grup dihadapkan pada risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank yang dikenakan suku bunga mengambang.

Grup mengelola risiko tingkat suku bunga dengan cara sangat berhati-hati dalam mengambil pinjaman bank dan membatasinya pada tingkat yang wajar sesuai dengan arus kas Grup.

Analisis Sensitivitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jika tingkat suku bunga turun/naik sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akan lebih tinggi/rendah masing-masing sebesar Rp 442.571.153 dan Rp 481.093.000.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko pada saat Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan arus kas kontraktual pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020			
	Jumlah	Jatuh tempo		
		Dalam 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun
Utang usaha	5.960.056.662	5.960.056.662	-	-
Beban akrual	79.229.821	79.229.821	-	-
Utang bank jangka panjang	44.257.115.325	25.020.000.000	19.237.115.325	-
Utang pembiayaan konsumen	114.923.501	97.806.535	17.116.966	-
Jumlah liabilitas keuangan	50.411.325.309	31.157.093.018	19.254.232.291	-
	2019			
	Jumlah	Jatuh tempo		
		Dalam 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun
Utang usaha	13.489.222.133	13.489.222.133	-	-
Beban akrual	50.000.000	50.000.000	-	-
Utang bank jangka panjang	48.109.300.000	12.954.067.753	35.155.232.247	-
Utang pembiayaan konsumen	204.830.539	89.907.038	114.923.501	-
Jumlah liabilitas keuangan	61.853.352.672	26.583.196.924	35.270.155.748	-

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

28. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Selain itu, Grup dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk berkontribusi sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Grup pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menerbitkan saham baru atau memperoleh pendanaan dari pinjaman baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tahun 2020 dan 2019.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

29. TRANSAKSI NON KAS

Rincian aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Reklasifikasi properti investasi ke tanah untuk pengembangan (Catatan 9 dan 12)	23.162.000.000	-
Reklasifikasi tanah untuk pengembangan ke tanah dalam pengembangan (Catatan 6 dan 9)	1.852.605.056	-

30. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020			
	1 Januari 2020	Arus kas	Nonkas	31 Desember 2020
Utang bank jangka panjang	48.109.300.000	(3.852.184.675)	-	44.257.115.325
Utang pembiayaan konsumen	204.830.539	(89.907.038)	-	114.923.501

	2019			
	1 Januari 2019	Arus kas	Nonkas	31 Desember 2019
Utang bank jangka panjang	28.352.651.565	19.756.648.435	-	48.109.300.000
Utang pembiayaan konsumen	287.476.096	(82.645.557)	-	204.830.539

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

31. REKLASIFIKASI AKUN

Berikut adalah akun-akun pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</u>			
Beban umum dan administrasi	2.349.814.634	(573.786.987)	1.776.027.647
Beban pajak final	-	573.786.987	573.786.987
<u>Laporan arus kas konsolidasian</u>			
Arus kas dari aktivitas operasi:			
Pembayaran kas kepada pemasok	(55.225.996.707)	8.469.181.025	(46.756.815.682)
Arus kas dari aktivitas investasi:			
Perolehan tanah untuk pengembangan	-	(8.469.181.025)	(8.469.181.025)

32. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("COVID-19") sebagai pandemi global, wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Grup serta pelanggan dan pemasok Grup. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman COVID-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Grup. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Grup, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

33. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang, berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.
- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" tentang Definisi Bisnis, berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.
- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" tentang Referensi terhadap Kerangka Konseptual, berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperkenankan.
- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak, berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperkenankan.

PT GRAND HOUSE MULIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

33. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan)

Standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2", berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 74, "Kontrak Asuransi", berlaku efektif 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.
- Penyesuaian Tahunan atas PSAK 69, "Agrikultur", PSAK 71, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73, "Sewa", berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 26 Januari 2021, yang dinyatakan dengan Akta Notaris Bastian Harijanto, SH, MKn No. 6 pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan menyetujui dan memutuskan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Tan Ping	Direktur Utama	: Velliana Tanaya
Komisaris Independen	: Nandar Ayi Yusamsi	Wakil Direktur Utama	: Suryadi
		Direktur	: Rio Handono

Perubahan seperti yang dinyatakan dalam Akta No. 6 tersebut di atas telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0092385 tanggal 11 Februari 2021.



(021) 538 9388

Parkland Avenue, Ground Floor
Jl. Raya Serpong No. 89 BSD Serpong

www.trimitraland.com

